



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kalimantan Utara

November 2025





**LAPORAN
PEREKONOMIAN**
Provinsi Kalimantan Utara

NOVEMBER
2025

Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging market* untuk Indonesia Maju.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kata Pengantar

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil asesmen rutin yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara. Kajian ini mengulas asesmen terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi, pembiayaan daerah dan akses keuangan UMKM, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian ke depan. Laporan diharapkan menjadi bahan referensi bagi stakeholders di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan penyusunan kebijakan baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) triwulan III 2025 tumbuh positif lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh meningkatnya kinerja Lapangan Usaha sektor Perdagangan, Konstruksi, dan Industri Pengolahan. Pertumbuhan ini tercermin dari kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) yang mengalami peningkatan seperti LU Perdagangan sejalan dengan meningkatnya produksi lapangan usaha dan aktivitas perdagangan, Lapangan Usaha Konstruksi yang tumbuh lebih tinggi didorong oleh berlanjutnya pembangunan Kawasan Industri di Mangkupadi serta LU Industri Pengolahan didukung oleh meningkatnya hasil produksi pabrik pengolahan kertas di Tarakan. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan III 2025 juga tumbuh positif yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan net ekspor.

Analisis pada laporan perekonomian menggunakan data primer, data sekunder, serta informasi dari berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah daerah/pusat maupun swasta. Melalui kesempatan ini, perkenalkan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan. Besar harapan kami bahwa hubungan kemitraan strategis yang terjalin selama ini dapat terus terjaga dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga senantiasa mengharapkan kritikan, masukan, dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal di masa yang akan datang bagi semua kalangan, khususnya dalam pengambilan kebijakan terkait perekonomian Provinsi Kaltara.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kelancaran dan kesuksesan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Utara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju.

Tarakan, 3 Desember 2025
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Utara

Hasiando G. Manik
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	viii
Ringkasan Eksekutif	x
Tabel Indikator	xii

01

Perkembangan Ekonomi Daerah

1.1. Gambaran Umum	2
1.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	2
1.3. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran	8
BOKS1: Akselerasi Program Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Strategi Utama Kaltara Reduksi Disparitas Harga Pangan	13

02

Perkembangan Keuangan Daerah

2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	18
2.2. APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara	21
2.3. Dana Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat	22

03

Perkembangan Inflasi Daerah

3.1. Gambaran Umum	26
3.2. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)	26
3.3. Inflasi Tahunan (yoy)	28
3.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	29
3.5. Upaya Pengendalian Inflasi Daerah	30
3.6. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan Iv 2025	32
3.7. Prakiraan Inflasi Triwulan Iii 2025	33

04

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

4.1. Intermediasi dan Pertumbuhan Aset Perbankan	37
4.2. Pembiayaan Daerah	37
4.3. Pembiayaan Sektor Korporasi	38
4.4. Pembiayaan Sektor Rumah Tangga	39
4.5. Pengembangan Akses Keuangan Umkm	40
Boks 2: Pemasaran UMKM Melalui <i>Onboarding</i> UMKM Digital	43

05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai	46
5.2. Pengelolaan Uang Rupiah	46
5.3. Perkembangan QRIS	49
5.4. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kalimantan Utara	49
5.5. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	50
Boks 3: Kaltara Digital QRIS (KATALIS) Bendindang Tahun 2025	51

06

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1. Ketenagakerjaan	56
6.2. Kesejahteraan	58
6.2.1. Kemiskinan	58
6.2.2. Nilai Tukar Petani	59
6.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	60
6.2.4. GINI Ratio	61

07

Prospek Perekonomian

7.1. Prospek Perekonomian Global	66
7.2. Prospek Perekonomian Indonesia	67
7.3. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltara	67
7.4. Prospek Inflasi Kalimantan Utara	69

Daftar Grafik

01

Grafik I. 1	Pangsa Ekonomi Kalimantan Triwulan III 2025	2
Grafik I. 2	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara dan Nasional	2
Grafik I. 3	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Triwulan III 2025	2
Grafik I. 4	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Lapangan Usaha Pertambangan	3
Grafik I. 5	Volume Ekspor Batu Bara Tiongkok dan India	4
Grafik I. 6	Volume Impor Batu Bara Tiongkok	4
Grafik I. 7	Harga Batubara Acuan	4
Grafik I. 8	Kredit Pertambangan Kaltara	4
Grafik I. 9	Produksi Batu Bara Nasional	5
Grafik I. 10	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara - Pertanian	5
Grafik I. 11	Volume Ekspor Udang	5
Grafik I. 12	Volume Ekspor Rumput Laut	5
Grafik I. 13	Volume Ekspor Ikan	5
Grafik I. 14	Harga TBS	6
Grafik I. 15	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Perdagangan	6
Grafik I. 16	IKK, IKE, dan IEK Kaltara	6
Grafik I. 17	Volume Penjualan Kendaraan Roda Dua	6
Grafik I. 18	Volume Penjualan Kendaraan Roda Empat	6
Grafik I. 19	Kredit Perdagangan Kaltara	6
Grafik I. 20	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konstruksi	7
Grafik I. 21	Penjualan Semen Kaltara	7
Grafik I. 22	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Industri Pengolahan	7
Grafik I. 23	Volume Ekspor Plywood	7
Grafik I. 24	Kredit Industri Kaltara	8
Grafik I. 25	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Rumah Tangga	8
Grafik I. 26	Indeks Survei Konsumen	9
Grafik I. 27	Kredit Konsumsi	9
Grafik I. 28	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – PMTB	9
Grafik I. 29	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	9
Grafik I. 30	Penanaman Modal Asing (PMA)	9
Grafik I. 31	Impor Barang Modal	10
Grafik I. 32	Kredit Investasi Kaltara	10
Grafik I. 33	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Pemerintah	10
Grafik I. 34	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Ekspor Luar Negeri	10
Grafik I. 35	Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltara	11
Grafik I. 36	Ekspor Batu bara	11
Grafik I. 37	Ekspor Plywood	11
Grafik I. 38	Ekspor Udang	11
Grafik I. 39	Ekspor Ikan	11

Grafik I. 40	Komoditas Utama Ekspor Triwulan III 2025	12
Grafik I. 41	Negara Utama Tujuan Ekspor Triwulan III 2025	12
Grafik I. 42	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Impor Luar Negeri	12
Grafik I. 43	Komoditas Utama Impor Triwulan III 2025	12
Grafik I. 44	Negara Utama Asal Impor Triwulan III 2025	12

02

Grafik II. 1	Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025	19
Grafik II. 2	Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025	21
Grafik II. 3	Realisasi Belanja K/L di Provinsi Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025 (Miliar Rupiah)	23
Grafik II. 4	Tingkat Serapan Realisasi Belanja APBN Provinsi Kaltara Triwulan III 2025	23

03

Grafik III. 1	Inflasi Gabungan Kota IHK di Kaltara & Nasional	26
Grafik III. 2	Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di Kalimantan Triwulan III 2025	26
Grafik III. 3	Perkembangan Inflasi Bulanan Kalimantan Utara	32
Grafik III. 4	Perkembangan Harga Bulanan Pangan Strategis Kalimantan Utara	33

04

Grafik IV. 1	Perkembangan Intermediasi Perbankan	30
Grafik IV. 2	Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	30
Grafik IV. 3	Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	30
Grafik IV. 4	Perkembangan Pertumbuhan Komponen DPK Perbankan Kaltara	30
Grafik IV. 5	Perkembangan Komponen DPK Perbankan Kaltara	31
Grafik IV. 6	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	31
Grafik IV. 7	Perkembangan NPL Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	31
Grafik IV. 8	Perkembangan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara	31
Grafik IV. 9	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara	31
Grafik IV. 10	Perkembangan Kredit Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha	32
Grafik IV. 11	Perkembangan Kredit Korporasi Kaltara	32
Grafik IV. 12	Pangsa Kredit Korporasi	32
Grafik IV. 13	LS Kap. Utilisasi, LS P. Domestik dan PDRB Ekspor LN (RHS)	32
Grafik IV. 14	LS Harga Jual dan Harga Batu bara	33
Grafik IV. 15	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara	33
Grafik IV. 16	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara Berdasarkan Jenisnya	33

Grafik IV. 17 Perkembangan Kredit Rumah Tangga dan NPL RT Kaltara	40
Grafik IV. 18 Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltara	40
Grafik IV. 19 Perkembangan Kredit UMKM Kaltara	40
Grafik IV. 20 Perkembangan Kredit UMKM Kaltara Berdasarkan Jenisnya	40
Grafik IV. 21 Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Kaltara	41
Grafik IV. 22 Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara	41
Grafik IV. 23 KUR Kaltara	41
Grafik IV. 24 Komposisi KUR Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara	41
Grafik IV. 25 Komposisi KUR Berdasarkan Kab/Kota di Kaltara	41

05

Grafik V. 1 Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kaltara	46
Grafik V. 2 Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kaltara	46
Grafik V. 3 Perkembangan Nominal BI-RTGS Kaltara	46
Grafik V. 4 Perkembangan Volume BI-RTGS Kaltara	46
Grafik V. 5 Perkembangan Aliran Uang Keluar/Masuk	47
Grafik V. 6 Denominasi Outflow Uang Kartal Kaltara Triwulan III 2025	47
Grafik V. 7 Denominasi Outflow Uang Logam Kaltara Triwulan III 2025	47
Grafik V. 8 Denominasi Inflow Uang Kartal Kaltara Triwulan III 2025	47
Grafik V. 9 Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)	48
Grafik V. 10 Kontribusi Merchant QRIS berdasarkan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara	49
Grafik V. 11 Kontribusi Merchant QRIS berdasarkan Kategori di Provinsi Kalimantan Utara	49
Grafik V. 12 Perkembangan APMK	50

06

Grafik VI. 1 Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja	56
Grafik VI. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kaltara	56
Grafik VI. 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kaltara periode 2022 – 2025	58
Grafik VI. 4 Perkembangan Penduduk Miskin Kaltara di Perkotaan dan Desa periode 2024 dan 2025	59
Grafik VI. 5 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Periode 2020-2024	59
Grafik VI. 6 NTNP, Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	60
Grafik VI. 7 NTNP, NTN, dan NTPI	60
Grafik VI. 8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltara tahun 2020–2024	60

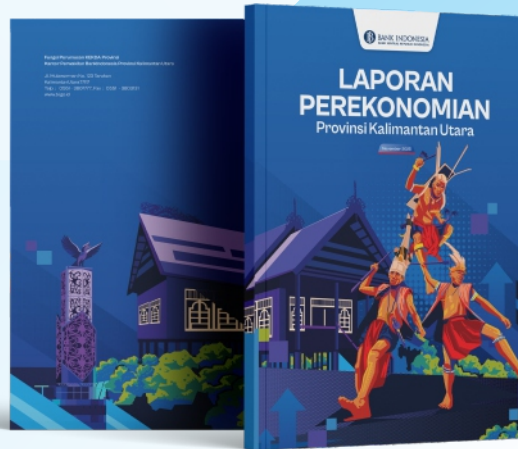
Daftar Tabel

Tabel I. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)	3
Tabel I. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Pengeluaran (yoy)	8
Tabel I. 3 Nilai Perdagangan Internasional Kaltara	10
Tabel II. 1 Pagu dan Realisasi APBD Pemprov Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025	18
Tabel II. 2 Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025	19
Tabel II. 3 Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025	20
Tabel II. 4 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025	21
Tabel II. 5 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025	21
Tabel II. 6 Realisasi Belanja K/L di Wilayah Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025	22
Tabel III. 1 Perbandingan Inflasi Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan III 2025 (mtm)	26
Tabel III. 2 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan III 2025 (mtm)	27
Tabel III. 3 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan III 2025 (mtm)	28
Tabel III. 4 Inflasi Umum/Total Tahunan Kaltara 2024-2025 (yoy)	28
Tabel III. 5 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Gabungan Triwulan III 2025 (yoy)	28
Tabel III. 6 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan III 2025 (yoy)	29
Tabel III. 7 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Triwulan III 2025 (yoy)	29
Tabel III. 8 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan III 2025 (yoy)	30
Tabel III. 9 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Transportasi Triwulan III 2025 (yoy)	30
Tabel III. 10 Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah selama Triwulan III 2025	31
Tabel IV. 1 Perkembangan DPK secara spasial	37
Tabel IV. 2 Perkembangan Kredit Secara Spasial	37
Tabel IV. 3 Klasifikasi Penyaluran Kredit Kaltara Berdasarkan Nilai	38
Tabel IV. 4 Akses Keuangan UMKM Binaan dan Mitra KPw BI Provinsi Kalimantan Utara	42
Tabel V. 1 Perkembangan NMR Provinsi Kaltara	49
Tabel V. 2 Perkembangan Indeks ETPD Provinsi Kalimantan Utara	50

Tabel VI. 1	Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Kaltara	56
Tabel VI. 2	Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kaltara	57
Tabel VI. 3	Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	58
Tabel VI. 4	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	58
Tabel VI. 5	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kaltara	59
Tabel VI. 6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2024	61
Tabel VI. 7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Kalimantan	61
Tabel VI. 8	GINI Ratio Penduduk di Kaltara Menurut Daerah, bulan September 2025 dan Maret 2025	61
Tabel VI. 9	Perbandingan GINI Ratio Se-Kalimantan	62
Tabel VII. 1	Perbandingan Ekonomi Negara Lain	66

Ringkasan Eksekutif

November 2025



Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kalimantan Utara triwulan III 2025 tumbuh positif lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh kinerja Lapangan Usaha sektor Perdagangan, Konstruksi dan Industri Pengolahan. Pertumbuhan ini tercermin dari kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) yang mengalami pertumbuhan. Kinerja LU Perdagangan utamanya didukung oleh peningkatan output produksi yang mendorong aktivitas perdagangan di Kaltara. Sejalan dengan itu, kinerja LU Konstruksi juga masih ditopang oleh aktivitas pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Kinerja Industri Pengolahan juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Kaltara didukung oleh meningkatnya hasil produksi pabrik pengolahan kertas di Tarakan. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan III 2025 juga tumbuh positif lebih tinggi yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, net ekspor, dan investasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekspor dari hasil olahan kayu maupun investasi pembelian barang modal di KIHI.

Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Triwulan III 2025, realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan kinerja, dengan kenaikan pendapatan sebesar 21,21% (yoy) dan belanja 3,92% (yoy). Peningkatan belanja ini terutama dipicu oleh meningkatnya belanja operasional. Adapun dari sisi pendapatan, peningkatan bersumber dari bertambahnya transfer Pemerintah Pusat yang didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara keseluruhan, kinerja fiskal mulai menunjukkan adanya kemandirian fiskal daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PAD. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi pajak dan retribusi melalui TP2DD harus terus ditingkatkan untuk menguatkan kemandirian fiskal daerah.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Prov. Kaltara pada triwulan III 2025 tercatat 2,32% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2025 sebesar 1,38% (yoy). Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dari pencapaian inflasi nasional sebesar 2,65% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama disebabkan kenaikan harga ikan bandeng, bawang merah, dan tomat seiring dengan pasokan yang menipis karena belum memasuki musim panen. Inflasi juga didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sejalan dengan kenaikan harga emas yang didorong tingginya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian perekonomian global. Namun, inflasi tertahan oleh Kelompok Transportasi didukung penurunan harga angkutan udara seiring akan masuknya maskapai baru.

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh intermediasi perbankan. Penyaluran kredit tumbuh di atas level regional Kalimantan dan Nasional. Penyaluran kredit dalam bentuk kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing tumbuh 9,95% (yoy) dan 32,81% (yoy). Meningkatnya investasi sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi nasional dan Kaltara serta akselerasi beberapa proyek strategis. Realisasi investasi pada periode triwulan III 2025 sebesar Rp7,69 Triliun atau sebesar 20,39% dari target investasi 2025 yang ditetapkan sebesar Rp37,7 Triliun. Meningkatnya kredit modal kerja terjadi seiring optimisme masyarakat terhadap perekonomian, terutama pada sektor bisnis.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai maupun nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mengalami perlambatan dari sisi volume dibandingkan triwulan sebelumnya. Aliran uang kartal mencatatkan net inflow sesuai dengan pola siklikalnya. Distribusi Uang Layak Edar (ULE) terus dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai implementasi Clean Money Policy (CMP) yang diiringi internalisasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat. Dari sisi digitalisasi, jumlah pengguna dan merchant QRIS terus meningkat sejalan dengan edukasi dan implementasi QRIS ke berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan data Indeks ETPD Semester I Tahun 2025, seluruh wilayah di Kalimantan Utara menunjukkan kinerja yang solid dalam transformasi digital pemerintahan daerah, dengan capaian seluruhnya berada pada tahap Digital.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada Triwulan III 2025 tetap menunjukkan arah perbaikan yang stabil. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kembali melanjutkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dengan capaian 3,85% pada Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan 3,90% pada Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan di pasar tenaga kerja, didukung oleh peningkatan jumlah penduduk bekerja dan membaiknya serapan tenaga kerja di berbagai lapangan usaha. Kualitas hidup masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 73,41, melanjutkan tren peningkatan lima tahun terakhir. Angka ini mencerminkan perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sementara itu, Gini Ratio Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,261 pada Maret 2025, sedikit meningkat dari 0,259 pada September 2024. Meski demikian, Kalimantan Utara tetap menempati peringkat ke-2 nasional sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara tetap menunjukkan performa yang solid, ditopang oleh penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta ketimpangan yang relatif rendah.

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Prov. Kaltara diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan realisasi 2024, yaitu dalam kisaran 4,5%-5,0% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi. LU Industri Pengolahan diperkirakan akan memiliki andil besar dalam PDRB 2025 sejalan dengan realisasi investasi dan operasi produksi pabrik pengolahan kertas di Kota Tarakan, peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit, dan target commissioning smelter aluminium pada Triwulan IV 2025. LU Perdagangan juga diperkirakan terus meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan akibat pasokan barang domestik dan impor yang meningkat untuk mendukung kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. Kaltara. LU Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh pada 2025 sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PLTA Sei Mentarang. Sementara itu, LU dengan pangsa terbesar di Prov. Kaltara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan akan tumbuh terbatas, didorong dengan melambatnya kebutuhan energi dari negara besar pengguna batu bara seperti Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara di tengah perang tarif dagang dan fokus pengembangan sumber energi terbarukan.

Inflasi Prov. Kaltara 2025 diperkirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$. Prov. Kaltara diperkirakan akan mengalami tekanan harga yang lebih tinggi pada 2025, sejalan dengan realisasi inflasi 2024 yang cukup rendah pada level 1,29% yoy, kenaikan harga komoditas global seperti emas, berkurangnya subsidi akibat efisiensi anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).



Tabel Indikator

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

%YOY	2024					2025		
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
PDRB Total	4,78	4,60	4,29	4,66	4,57	4,06	4,54	4,61
Berdasarkan Lapangan Usaha								
Pertanian	5,01	1,99	2,80	-2,27	1,75	0,70	3,42	5,00
Pertambangan	0,49	0,11	-0,33	0,88	0,28	-0,06	-0,78	-2,86
Industri Pengolahan	1,93	3,35	3,27	5,22	3,37	10,63	10,57	10,80
Listrik dan Gas	12,80	-5,32	3,97	-8,23	0,01	6,80	3,29	0,55
Air	4,44	5,89	6,20	7,17	7,36	6,33	2,44	0,35
Konstruksi	10,76	11,57	8,20	16,22	11,95	2,21	11,86	13,96
Perdagangan	10,17	10,67	9,50	8,94	9,80	9,08	10,35	9,23
Transportasi dan Pergudangan	6,16	6,44	7,12	2,54	5,51	7,34	4,50	6,57
Akomodasi dan Makan Minum	9,16	10,53	13,70	13,88	11,87	9,34	9,17	8,32
Informasi dan Komunikasi	6,92	4,89	4,69	4,08	5,12	1,18	4,12	4,95
Jasa Keuangan	9,05	6,82	6,23	3,72	6,41	4,19	0,03	-0,44
Real Estate	3,68	3,98	4,41	5,64	4,44	3,38	5,45	5,04
Jasa Perusahaan	1,41	3,49	3,38	4,14	3,12	1,30	-0,78	0,26
Adm. Pemerintahan	0,64	5,02	4,69	7,25	4,37	14,89	-5,52	-3,74
Jasa Pendidikan	3,59	3,42	7,42	7,31	5,46	7,69	-0,28	-1,38
Jasa Kesehatan dan Sosial	1,55	2,97	3,43	4,15	3,03	2,24	5,96	3,70
Jasa lainnya	6,96	7,06	6,86	5,60	6,81	2,87	5,65	5,22
Berdasarkan Pengeluaran								
Konsumsi Rumah Tangga	5,78	5,09	5,61	5,87	5,73	5,81	5,45	5,63
Konsumsi LNPRT	20,24	12,87	7,78	6,94	11,60	2,88	6,43	4,73
Konsumsi Pemerintah	4,63	4,46	9,53	9,70	8,89	9,77	-10,97	-0,12
PMTB	10,86	7,41	4,31	5,18	6,84	-0,19	5,88	6,65
Perubahan Inventori	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekspor	-0,72	2,35	3,10	3,68	2,07	3,56	3,30	3,87
Impor	-1,83	2,21	3,16	4,29	2,16	1,80	1,04	3,95

Sumber: BPS, diolah

B. Inflasi

Inflasi

Inflasi SBH 2018	2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
IHK Umum	4,61	5,17	6,64	4,74	4,17	2,91	2,16	2,44
Makanan, Minuman dan Tembakau	5,12	6,52	5,52	3,25	3,16	1,39	2,66	3,70
Pakaian dan Alas Kaki	0,22	0,56	0,59	0,64	0,70	0,37	0,14	-0,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,27	0,41	1,19	1,23	0,88	0,97	1,39	0,96
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	3,95	6,05	6,39	7,31	4,15	1,98	0,92	-0,17
Kesehatan	1,91	1,42	1,46	1,55	0,58	0,95	0,84	0,85
Transportasi	15,65	14,20	27,88	15,74	16,11	12,33	4,69	5,10
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,23	0,27	0,39	0,41	0,13	0,04	0,09	0,16
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,60	0,29	0,44	0,44	0,32	0,29	0,29	0,24
Pendidikan	0,44	0,44	0,63	0,63	0,63	0,63	0,36	0,36
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	3,19	3,76	3,75	2,57	2,23	1,71	1,06	1,07
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,46	6,44	7,20	8,19	6,16	4,91	3,88	4,50

Sumber: BPS, diolah

Inflasi SBH 2022	2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III
IHK Umum	2,62	2,39	1,74	1,29	1,24	1,38	2,32
Makanan, Minuman dan Tembakau	6,28	4,78	2,87	1,56	3,01	1,36	3,50
Pakaian dan Alas Kaki	3,08	2,84	2,86	4,54	0,80	0,16	-0,10
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,00	0,09	-0,33	-0,44	-3,38	0,63	2,73
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,20	-0,24	-0,30	-0,20	0,05	-0,11	-0,50
Kesehatan	0,49	0,59	0,63	0,77	1,55	1,41	8,31
Transportasi	0,92	1,90	0,79	0,05	-0,17	-0,60	-2,04
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,19	-0,23	-0,27	-0,15	-0,06	-0,20	-0,11
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,74	0,81	-0,29	-0,07	0,14	-0,83	1,11
Pendidikan	0,24	0,24	0,30	0,30	0,72	0,74	0,88
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,92	2,07	3,02	2,81	2,86	3,56	2,08
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,82	4,24	5,66	5,38	7,01	8,10	8,47

Sumber: BPS, diolah

*) Inflasi Kaltara dihitung menggunakan inflasi Kota Tarakan & Tanjung Selor hingga akhir 2023 (dengan SBH 2018), namun terhitung bulan Januari tahun 2024 telah ditambah Inflasi Kabupaten Nunukan (dengan SBH 2022).

B. Perbankan

Perbankan

%YOY	2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III
DPK dan Aset							
Dana Pihak Ketiga (KC/KCP)	7,70	5,18	8,89	2,28	-3,10	-6,22	-4,49
Giro	46,12	24,95	30,67	8,89	-5,07	-5,83	-6,17
Tabungan	7,03	6,80	5,32	4,33	6,18	4,37	3,79
Deposito	-17,84	-11,16	-0,80	-10,19	-19,66	-25,79	-22,49
Aset	14,63	8,89	9,00	7,47	-2,14	-3,71	-1,31
Kredit							
Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)	22,66	23,57	9,51	20,14	27,51	41,53	55,67
Non Performing Loans (Lokasi Proyek)	0,98	1,12	0,94	0,92	1,04	0,98	0,95
Berdasarkan Jenis Penggunaan							
Modal Kerja	39,47	37,64	15,70	17,52	17,79	17,79	32,81
Investasi	20,30	23,27	-0,18	28,98	55,07	104,58	131,75
Konsumsi	9,84	10,96	13,23	14,01	13,09	11,60	9,95
Berdasarkan Sektor Ekonomi							
Pertanian dan Kehutanan	-9,69	-9,21	-12,10	-12,11	-9,43	-12,84	-9,26
Perikanan	31,77	12,98	2,54	-7,60	-10,71	-12,76	-16,59
Pertambangan	0,76	58,36	-6,59	-4,76	96,59	248,69	484,69
Industri Pengolahan	404,72	473,25	100,21	155,66	199,24	209,27	153,85
Listrik, Gas dan Air	1.469,73	1.767,47	-2,62	204,42	204,03	502,75	829,44
Konstruksi	32,73	3,69	-39,55	-48,81	-54,96	-54,62	-35,54
Perdagangan Besar dan Eceran	13,33	10,04	-7,71	-10,28	-12,40	-8,83	6,96
Akomodasi dan Makan Minum	34,23	33,12	32,86	23,66	25,88	19,79	14,28
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	187,64	205,33	50,33	59,44	13,64	8,89	-4,44
Jasa Keuangan	-47,13	-63,98	-34,50	-0,10	55,96	114,57	139,08
Real Estate dan Jasa Perusahaan	31,52	26,91	9,46	-12,05	-17,98	-23,35	-1,56
Administrasi Pemerintahan	-48,86	-40,85	39,15	117,60	244,42	275,81	90,38
Jasa Pendidikan	66,67	62,26	86,24	46,07	14,71	1,89	-15,15
Jasa Kesehatan dan Sosial	-40,58	-22,21	-5,49	124,54	71,26	69,77	60,93
Jasa Kemasyarakatan	23,07	13,57	7,94	2,18	11,02	30,12	22,41
Jasa Perorangan	1,28	4,17	-5,62	-19,61	-3,05	-2,73	3,95
Badan Internasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Tangga	9,84	10,96	13,23	14,01	13,09	11,60	9,95







01

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



Perekonomian Kalimantan Utara triwulan III 2025 tumbuh positif lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh kinerja Lapangan Usaha sektor Perdagangan, Konstruksi dan Industri Pengolahan. Pertumbuhan ini tercermin dari kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) yang mengami pertumbuhan. Kinerja LU Perdagangan utamanya didukung oleh peningkatan output produksi yang mendorong aktivitas perdagangan di Kaltara. Sejalan dengan itu, kinerja LU Konstruksi juga masih ditopang oleh aktivitas pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Kinerja Industri Pengolahan juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Kaltara didukung oleh meningkatnya hasil produksi pabrik pengolahan kertas di Tarakan. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan III 2025 juga tumbuh positif lebih tinggi yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, net ekspor, dan investasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekspor dari hasil olahan kayu maupun investasi pembelian barang modal di KIHI.

1.1 GAMBARAN UMUM

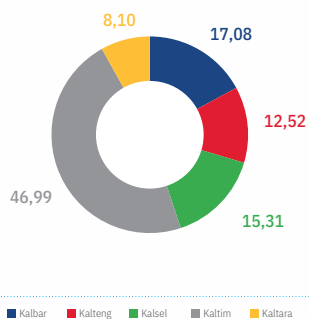
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan triwulan III 2025 tercatat tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Kalimantan tercatat sebesar 4,70% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,95%. Melambatnya kinerja ekonomi Kalimantan diakibatkan oleh terkontraksinya hasil produksi batu bara yang menjadi sumber utama pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan di Kalimantan.

Pangsa ekonomi Kalimantan Utara di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan II 2025. Pangsa Kalimantan Utara tercatat sebesar 8,16%, meningkat dibandingkan dengan Triwulan II 2025 dengan pangsa 8,10%. Meskipun demikian, Pangsa ekonomi Kalimantan Utara menjadi yang paling kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan. Selanjutnya, Pangsa perekonomian terbesar wilayah Kalimantan masing-masing terdiri dari Provinsi Kalimantan Timur (46,99%), diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat (17,08%), Provinsi Kalimantan Selatan (15,31%), dan Provinsi Kalimantan Tengah (12,52%). (Grafik I. 1)

PDRB Kalimantan Utara triwulan III 2025 tercatat tumbuh positif. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kalimantan Utara pada triwulan III 2025 tercatat Rp39,01 Triliun (ADHB) atau Rp19,26 Triliun (ADHK). Secara tahunan, PDRB tersebut tumbuh 4,61% (yoy), positif lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,54% (yoy). Kinerja ekonomi Kaltara masih tumbuh lebih tinggi yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang termoderasi sebesar 5,04% (yoy) (Grafik I. 2).

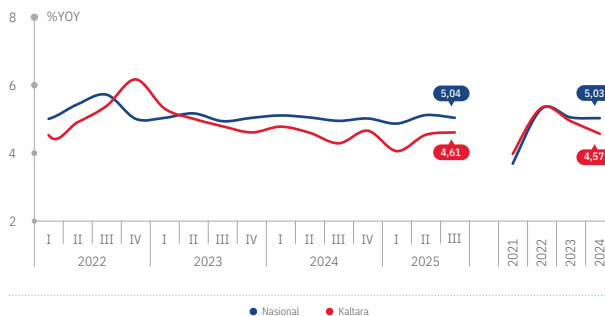
Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 Kalimantan Utara didorong sebagian besar komponen Lapangan Usaha. LU Perdagangan Besar, LU Konstruksi, LU Industri Pengolahan yang merupakan LU utama menunjukkan kinerja yang positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2025. Positif dan tingginya kinerja LU perdagangan didorong oleh meningkatnya

Grafik I. 1 Pangsa Ekonomi Kalimantan Triwulan III 2025



Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

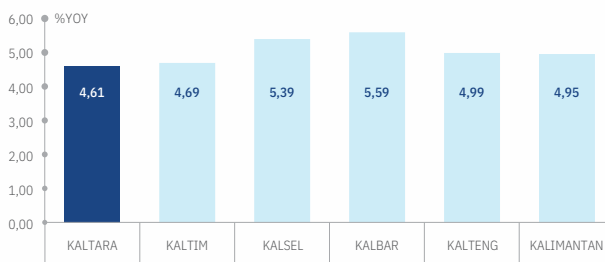
output produksi pertanian, industri pengolahan yang mendorong aktivitas belanja masyarakat. Tak hanya itu, mulai beroperasinya Pabrik Pengolahan kertas di Tarakan juga berdampak positif bagi PDRB Kaltara. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar -2,86 % (yoy), seiring dengan penurunan produksi batu bara akibat curah hujan yang mengganggu kegiatan operasional pertambangan.

Dari sisi pengeluaran, meningkatnya perekonomian Kalimantan Utara triwulan III 2025 diakibatkan oleh kinerja net ekspor yang tumbuh lebih tinggi di Kaltara. Kinerja net ekspor menjadi kontributor utama dalam perhitungan PDRB dengan andil yoy sebesar 4,22%. Ekspor yang meningkat didorong oleh meningkatnya nilai dan volume ekspor hasil industri pengolahan yakni kayu dan barang dari kayu. Namun demikian, Kinerja Belanja Pemerintah menjadi penahan pertumbuhan ekonomi Kaltara akibat menurunnya realisasi belanja modal maupun barang APBD.

1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

LU Perdagangan Besar, LU Konstruksi, serta LU Industri Pengolahan menunjukkan kinerja yang positif lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan menopang pertumbuhan pada

Grafik I. 3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Triwulan III 2025



Sumber: BPS, diolah

Tabel I. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)

Berdasarkan Lapangan Usaha	2024					2025		
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,01	1,99	2,80	-2,27	1,75	0,70	3,42	5,00
Pertambangan dan Penggalian	0,49	0,11	-0,33	0,88	0,28	-0,06	-0,78	-2,86
Industri Pengolahan	1,93	3,35	3,27	5,22	3,37	10,63	10,57	10,80
Pengadaan Listrik, Gas	12,80	-5,32	3,97	-8,23	0,01	6,80	3,29	0,55
Pengadaan Air	4,44	5,89	6,20	7,17	7,36	6,33	2,44	0,35
Konstruksi	10,76	11,57	8,20	16,22	11,95	2,21	11,86	13,96
Perdagangan Besar & Eceran	10,17	10,67	9,50	8,94	9,80	9,08	10,35	9,23
Transportasi dan Pergudangan	6,16	6,44	7,12	2,54	5,51	7,34	4,50	6,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,16	10,53	13,70	13,88	11,87	9,34	9,17	8,32
Informasi dan Komunikasi	6,92	4,89	4,69	4,08	5,12	1,18	4,12	4,95
Jasa Keuangan	9,05	6,82	6,23	3,72	6,41	4,19	0,03	-0,44
Real Estate	3,68	3,98	4,41	5,64	4,44	3,38	5,45	5,04
Jasa Perusahaan	1,41	3,49	3,38	4,14	3,12	1,30	-0,78	0,26
Administrasi Pemerintahan	0,64	5,02	4,69	7,25	4,37	14,89	-5,52	-3,74
Jasa Pendidikan	3,59	3,42	7,42	7,31	5,46	7,69	-0,28	-1,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,55	2,97	3,43	4,15	3,03	2,24	5,96	3,70
Jasa lainnya	6,96	7,06	6,86	5,60	6,81	2,87	5,65	5,22
Produk Domestik Regional Bruto	4,78	4,60	4,29	4,66	4,57	4,06	4,54	4,61

Sumber: BPS, diolah

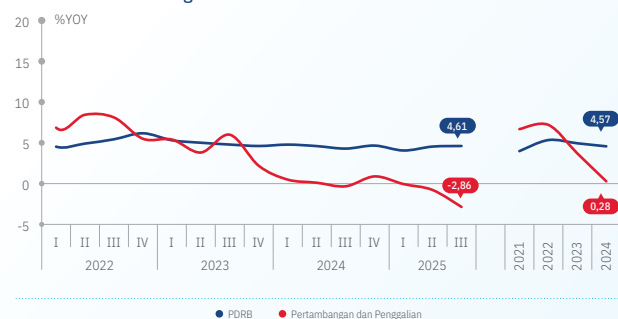
triwulan III 2025. LU Perdagangan tumbuh positif didorong oleh aktivitas belanja masyarakat yang masih terjaga disertai dengan peningkatan *output* produksi dari lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan. LU Konstruksi mengalami peningkatan seiring dengan percepatan dan finalisasi pembangunan PT KAI di KIIHI. Sejalan dengan itu, aktivitas LU Industri Pengolahan juga ditopang oleh peningkatan produksi olahan kayu menjadi bubur kertas dan CPO yang ada di Kaltara.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan. Kinerja LU Pertambangan terkontraksi sebesar -2,86% (yoy), disebabkan hasil produksi batu bara yang menurun dan dibawah dari target yang ditetapkan sejalan keterbatasan aktivitas pertambangan akibat masih tingginya curah hujan. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi efisiensi pemerintah juga memberikan dampak bagi proses pembangunan daerah sehingga masih terdapat penundaan belanja barang dan modal dari Pemda. Meski demikian, struktur perekonomian Kaltara masih didominasi oleh sektor pertambangan dengan pangsa mencapai 23,65%, diikuti LU Pertanian (17,32%), dan LU Konstruksi (13,85%), dan LU Perdagangan Besar dan Eceran (13,32%). Secara akumulatif, keempat LU tersebut memiliki pangsa sebesar 68,14% terhadap perekonomian Kaltara.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

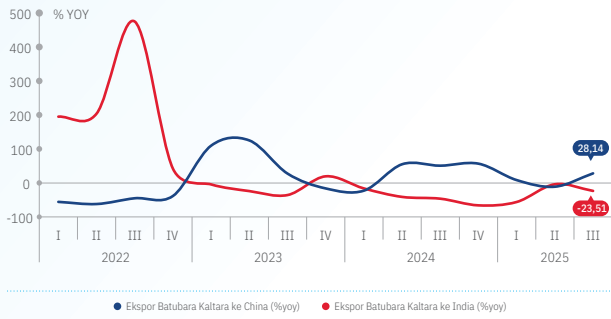
Kinerja LU Pertambangan pada triwulan laporan terkontraksi sebesar -2,86% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat -0,78% (yoy) dengan andil tahunan sebesar -0,28% terhadap PDRB Kaltara. Meskipun terkontraksi, LU Pertambangan dan Penggalian masih menjadi penyumbang terbesar struktur ekonomi Kaltara dengan pangsa 23,65% (Grafik I. 4).

Kondisi perlambatan ini tercermin dari aktivitas produksi yang menurun, didorong oleh kondisi curah hujan yang tinggi. Gambar I.1 menunjukkan bahwa Kaltara berada pada kondisi curah hujan menengah-tinggi pada triwulan III 2025. Di sisi lain, kondisi

Grafik I. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Lapangan Usaha Pertambangan

Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 5 Volume Ekspor Batu Bara Tiongkok dan India



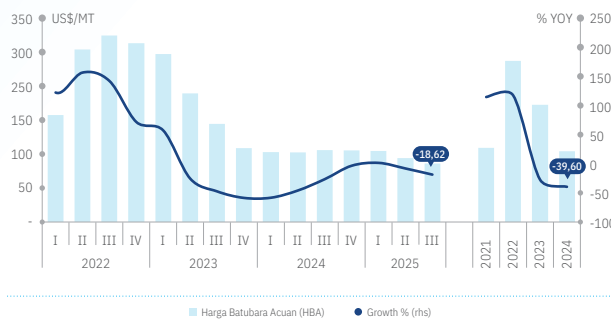
Sumber: Kubus, diolah

Grafik I. 6 Volume Impor Batu Bara Tiongkok



Sumber: McCloskey, diolah

Grafik I. 7 Harga Batubara Acuan



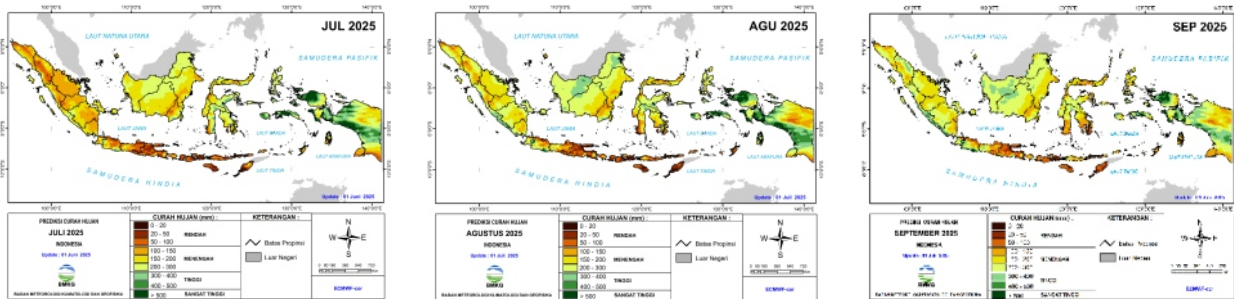
Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik I. 8 Kredit Pertambangan Kaltara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar I.1 Prediksi Curah Hujan per Provinsi



Sumber: BMKG

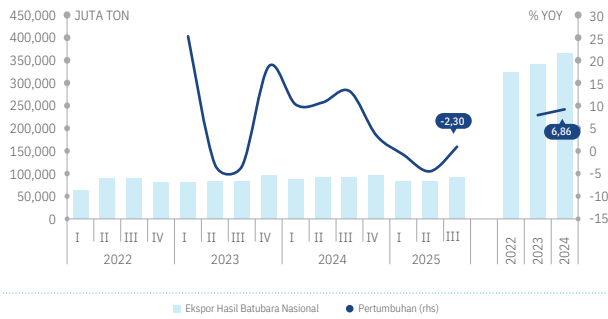
hujan yang terjadi secara tidak terduga di wilayah Kaltara selama triwulan III 2025 menghambat proses penambangan dan pengangkutan batu bara. Selain itu, permintaan global khususnya dari negara mitra utama seperti Tiongkok pada triwulan III 2025 mengalami penurunan sebesar -14,00% (yoy) (Grafik I. 5). Berdasarkan data dari McCloskey, total impor batu bara Tiongkok dari Indonesia pada triwulan III 2025 menurun menjadi 52,26 juta ton dari sebelumnya 60,77 juta ton (Grafik I. 6).

Dari sisi Harga Batu bara Acuan (HBA), pada triwulan III 2025 masih berada pada nilai yang rendah sebesar USD100,6/MT (Grafik I. 77) atau turun sebesar -18,62% (yoy). Selain itu, beberapa pelaku usaha juga menghadapi tantangan transisi ke

ekonomi hijau serta peningkatan hasil produksi batu bara secara mandiri dari negara mitra yang mengakibatkan permintaan batu bara Kaltara menurun. Berdasarkan data Kementerian ESDM, ekspor batu bara Nasional pada triwulan III 2025 tercatat menurun sebesar -2,30% (yoy) (Grafik I.9). Meskipun demikian, permintaan domestik masih terjaga terutama digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, industri semen serta *smelter* nikel di Sulawesi.

Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit ke LU Pertambangan mengalami pertumbuhan 485,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 248,69% (yoy). Meskipun kinerja LU Pertambangan melambat pada triwulan III

Grafik I. 9 Produksi Batu Bara Nasional



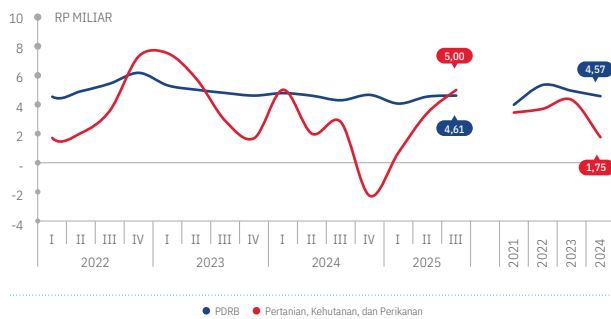
Sumber: BPS, diolah

2025, namun diperkirakan mengalami perbaikan pada triwulan IV 2025. Hal ini terindikasi dari tumbuhnya kredit korporasi pertambangan yang meningkat cukup signifikan (Grafik I. 8). Pembiayaan pada sektor pertambangan terjadi seiring dengan pengadaan barang/investasi baru dan *maintenance* operasional dalam bisnis pertambangan.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

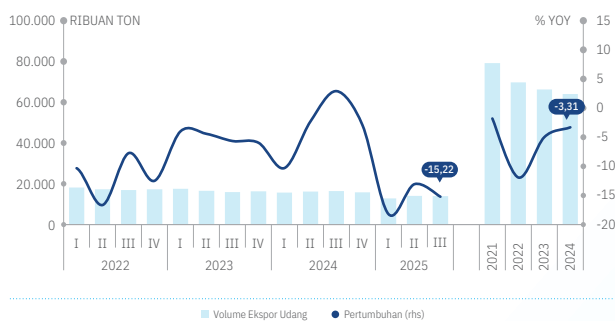
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 5,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2025 sebesar 3,68% (yoy) (Grafik I. 10). LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki pangsa mencapai 17,32% dari total PDRB Kaltara. Sektor Pertanian juga memberikan andil pertumbuhan tahunan terhadap perekonomian Kaltara triwulan III 2025 sebesar 0,86.

Grafik I. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara - Pertanian



Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 11 Volume Ekspor Udang



Sumber: Dinas Bea Cukai, diolah

Meningkatnya kinerja LU Pertanian sejalan dengan peningkatan produksi padi serta produksi tandan buah segar (TBS) dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, produksi padi tercatat mencapai 7,39 ribu ton atau tumbuh sebesar 72,01% (yoy) yang didorong oleh program Optimalisasi Lahan (OPLAH) pemerintah seluas 2.119 ha. Pada triwulan III 2025, harga TBS terpantau meningkat menjadi Rp3.003 per kg, atau naik sebesar 19,87% (yoy) (Grafik I. 14). Produk TBS secara umum digunakan memenuhi pasar domestik dan diolah menjadi CPO untuk diekspor ke wilayah lain baik dalam bentuk *oleochemical* maupun turunannya.

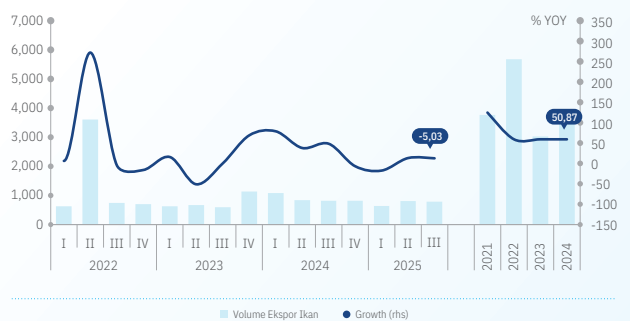
Sementara itu, kinerja LU Pertanian tertahan oleh kontraksi di subsektor perikanan (ikan, udang dan rumput laut). Pada triwulan laporan, komoditas perikanan tercatat terkontraksi akibat menurunnya permintaan ekspor sejalan dengan penerapan tarif impor dan tarif anti *dumping* dari Amerika Serikat. Volume ekspor udang terkontraksi sebesar -15,22% (yoy), termoderasi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -13,07% (yoy) (Grafik I. 11). Sejalan dengan itu, komoditas perikanan lain (rumpun laut dan ikan) juga mengalami penurunan ekspor. Pada triwulan III 2025, ekspor rumput laut tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,77% (yoy), disebabkan oleh harga rumput laut yang masih pada level yang rendah (Grafik I. 12). Volume ekspor ikan juga mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -5,03% (yoy) (Grafik I. 13) yang diakibatkan oleh menurunnya produksi ikan-ikanan utamanya ikan budidaya (antara lain ikan bandeng dan ikan mujair).

Grafik I. 12 Volume Ekspor Rumput Laut



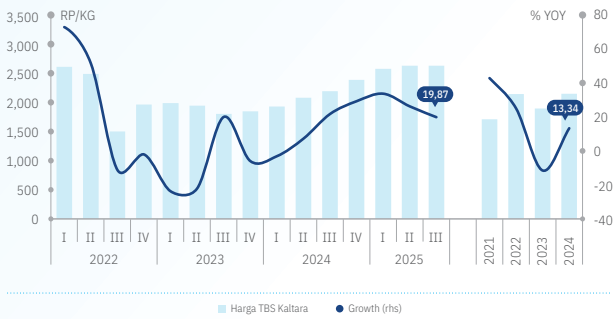
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I. 13 Volume Ekspor Ikan



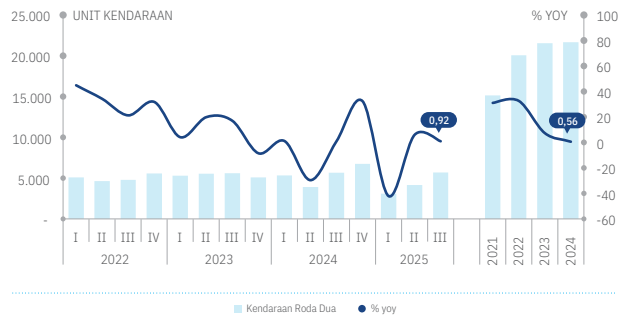
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I. 14 Harga TBS



Sumber: Dinas Perkebunan, diolah

Grafik I. 17 Volume Penjualan Kendaraan Roda Dua



Sumber: BPPRD, diolah

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran

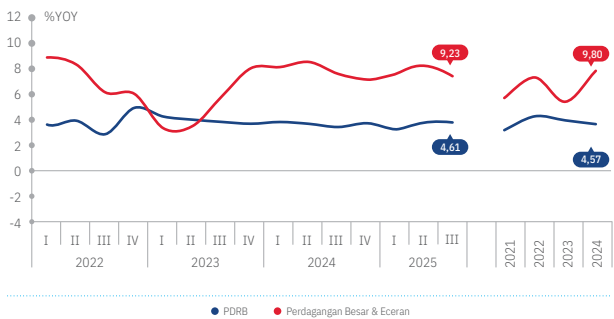
LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) tumbuh positif mencapai 9,23% (yoy), termoderasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,35% (yoy) (Grafik I. 15). LU PBE memberikan kontribusi sebesar 13,32% terhadap struktur perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan tahunan mencapai 1,18%.

LU Perdagangan tetap tumbuh positif pada triwulan laporan didorong meningkatnya hasil output produksi pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mendorong meningkatnya aktivitas belanja masyarakat. Tetap tumbuh positifnya kinerja LU Perdagangan salah satunya tercermin dari

indeks keyakinan konsumen (IKK) yang tetap optimis pada level 118,10 (Grafik I. 16). Tertahannya pertumbuhan LU PBE yang lebih tinggi diakibatkan oleh melambatnya volume penjualan kendaraan roda dua yang tumbuh sebesar 0,92% (yoy) sedangkan penjualan kendaraan roda empat masih mengalami kontraksi sebesar -42,57% (yoy) (Grafik I.17 dan Grafik I.18).

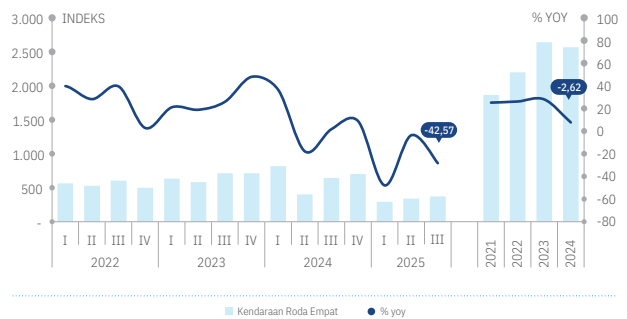
Meskipun demikian, penyaluran kredit ke LU Perdagangan mengalami peningkatan sebesar 6,96% (yoy) atau sebesar Rp3,23 Triliun, dibandingkan triwulan I 2025 sebesar Rp3,27 Triliun (Grafik I. 19). Peningkatan kredit ini diprakirakan didorong oleh peningkatan kapasitas usaha dalam menyiapkan permintaan komoditas dan jasa di akhir tahun.

Grafik I. 15 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Perdagangan



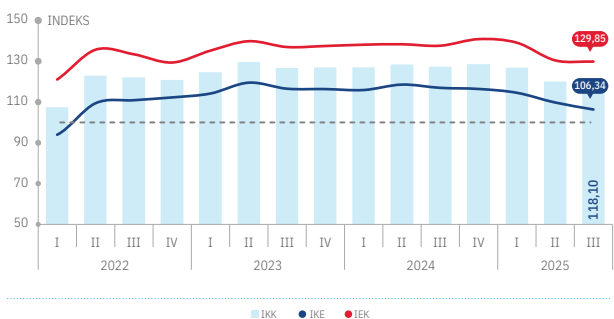
Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 18 Volume Penjualan Kendaraan Roda Empat



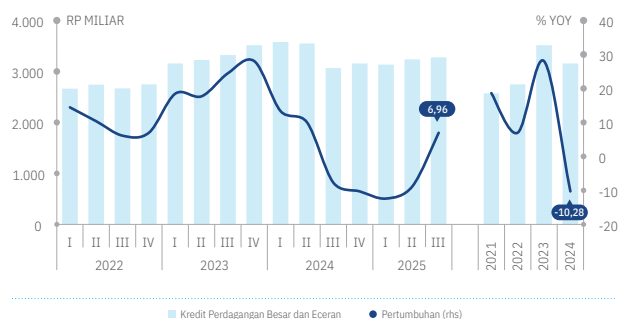
Sumber: BPPRD

Grafik I. 16 IKK, IKE, dan IEK Kaltara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I. 19 Kredit Perdagangan Kaltara



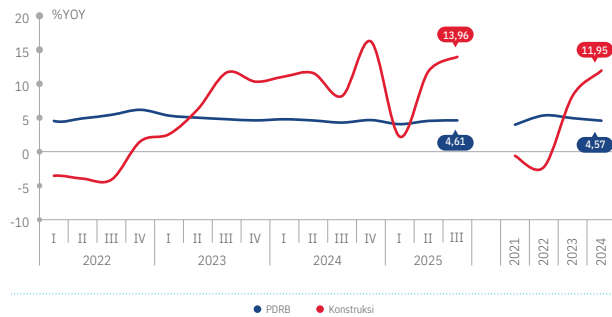
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi tumbuh sebesar 13,96% (yoy) (Grafik I. 20). Kinerja LU Konstruksi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,86% (yoy). LU Konstruksi menguasai 13,85% pangsa perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan terhadap PDRB sebesar 1,77%.

Peningkatan kinerja LU Konstruksi didorong oleh aktivitas pembangunan di KIH Mangkupadi yang memasuki tahap finalisasi. Pembangunan infrastruktur kawasan industri seperti jetty kapal untuk bongkar muat pembangunan, *Water Treatment Plant (WTP)* serta fondasi dari *smelter* aluminium diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2025 sehingga ditargetkan operasional *smelter* aluminium tahap I akan dimulai pada awal tahun 2026. Pertumbuhan sektor konstruksi yang positif juga diperkirakan akan memberikan efek *multiplier* terhadap beberapa sektor seperti perdagangan dan real estate. Terdapat beberapa proyek infrastruktur bernilai besar di Kaltara yang masih berlanjut serta menopang sustainabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Proyek tersebut diantaranya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dan Sei Mentarang dengan potensi kapasitas energi mencapai 1.375 MW akan menjadi pemasok listrik di daerah KIH serta menjadi salah satu kebutuhan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun demikian, penjualan semen masih berkontraksi sebesar -5,67% (yoy) (Grafik I. 21).

Grafik I. 20 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konstruksi



Sumber: BPS, diolah

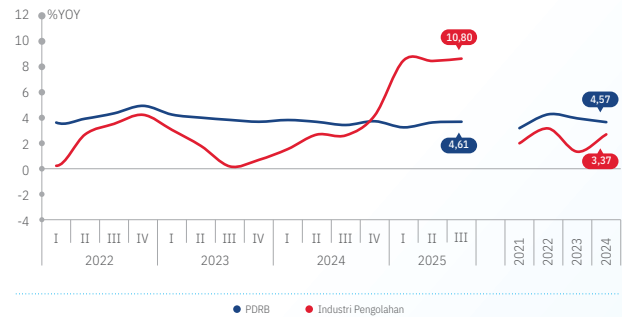
Perkembangan Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan tumbuh positif sebesar 10,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 10,57% (yoy) (Grafik I. 22). LU Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 8,68% dalam struktur perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan tahunan sebesar 0,88%.

Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan terutama didorong oleh peningkatan produksi hasil olahan kayu dan meningkatnya permintaan CPO. Produksi bubur kertas terus mengalami peningkatan sejalan dengan penyelesaian target produksi pabrik kertas di Tarakan. Sejalan dengan itu, Produksi CPO Kaltara pada triwulan III 2025 mencapai 133.462 ton atau 1,12%(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 126.309 ton. Peningkatan produksi tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan produk CPO di wilayah Kaltara. Aktivitas operasional pabrik ini tidak hanya mendukung proses pengolahan bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru di Kaltara. Tak hanya itu, kinerja industri pengolahan juga didorong oleh permintaan ekspor *plywood* yang tumbuh sebesar 34,24% (yoy) pada triwulan III 2025 sejalan dengan meningkatnya permintaan ekspor.

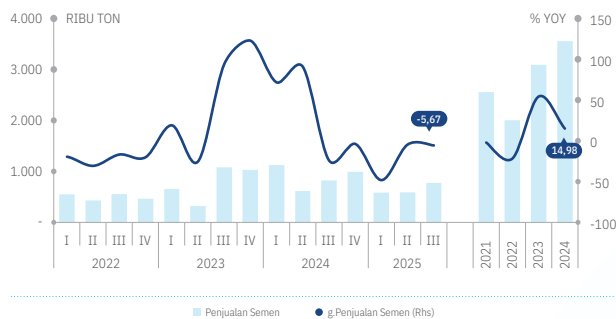
Akselerasi pertumbuhan LU Industri pengolahan terkonfirmasi dari kredit dan hasil liaison Bank Indonesia. Penyaluran kredit ke

Grafik I. 22 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Industri Pengolahan



Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 21 Penjualan Semen Kaltara



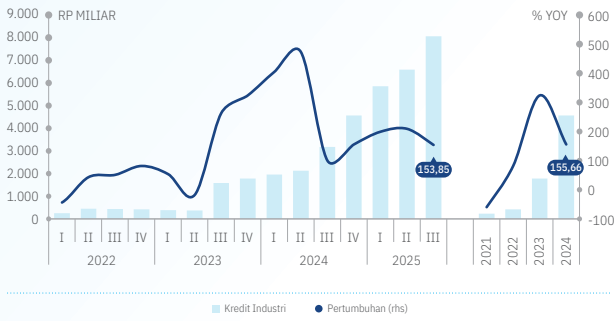
Sumber: Asosiasi Semen, diolah

Grafik I. 23 Volume Ekspor Plywood



Sumber: Worldbank, diolah

Grafik I. 24 Kredit Industri Kaltara



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

LU Industri Pengolahan mencapai Rp 8,05 Triliun atau tumbuh sebesar 153,85% (yoy) (yoy) (Grafik I. 24). Tetap tumbuh positifnya penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan didorong oleh kegiatan operasional industri pengolahan yang meningkatkan produksi dan adanya beberapa pengusaha CPO melakukan ekspansi lahan. Sejalan dengan itu, sejumlah kontak liaison menyatakan bahwa permintaan sepanjang tahun 2025 diprakirakan tetap positif seiring dengan optimisme permintaan masyarakat yang meningkat.

1.3 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN PENGELUARAN

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan Utara triwulan III 2025 tumbuh positif lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya, ditopang oleh pertumbuhan Investasi dan Net Ekspor. Kinerja investasi menjadi kontributor utama dalam perhitungan PDRB dengan andil sebesar 2,00%. Kinerja investasi yang positif didorong oleh meningkatnya realisasi investasi utamanya pada bangunan seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan Kawasan KIH di Tanah Kuning. Kinerja Net Ekspor juga tumbuh positif sejalan dengan peningkatan hasil pabrik pengolahan kertas di Tarakan. Namun demikian, penahan tingginya kinerja PDRB Kaltara disebabkan oleh kinerja Belanja Pemerintah yang mengalami kontraksi pada triwulan laporan (Tabel I.2)

Tabel I. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Pengeluaran (yoy)

Berdasarkan Pengeluaran	2024					2025		
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%
Konsumsi RT	5,78	5,09	5,61	5,87	5,73	5,81	5,45	5,63
Konsumsi LNPRT	20,24	12,87	7,78	6,94	11,60	2,88	6,43	4,73
Konsumsi Pemerintah	4,63	4,46	9,53	9,70	8,89	9,77	-10,97	-0,12
PMTB	10,86	7,41	4,31	5,18	6,84	-0,19	5,88	6,65
Perubahan Inventori	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekspor LN	-0,72	2,35	3,10	3,68	2,07	3,56	3,30	3,87
Impor LN	-1,83	2,21	3,16	4,29	2,16	1,80	1,04	3,95
Produk Domestik Regional Bruto	4,78	4,60	4,29	4,66	4,57	4,06	4,54	4,61

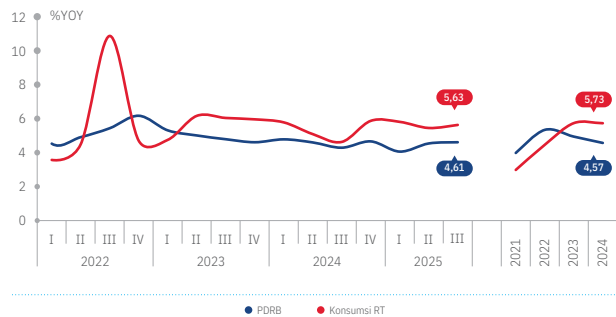
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan pangasanya, net ekspor dan PMTB masih mendominasi perekonomian Kaltara, dengan total sebesar 75,72%. Net ekspor menjadi penyumbang tertinggi pangsa PDRB triwulan III 2025 mencapai 45,12%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 44,84%. Sementara itu, pangsa PMTB terhadap perekonomian Kaltara terpantau stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi 30,60% dari 30,76%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan konsumsi LNPRT masing-masing memiliki pangsa sebesar 16,21%, 7,00%, dan 0,77%.

Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga

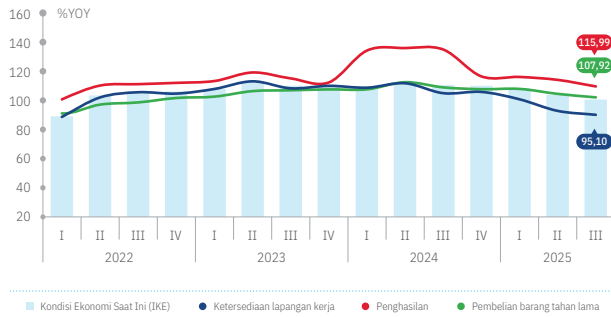
Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan III 2025 tumbuh positif lebih tinggi. Konsumsi RT Kalimantan Utara tumbuh sebesar 5,63% (yoy), meningkat dari triwulan II 2025 sebesar 5,45% (Grafik I. 25). Adapun andil konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara sebesar 0,90%. Pertumbuhan konsumsi RT yang masih positif didorong oleh terjaganya konsumsi masyarakat. Kinerja konsumsi RT ini juga sejalan dengan perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada triwulan III 2025 yang mencapai pada level 106,34 (Grafik I. 26) atau masih berada di level optimis. Kinerja konsumsi RT yang tetap tumbuh juga ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 9,95% (yoy), meskipun sedikit termoderasi dari triwulan II 2025 sebesar 11,60% (yoy) (Grafik I. 27). Masih tumbuhnya kredit konsumsi sejalan dengan masih optimisnya indikator keyakinan konsumen khususnya terhadap ekspektasi penghasilan masyarakat kedepan.

Grafik I. 25 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Rumah Tangga



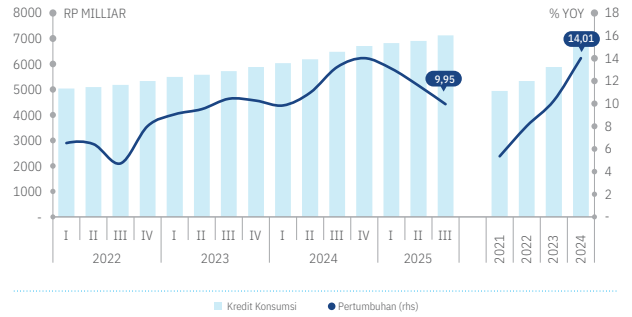
Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 26 Indeks Survei Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I. 27 Kredit Konsumsi



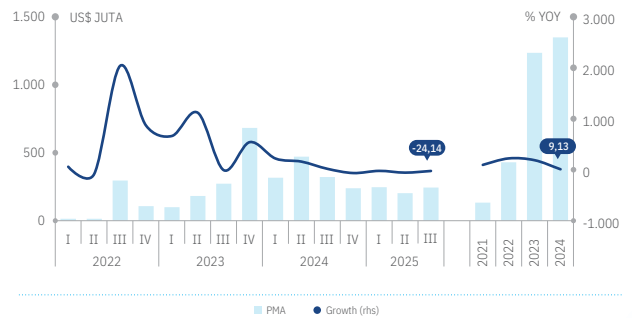
Sumber: BPS, diolah

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi

Kinerja PMTB pada triwulan III 2025 meningkat sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis di Kaltara. Kinerja investasi tumbuh sebesar 6,65% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,88% (yoy) (Grafik I. 28). Kinerja PMTB tersebut memberikan andil sebesar 2,00% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan III 2025.

Realisasi investasi Provinsi Kalimantan Utara triwulan III 2025 terkontraksi secara nominal pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sedangkan meningkat pada Penanaman Modal Asing (PMA) dibandingkan dengan triwulan II 2025. Berdasarkan data BKPM, nilai realisasi PMDN sebesar Rp3,79 Triliun, tumbuh lebih tinggi sebesar 19,73% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi (Grafik I. 29). Berbanding terbalik dengan PMDN, nilai realisasi PMA sebesar USD243,60 juta, atau terkontraksi sebesar -24,14% (yoy) (Grafik I. 30). Pertumbuhan impor barang modal yang merupakan bagian dari investasi pada triwulan III 2025 juga masih terkontraksi sebesar -26,66% (yoy). Realisasi investasi tersebut masih senilai 55,43% dari total target investasi Kaltara sebesar Rp37 Triliun, yang lebih tinggi dari target pada 2024 sebesar Rp35,33 Triliun.

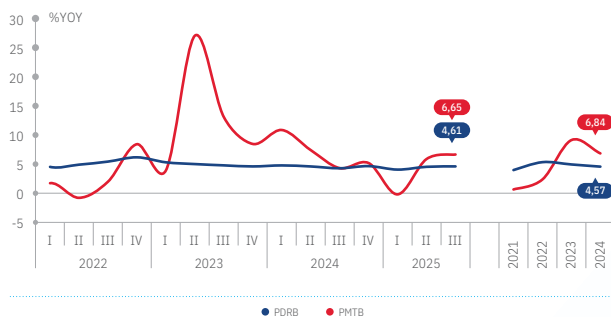
Grafik I. 30 Penanaman Modal Asing (PMA)



Sumber: BKPM, diolah

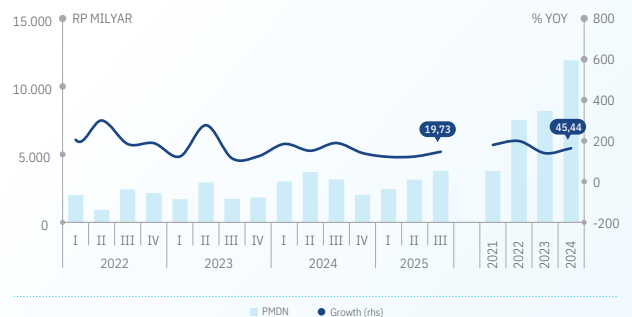
Kredit Investasi merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan masuknya kegiatan investasi baru di Kalimantan Utara. Peningkatan penyaluran Kredit Investasi umumnya menunjukkan adanya ekspansi usaha, pembangunan fasilitas produksi, maupun penambahan kapasitas industri di daerah. Aktivitas tersebut secara langsung mendorong penyerapan tenaga kerja, menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa lokal, serta meningkatkan output sektor-sektor unggulan, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara. Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit investasi triwulan III

Grafik I. 28 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – PMTB



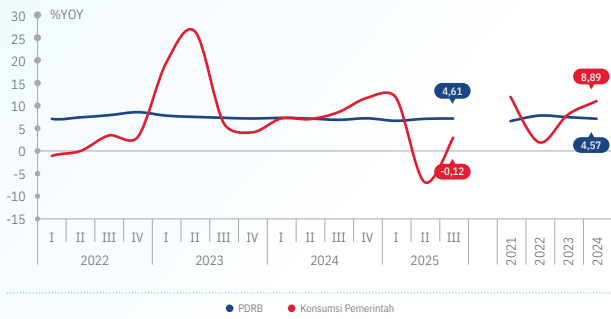
Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 29 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



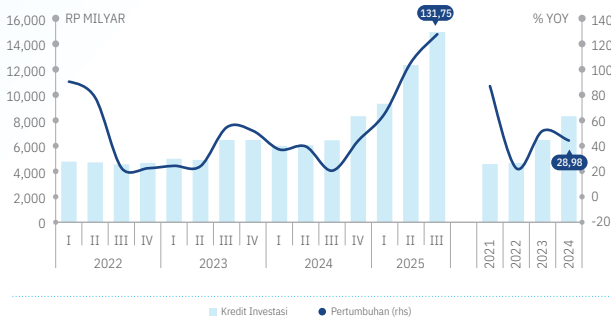
Sumber: BKPM, diolah

Grafik I. 33 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Pemerintah



Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 32 Kredit Investasi Kaltara



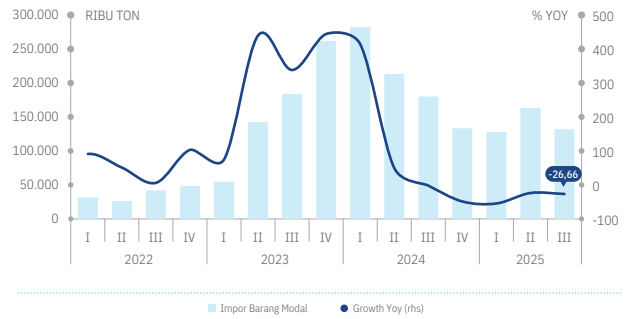
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

2025 tetap tumbuh positif dan terjaga. Realisasi kredit investasi triwulan laporan tercatat sebesar Rp13,77 Triliun atau tumbuh sebesar 131,75% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I. 32). Kondisi tersebut sejalan dengan informasi sejumlah kontak liaison KPwBI Kaltara yang optimis terhadap berlanjutnya pertumbuhan ekonomi ke depan dengan mendorong peningkatan investasi melalui pembiayaan perbankan secara gradual sepanjang tahun 2025.

Perkembangan Konsumsi Pemerintah

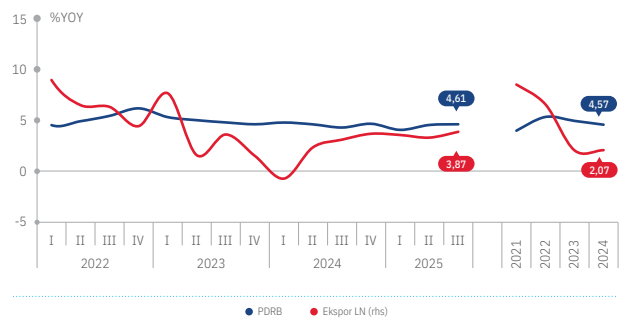
Konsumsi pemerintah triwulan III 2025 terkontraksi namun mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi Pemerintah di Kalimantan Utara terkontraksi sebesar -0,12% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 10,97% (Grafik I. 33). Realisasi konsumsi pemerintah tersebut memberikan

Grafik I. 31 Impor Barang Modal



Sumber: Kubus Eksim, diolah

Grafik I. 34 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Ekspor Luar Negeri



Sumber: BPS, diolah

andil sebesar -0,01% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara triwulan III 2025. Terkontraksinya pertumbuhan konsumsi pemerintah Kalimantan Utara didorong oleh masih tertahannya belanja beberapa pemerintah daerah akibat kebijakan realokasi anggaran.

Perkembangan Ekspor

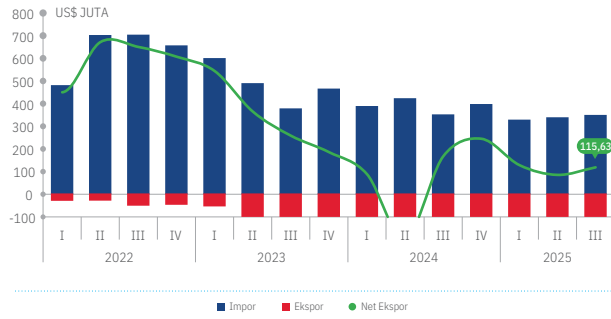
Kinerja ekspor triwulan III 2025 cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor Kalimantan Utara pada triwulan laporan tumbuh sebesar 4,61% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 3,49% (yoy) (Grafik I. 34). Realisasi ekspor tersebut memberikan andil sebesar 3,91% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan III 2025. Meningkatnya kinerja ekspor tersebut disebabkan oleh tetap tingginya ekspor komoditas kayu olahan utamanya plywood dan bubur kertas.

Tabel I. 3 Nilai Perdagangan Internasional Kaltara

Wilayah	2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III
Kaltara (US\$ Juta)							
Ekspor	389,19	424,05	352,61	398,23	329,20	339,38	350,28
Impor	303,68	626,57	188,31	155,63	203,47	257,11	234,65
Net Ekspor	85,51	-202,52	164,30	242,59	125,72	82,27	115,63

Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 35 Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltara



Sumber: BPS, diolah

Secara nilai, kinerja ekspor juga tercatat meningkat. Total ekspor tercatat sebesar USD350,28 juta, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar USD339,38 juta (Tabel I.3). Sejalan dengan itu, nominal impor tercatat mengalami perlambatan dari sebelumnya USD257,11 juta menjadi USD234,65 juta.

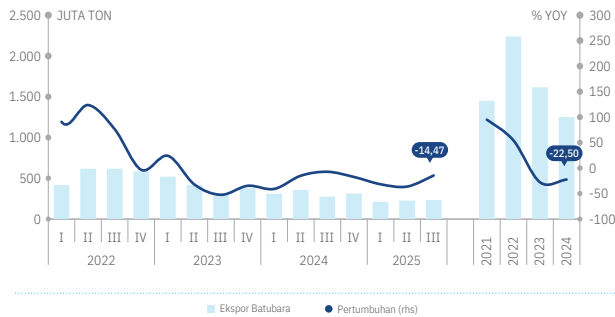
Kinerja ekspor Kalimantan Utara pada triwulan III 2025 meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja ini terutama ditopang oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, dengan ekspor bubur kayu dari pabrik pengolahan di Tarakan ke Tiongkok yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, penahan tingginya kinerja

ekspor terjadi akibat penurunan ekspor batu bara nasional yang tercatat sebesar -14,47% (yoy), yang mencerminkan turunnya volume produksi secara nasional (Grafik I. 36).

Selain itu, penahan lebih tingginya kinerja ekspor triwulan III 2025 dipengaruhi oleh terkontraksinya kinerja ekspor komoditas udang dan ikan. Ekspor udang terkontraksi sebesar -5,17% (yoy) dari triwulan sebelumnya -17,32% (yoy) (Grafik I. 38). Berbanding terbalik, ekspor ikan tumbuh sebesar 3,85% (yoy) namun masih termoderasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik I. 39). Menurunnya ekspor udang didorong oleh adanya kebijakan tarif dari AS dan tarif antidumping.

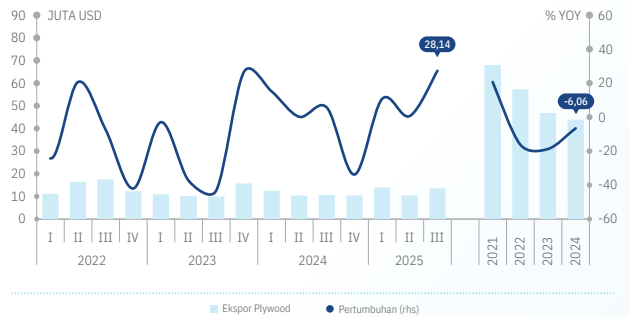
Ekspor Provinsi Kalimantan Utara didominasi komoditas mineral nonmigas dengan tujuan negara ekspor utama adalah Tiongkok, India, dan Jepang. Berdasarkan kelompoknya, ekspor Kaltara pada triwulan III 2025 masih didominasi oleh komoditas mineral nonmigas, terutama batu bara yang memiliki pangsa sebesar 66,69% dari total nominal ekspor. Sementara itu, ekspor rokok, kayu lapis, dan udang (plywood) memiliki pangsa masing-masing sebesar 8,44%, 4,98%, dan 4,35% (Grafik I. 40). Berdasarkan negara tujuan ekspor, Tiongkok, Jepang, dan India merupakan negara tujuan utama ekspor utama Kaltara, masing-masing dengan pangsa 60,89%, 8,66%, dan 6,03% (Grafik I. 41).

Grafik I. 36 Ekspor Batu bara



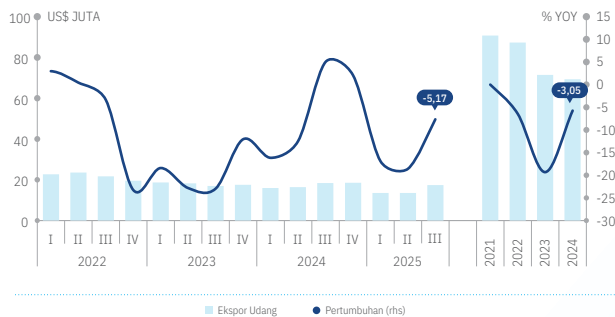
Sumber: Kubus Eksim1, diolah

Grafik I. 37 Ekspor Plywood



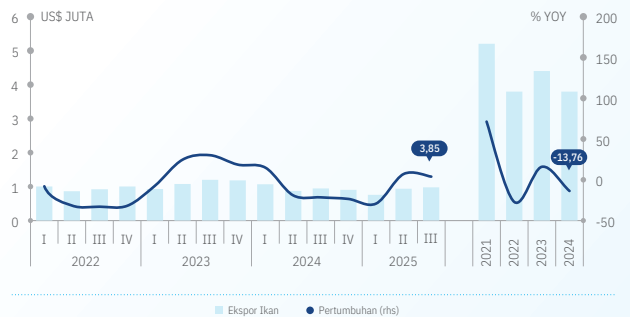
Sumber: Kubus Eksim, diolah

Grafik I. 38 Ekspor Udang



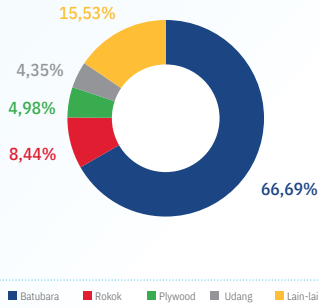
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I. 39 Ekspor Ikan



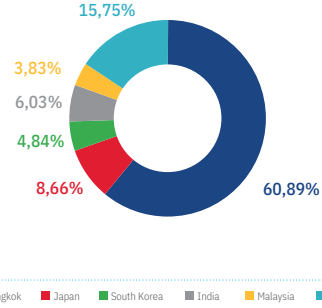
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I. 40 Komoditas Utama Ekspor Triwulan III 2025



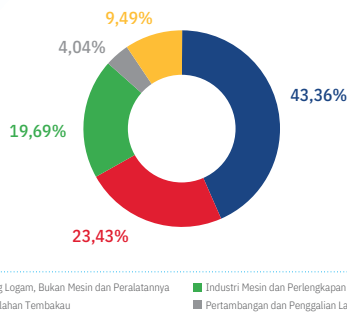
Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 41 Negara Utama Tujuan Ekspor Triwulan III 2025



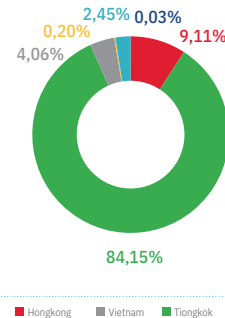
Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 43 Komoditas Utama Impor Triwulan III 2025



Sumber: BPS, diolah

Grafik I. 44 Negara Utama Asal Impor Triwulan III 2025



Sumber: BPS, diolah

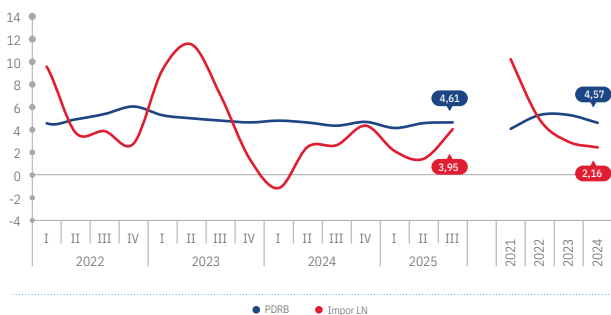
Perkembangan Impor

Impor Kaltara triwulan III 2025 tercatat tumbuh positif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja impor tumbuh sebesar 3,95% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,04% (yoy).

Berdasarkan komoditas, impor Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan III 2025 didominasi oleh industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 43,36%, diikuti industri pengolahan tembakau sebesar 23,43%, dan industri mesin dan perlengkapan yang termasuk dalam lainnya sebesar 19,69% (Grafik 1. 43). Peningkatan impor diperkirakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konstruksi sejalan dengan

pembangunan proyek strategis di Kaltara. Terjaganya kinerja impor yang masih tumbuh positif sejalan dengan finalisasi pembangunan salah satu tenant di KIHI serta sejumlah proyek lainnya. Hal ini mendorong terjaganya nilai dan volume impor komoditas benda-benda dari besi dan baja, mesin/peralatan listrik, dan lainnya. Berdasarkan negara asalnya, mayoritas impor berasal dari Tiongkok dengan pangsa 84,15% diikuti dengan Hongkong sebesar 9,11%, dan Vietnam sebesar 4,06%.

Grafik I. 42 Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Impor Luar Negeri



Sumber: BPS, diolah

BOKS 1

Akselerasi Program Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Strategi Utama Kaltara Reduksi Disparitas Harga Pangan

Pengendalian inflasi di Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan struktural yang unik, terutama disebabkan oleh **keterbatasan lahan produksi pangan lokal** (luas baku sawah yang rendah) dan tingginya biaya logistik yang berdampak pada disparitas harga komoditas strategis, khususnya beras, di wilayah kepulauan dan pedalaman (Tarakan, Nunukan, dan Malinau). Menanggapi hal ini, **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** diimplementasikan sebagai solusi strategis untuk menjamin kontinuitas pasokan dan mereduksi biaya distribusi dari sentra produksi utama di luar Kaltara. Peran KPwBI Kaltara berfokus pada perancangan *model bisnis KAD* yang berkelanjutan, penentuan *struktur biaya yang efisien*, dan fasilitasi *moda transportasi*.

Akselerasi KAD Kaltara diwujudkan melalui dua kegiatan utama yang saling melengkapi:

1. Penguatan Jejaring Pasokan Melalui Roadshow KAD ke Sulawesi Selatan

Pada 9–10 Juli 2025, Pemerintah Kota Tarakan, didampingi oleh Deputi KPwBI Kaltara, melaksanakan Roadshow Penandatanganan KAD ke tiga kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan ini bertujuan mengamankan komitmen pasokan komoditas utama dan memperkuat kapasitas kelembagaan BUMD Pangan:

- **Integrasi Hulu-Hilir Beras:** Penandatanganan **MoU KAD Tarakan–Sidrap** dan **Tarakan–Pinrang** mengamankan suplai komoditas **Beras**, yang merupakan kontributor utama inflasi Kaltara. Skema ini melibatkan langsung Perumda **Agrobisnis Mandiri Tarakan** sebagai *offtaker*, yang merupakan langkah nyata penguatan kapasitas kelembagaan BUMD Pangan.
- **KAD Dua Arah:** KAD Tarakan–Pinrang dirancang dengan skema timbal balik, di mana Pinrang menyuplai beras, dan Tarakan berpotensi menyuplai Rumput Laut. Kunjungan ke PT Biota Laut Ganggang (PT BLG), pabrik pengolahan rumput laut terbesar di Asia Tenggara, memberikan referensi spesifikasi kualitas yang dibutuhkan (*buyer's requirement*) untuk pengembangan budidaya di Tarakan.
- **Diversifikasi Komoditas (Cabai):** Melalui MoU KAD **Tarakan–Enrekang** dan kunjungan ke P4S Laskar Pelangi (*Champion Cabai Nasional*), Kaltara Pelangi (*Champion Cabai Nasional*), Kaltara

memperoleh rujukan best practice budidaya cabai dan bawang merah, serta komitmen pasokan **Cabai** dengan varietas unggul (*shelf life panjang*) untuk menjaga stabilitas harga bumbu di Tarakan.

2. Sinergi Nasional dan Dukungan Logistik (Seremoni GNPIP & Rakor TPID)

Komitmen KAD diperkuat pada Seremoni GNPIP dan Rapat Koordinasi TPID se-Kalimantan di Banjarbaru, 25 September 2025.

- **Dukungan Lintas Sektor:** Sinergi ditunjukkan melalui seremonial MoU KAD antara TPID Tarakan dan Kab. Enrekang, yang didukung langsung oleh *offtaker* dan distributor, serta **BUMN Pelni** melalui **subsidi biaya transportasi** via Tol Laut. Ini merupakan solusi konkret untuk menekan tingginya biaya distribusi (yang menjadi akar disparitas harga) antarwilayah.
- **Fokus Penguatan Produksi Lokal:** Rakor juga menggarisbawahi tantangan struktural Kaltara dan menekankan pentingnya **Akselerasi program cetak sawah rakyat dan pemanfaatan lahan rawa** serta **penguatan modal dan manajerial BUMD Pangan** Kaltara agar mampu berperan sebagai *stabilizer* pasokan dan harga.

3. Tindak Lanjut Utama dan Dampak Strategis

Pelaksanaan KAD dan Rakor TPID telah menghasilkan arahan tindak lanjut yang berfokus pada integrasi kebijakan pusat-daerah untuk menjaga inflasi Kaltara terkendali:

1. **Reduksi Disparitas Harga:** Percepatan distribusi beras SPHP melalui **penambahan gudang penyangga di Tarakan** bekerja sama dengan BULOG untuk mempersingkat rantai pasok.
2. **Efisiensi KAD:** Optimalisasi KAD intra-Kalimantan dan antar-pulau dengan skema bisnis berkelanjutan, termasuk penggunaan subsidi logistik dan potensi fasilitasi *cold storage/silo* untuk menjaga kontinuitas dan kualitas pasokan.
3. **Akurasi Data:** Implementasi **Digitalisasi neraca pangan** daerah untuk komoditas strategis (beras, cabai, bawang merah) guna meningkatkan akurasi data produksi, konsumsi, dan distribusi, yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran.



Gambar Boks V.2.1 Penandatanganan MoU KAD dan Kunjungan Lapangan ke Produsen Pangan Sulawesi Selatan

Melalui model bisnis KAD yang terstruktur dan dukungan logistik yang disubsidi, Kaltara secara bertahap mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah dan secara strategis menekan inflasi pangan, mengarah pada pencapaian target stabilitas harga daerah.





Keuangan Pemerintah Daerah



Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkat dibandingkan periode sebelumnya, didorong realisasi belanja modal dan operasional, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Hal serupa terjadi pada kabupaten/kota yang juga mencatat peningkatan belanja. Realisasi pendapatan juga mengalami peningkatan seiring optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Daerah. Di samping itu, transfer pemerintah pusat juga naik dibandingkan tahun sebelumnya, untuk mendukung pembangunan daerah.



2.1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pagu anggaran pendapatan dan belanja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan III-2025 kembali mengalami kontraksi seiring dengan kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah. Pagu anggaran pendapatan pada APBD Provinsi Kaltara tahun 2025 tercatat menurun sebesar -5,15% (yoy) menjadi Rp2,95 Triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,1 Triliun (Tabel II.1). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan itu, pagu anggaran belanja juga mengalami penurunan sebesar -15,39% (yoy) menjadi Rp2,96 Triliun, turun dari Rp3,5 Triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan belanja terutama bersumber dari berkurangnya alokasi pada komponen belanja modal dan belanja operasional.

Dari sisi realisasi, pendapatan APBD hingga Triwulan III-2025 tercatat sebesar Rp1,87 Triliun, atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,55 Triliun. Secara tahunan, realisasi pendapatan mengalami pertumbuhan 21,21% (yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan asli daerah dan didukung dengan bertambahnya penerimaan transfer pemerintah pusat.

Dari sisi belanja, realisasi belanja pada Triwulan III-2025 tercatat sebesar Rp1,42 Triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,37 Triliun. Secara tahunan, realisasi belanja meningkat sebesar 3,92% (yoy) (Tabel II.1). Peningkatan realisasi belanja ini terutama dipengaruhi oleh baiknya penyerapan pada pos belanja operasional.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah melakukan penyerapan anggaran dengan baik pada Triwulan III- 2025, meskipun pagu anggaran turun cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, akan tetapi pemerintah dapat meningkatkan realisasi baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja pemerintah.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp1,88 Triliun atau 63,71% dari total pagu anggaran pendapatan tahun 2025. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,55 Triliun, sehingga secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 21,21% (yoy). Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya penerimaan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah.¹

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi hingga Triwulan III 2025 mencapai Rp582,22 miliar atau 56,72% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp418,58 miliar atau 39,25%. Secara tahunan, PAD tumbuh signifikan sebesar 39,10% (yoy). Pertumbuhan PAD terutama ditopang oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah tercatat naik dari Rp393,83 miliar menjadi Rp424,49 miliar atau tumbuh 7,79% (yoy), sejalan dengan peningkatan basis pajak daerah. Sementara itu, retribusi daerah juga tumbuh sangat kuat sebesar 74,88% (yoy), mencerminkan meningkatnya aktivitas layanan publik dan pendapatan retribusi semakin optimal.

Tabel II. 1 Pagu dan Realisasi APBD Pemprov Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realiasi (Rp Juta)		%		g.2025 (yoy)
	III 2024	III 2025	III 2024	III 2025	III 2024	III 2025	
Pendapatan	3.106.997	2.947.122	1.549.126	1.877.659	49,86	63,71	21,21
PAD	1.066.531	1.026.394	418.578	582.223	39,25	56,73	39,10
Pendapatan Transfer	2.040.116	1.920.378	1.129.253	1.263.790	55,35	65,81	11,91
Lain-lain Pendapatan yang Sah	350	350	1.295	31.646	370,00	9041,71	2.343,71
Belanja	3.502.591	2.963.549	1.372.302	1.426.107	39,18	48,12	3,92
Belanja Operasional	2.254.725	1.909.845	990.899	1.086.854	43,95	56,91	9,68
Belanja Modal	578.239	369.396	131.343	49.267	22,71	13,34	(62,49)
Belanja Tidak Terduga	15.000	24.999	1.748	21.343	11,65	85,38	1.121,00
Transfer	654.627	659.309	248.312	268.643	37,93	40,75	8,19

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

Tabel II. 2 Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realiasi (Rp Juta)		% Realisasi thdp pagu		g.2025 (yoy)
	III 2024	III 2025	III 2024	III 2025	III 2024	III 2025	
Pendapatan (I+II+III)	3.106.996	2.947.127	1.549.126	1.877.658	49,86	63,71	21,21
I. PAD	1.066.530	1.026.399	418.578	582.222	39,25	56,72	39,10
Pajak daerah	816.201	752.547	393.827	424.493	48,25	56,41	7,79
Retribusi daerah	20.200	12.528	4.650	8.132	23,02	64,91	74,88
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.114	11.371	11.371	9.472	112,43	83,30	(16,70)
Lain-lain PAD yang sah	220.015	249.953	8.730	140.125	3,97	56,06	1.505,10
II. Pendapatan Transfer	2.040.116	1.920.378	1.129.253	1.263.790	55,35	65,81	11,91
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.040.116	1.920.378	1.129.253	1.263.790	55,35	65,81	11,91
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	674.752	627.528	476.327	488.672	70,59	78	2,59
Dana Alokasi Umum	1.154.831	1.022.792	942.050	837.083	81,57	82	(11,14)
Dana Alokasi Khusus	250.888	139.481	129.649	91.946	51,68	66	(29,08)
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	350	350	1.295	31.646	370,00	9.041,71	2.343,71
Pendapatan Hibah	350	350	1.295	31.646	370,00	9.041,71	2.343,71

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

Sementara itu, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp1,26 Triliun atau 65,81% dari pagu, meningkat dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,13 Triliun atau 55,35%. Secara tahunan, pendapatan transfer tumbuh sebesar 11,91% (yoy), yang disebabkan oleh peningkatan transfer pemerintah pusat yang diharapkan dapat mempercepat penyaluran dana ke daerah. Di sisi lain, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kontraksi masing-masing sebesar -11,14% dan -29,08% (yoy).

Dalam rangka mendorong akselerasi penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara terus memperkuat upaya digitalisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dengan melakukan inovasi seperti pelayanan pajak daerah berbasis digital, penerapan e-ticketing, dan pembayaran non-tunai di sektor transportasi terutama ke pelabuhan. Kegiatan ini akan terus dilakukan dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat strategi peningkatan PAD serta memperluas implementasi digitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara.

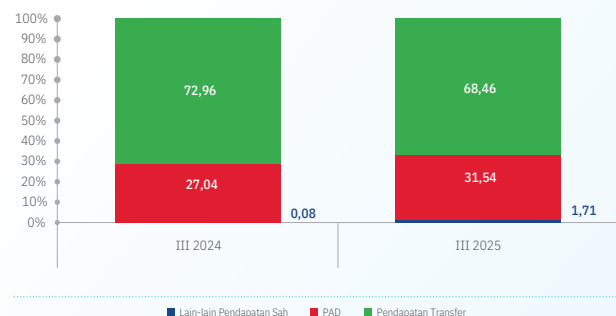
Berdasarkan realisasi pendapatan daerah, Pendapatan Transfer masih mendominasi struktur pendapatan Pemprov Kalimantan Utara hingga Triwulan III 2025 dengan pangsa sebesar 68,46%, relatif menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 72,96%. Sementara itu, pangsa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat meningkat menjadi 31,54% pada Triwulan III 2025, dibandingkan dengan 27,04% pada periode yang sama

tahun 2024. Peningkatan ini ditopang oleh realisasi positif pada komponen retribusi daerah yang menunjukkan adanya kemandirian fiskal daerah.

Adapun lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan signifikan dengan pangsa mencapai 1,71% pada Triwulan III 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,08%. Secara keseluruhan, komposisi pendapatan ini menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup besar, terdapat perbaikan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah yang terus meningkat. Oleh karena itu, penguatan upaya digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui forum TP2DD diharapkan dapat terus mendorong peningkatan PAD sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga Triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp1,43 Triliun

Grafik II. 1 Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

Tabel II. 3 Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realiasi (Rp Juta)		% Realisasi thdp pagu		g.2025 (yoy)
	III 2024	III 2025	III 2024	III 2025	III 2024	III 2025	
BELANJA (I+II+III+IV)	3.502.588	2.963.548	1.372.302	1.426.102	39,18	48,12	3,92
I. Belanja Operasional	2.254.724	1.909.844	990.899	1.086.851	43,95	56,91	9,68
Belanja Pegawai	906.949	986.293	560.067	559.418	61,75	56,72	(0,12)
Belanja Barang dan Jasa	1.133.264	862.882	360.716	486.520	31,83	56,38	34,88
Belanja Subsidi	19.152	3.951	7.100	630	37,07	15,95	(91,13)
Belanja Hibah	191.370	53.767	61.370	39.961	32,07	74,32	(34,89)
Belanja Bantuan Sosial	3.989	2.951	1.644	322	41,21	10,91	-
II. Belanja Modal	578.237	369.396	131.343	49.265	22,71	13,34	(62,49)
Belanja Tanah	10.741	7.013	9.999	-	93,09	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	99.342	55.890	29.989	15.336	30,19	27,44	(48,86)
Belanja Gedung dan Bangunan	203.128	157.146	33.418	24.055	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	257.480	144.929	57.925	9.796	22,50	6,76	(83,09)
Belanja Aset Tetap Lainnya	63	3.828	-	-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	7.483	590	9	78	0,12	13,22	-
III. Belanja tidak terduga	15.000	24.999	1.748	21.343	11,65	85,38	1.121,00
Belanja tidak terduga	15.000	24.999	1.748	21.343	11,65	85,38	1.121,00
IV. Transfer	654.627	659.309	248.312	268.643	37,93	40,75	8,19

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

atau 48,12% dari total pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,37 Triliun atau 39,18% dari pagu. Secara tahunan, realisasi belanja mengalami pertumbuhan sebesar 3,92% (yoy).

Peningkatan realisasi belanja daerah tersebut terutama bersumber dari peningkatan Belanja Operasional yang tercatat sebesar Rp1,08 Triliun atau 56,91% dari pagu, mengalami pertumbuhan 9,68% (yoy) dibandingkan Rp990,89 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh meningkatnya belanja barang dan jasa. Sebaliknya, Belanja Modal menunjukkan kontraksi tajam dengan realisasi sebesar Rp131,34 miliar atau 13,33% dari pagu, jauh lebih rendah dibandingkan Rp369,40 miliar pada Triwulan III 2024, sehingga secara tahunan terkontraksi -62,49% (yoy), terutama pada belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja peralatan dan mesin, belanja tanah, serta belanja gedung dan bangunan sebagai dampak dari efisiensi dan realokasi anggaran tahun 2025.

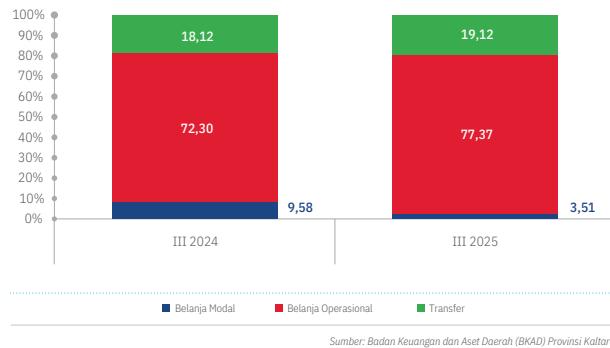
Sementara itu, Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp21,34 miliar atau 85,37% dari pagu, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1,75 miliar atau 11,65% dari pagu. Adapun Belanja Transfer tercatat sebesar Rp268,64 miliar atau 40,75% dari pagu, juga mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp248,31 miliar atau 37,93% dari pagu, sehingga secara tahunan mengalami pertumbuhan 8,19% (yoy) (Tabel II.3).

Secara keseluruhan, kinerja belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara hingga Triwulan III 2025 mulai mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang ditopang oleh belanja operasional, belanja transfer serta belanja barang dan jasa.

Berdasarkan pangsa, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga Triwulan III 2025 mayoritas masih berasal dari Belanja Operasional yang mencapai 77,37%, cukup meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 72,30%. Peningkatan pangsa belanja operasional ini menunjukkan dominasi belanja rutin dalam struktur APBD Provinsi Kalimantan Utara (Grafik II.2).

Sementara itu, kontribusi belanja transfer juga mengalami peningkatan menjadi 19,12% pada Triwulan III 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,12%. Peningkatan ini mencerminkan masih besarnya alokasi belanja untuk mendukung pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Utara.

Di sisi lain, belanja modal menunjukkan penurunan yang cukup tajam dengan pangsa hanya mencapai 3,51%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,58%. Penyusutan porsi belanja modal ini sejalan dengan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya melalui kebijakan efisiensi dan realokasi belanja untuk mendukung prioritas yang lebih

Grafik II. 2 Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025

mendesak pada tahun berjalan. Kondisi tersebut turut membatasi ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan investasi publik, mengingat belanja modal merupakan komponen utama dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah.

2.2 APBD KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN UTARA

Realisasi Pendapatan Spasial

Realisasi pendapatan di 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada Triwulan III 2025 secara agregat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang

sama tahun 2024. Secara nominal, total realisasi komponen pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar Rp6.775,54 miliar atau 78,25% dari total pagu APBD TA 2025 sebesar Rp8.658,81 miliar. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp6.666,30 miliar atau 70,72% dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp9.426,99 miliar.

Pencapaian kinerja positif ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan, baik melalui pajak daerah, retribusi daerah dan program-program strategis lain yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota. Meskipun secara agregat pagu APBD mengalami penurunan cukup jauh dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan justru mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memaksimalkan potensi penerimaan dengan menerapkan kebijakan fiskal yang lebih efisien, meskipun mendapatkan tantangan terhadap anggaran.

Realisasi Belanja Spasial

Realisasi belanja di 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada Triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp4.556,05 miliar atau 43,88% dari total pagu APBD Kabupaten/Kota se-Kaltara sebesar Rp10.382,70 miliar.

Tabel II. 4 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025

Uraian	2024			2025		
	Anggaran Tw III	Realisasi Tw III		Anggaran Tw III	Realisasi Tw III	
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Pendapatan						
Kota Tarakan	1.323,85	894,77	67,59	1.174,83	818,28	69,65
Kab. Bulungan	1.857,93	1.147,77	61,78	1.832,39	1.616,94	88,24
Kab. Malinau	2.978,59	2.261,66	75,93	2.731,19	2.195,53	80,39
Kab. Nunukan	2.000,38	1.327,38	66,36	1.893,25	1.386,39	73,23
Kab. Tana Tidung	1.266,24	1.034,72	81,72	1.027,15	758,40	73,84
Total Kab/Kota Kaltara	9.426,99	6.666,30	70,72	8.658,81	6.775,54	78,25

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

Tabel II. 5 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025

Uraian	2024			2025		
	Anggaran Tw III	Realisasi Tw III		Anggaran Tw III	Realisasi Tw III	
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Belanja						
Kota Tarakan	1.361,73	766,90	56,32	1.214,67	577,79	47,57
Kab. Bulungan	2.385,99	1.060,05	44,43	2.336,97	1.157,47	49,53
Kab. Malinau	3.518,02	1.434,28	40,77	3.245,77	1.317,48	40,59
Kab. Nunukan	2.307,06	1.162,91	50,41	2.152,33	1.006,53	46,76
Kab. Tana Tidung	1.564,60	701,41	44,83	1.432,96	496,78	34,67
Total Kab/Kota Kaltara	11.137,40	5.125,55	46,02	10.382,70	4.556,05	43,88

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.125,55 miliar atau 46,02% dari total pagu APBD Kabupaten/Kota se-Kaltara tahun 2024 sebesar Rp11.137,40 miliar.

Dengan demikian, secara tahunan realisasi belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara mengalami kontraksi, baik secara nominal maupun persentase serapan anggaran. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran sehingga terjadi penundaan atau penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan penggunaan anggaran yang tersedia secara lebih efektif, meskipun terdapat keterlambatan dalam serapan belanja. Penurunan ini juga dapat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian serta penyesuaian struktur belanja untuk efisiensi dan realokasi anggaran pada tahun 2025.

2.3 DANA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L) PEMERINTAH PUSAT

Belanja K/L di Kaltara

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian/Lembaga (K/L) di Provinsi Kalimantan Utara hingga Triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp1,88 Triliun atau 51,62% dari total pagu belanja K/L tahun 2025 sebesar Rp3,65 Triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,35 Triliun atau 60,66% dari total pagu belanja K/L tahun 2024 sebesar Rp4,18 Triliun. Dengan demikian, secara tahunan realisasi belanja K/L di wilayah Kalimantan Utara mengalami kontraksi sebesar -25,63% (yoy) (Grafik II.6).

Penurunan realisasi belanja K/L terutama dipengaruhi oleh turunnya belanja modal yang hanya terealisasi sebesar Rp250,24 miliar atau 31,18% dari pagu, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp711,67 miliar atau 57,20% dari pagu. Secara tahunan, belanja modal berkontraksi sangat tajam sebesar -64,84% (yoy). Kondisi ini

mencerminkan adanya kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran K/L, sehingga berdampak pada terbatasnya pelaksanaan proyek infrastruktur di Kalimantan Utara.

Di sisi lain, belanja pegawai mencatatkan peningkatan dengan realisasi sebesar Rp926,95 miliar atau 76,92% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp839,18 miliar atau 76,07% dari pagu, sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait penyesuaian gaji dan tunjangan ASN. Sementara itu, belanja barang tercatat turun menjadi Rp707,17 miliar atau 43,04% dari pagu, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp983,17 miliar, atau 53,72% dari pagu, mengalami kontraksi sebesar 28,07% (yoy). Adapun belanja bantuan sosial mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Rp0,31 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp0,14 miliar.

Secara keseluruhan, struktur belanja K/L di Kalimantan Utara pada Triwulan III 2025 masih didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja modal mengalami kontraksi tajam. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya stimulus fiskal melalui pembangunan infrastruktur, yang berpotensi menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut persentase terhadap pagu, serapan realisasi terbesar pada Triwulan III 2025 adalah belanja bantuan sosial dengan capaian 98% dari pagu, yang merupakan salah satu bentuk stimulus fiskal dalam struktur APBN untuk mendukung perekonomian di Kalimantan Utara (Grafik II.4). Selanjutnya, belanja pegawai sebesar 77% dan diikuti oleh belanja baeang dan jasa tercatat sebesar 43%.

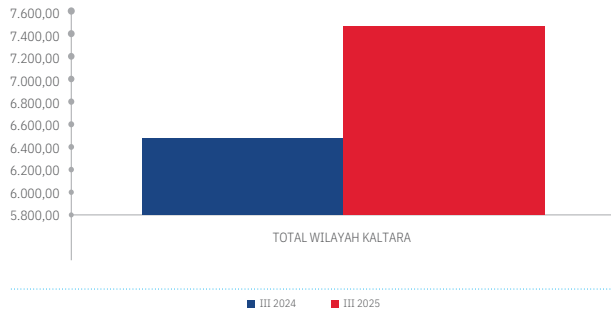
Sementara itu, belanja modal menunjukkan persentase serapan yang relatif rendah, yaitu 31% dari pagu, sejalan dengan kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah pusat pada tahun 2025. Secara total, realisasi belanja K/L di wilayah Provinsi Kalimantan Utara hingga Triwulan II 2025 mencapai 52% dari pagu APBN, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tabel II. 6 Realisasi Belanja K/L di Wilayah Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025

Uraian	2024			2025			g.2025 (yoy)
	Anggaran	Realisasi Tw III		Anggaran	Realisasi Tw III		
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%	
Belanja Pegawai	1.103,08	839,18	76,08	1.205,07	926,95	76,92	10,46
Belanja Barang	1.830,02	983,17	53,72	1.642,96	707,17	43,04	(28,07)
Belanja Modal	1.244,16	711,67	57,20	802,39	250,24	31,19	(64,84)
Belanja Bantuan Sosial	0,16	0,14	87,97	0,32	0,31	98,38	-
Total Belanja K/L	4.177,41	2.534,16	60,66	3.650,73	1.884,67	51,62	(25,63)

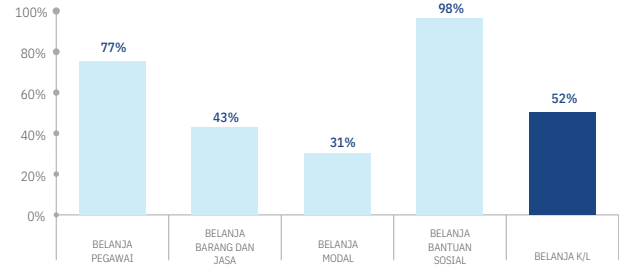
Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

Grafik II. 3 Realisasi Belanja K/L di Provinsi Kaltara Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2025 (Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

Grafik II. 4 Tingkat Serapan Realisasi Belanja APBN Provinsi Kaltara Triwulan III 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara



btm
QR Code Standar
Perdagangan Nasional

NRID: 012540461158
A01



SATU QRIS LAYAN SEMUA
Cat. Aplikasi Pembayaran
© 2019 PT. QRIS

Perkembangan Infasi Daerah



Inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Prov. Kaltara pada triwulan III 2025 tercatat 2,32% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2025 sebesar 1,38% (yoy). Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dari pencapaian inflasi nasional sebesar 2,65% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama disebabkan kenaikan harga ikan bandeng, bawang merah, dan tomat seiring dengan pasokan yang menipis karena belum memasuki musim panen. Inflasi juga didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sejalan dengan kenaikan harga emas yang didorong tingginya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastiaan perekonomian global. Namun, inflasi tertahan oleh Kelompok Transportasi didukung penurunan harga angkutan udara seiring akan masuknya maskapai baru.

3.1. GAMBARAN UMUM

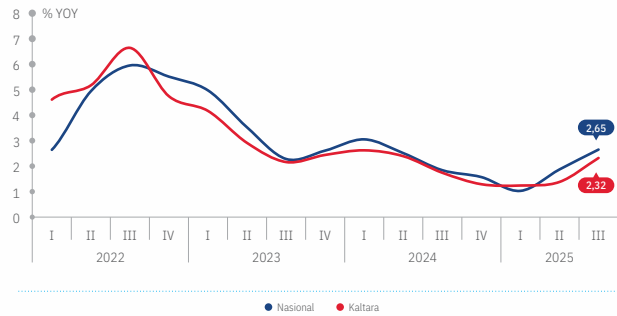
Inflasi triwulan III 2025 Provinsi Kalimantan Utara tetap terjaga, di bawah target inflasi nasional. Inflasi gabungan 3 (tiga) kabupaten/kota IHK Prov. Kaltara tercatat sebesar 2,32% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2025 sebesar 1,38% (yoy). Realisasi inflasi yang lebih tinggi tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga emas seiring meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah perang tarif Amerika Serikat dan konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah. Lebih lanjut, keterbatasan pasokan ikan bandeng pada triwulan sebelumnya turut berkontribusi terhadap kenaikan inflasi pada triwulan laporan. Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Selor sebesar 2,74% (yoy), disusul oleh Tarakan dan Nunukan yang masing-masing sebesar 2,46% (yoy) dan 1,84% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi Provinsi Kalimantan Utara tersebut juga sejalan dengan peningkatan inflasi nasional, dari sebesar 1,87% (yoy) pada triwulan II 2025, menjadi 2,65% (yoy) pada triwulan III 2025 (Grafik III.1). Secara regional, inflasi Provinsi Kaltara lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional namun tercatat terendah ketiga di Kalimantan, setelah Kalimantan Barat (Grafik III. 2)

Pada triwulan IV 2025, inflasi Prov. Kaltara diperkirakan meningkat dari triwulan III dan berada di dalam sasaran target nasional 2,5±1%. Tekanan inflasi triwulan IV 2025 diperkirakan lebih tinggi terutama disebabkan oleh tren kenaikan emas global yang masih berlanjut serta momen HBKN Nataru yang secara historis menjadi puncak permintaan komoditas pangan. Namun begitu peningkatan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan tarif angkutan udara seiring beroperasinya maskapai baru di Kaltara serta insentif diskon angkutan udara dan angkutan laut di momen HBKN Nataru. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltara untuk terus melakukan pengendalian inflasi berdasarkan *framework 4K*, yaitu Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga dan Komunikasi Efektif. Bank Indonesia sebagai bagian dalam TPID juga terus konsistensi dalam mengarahkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah turut mendukung terjaganya inflasi.

3.2. PERKEMBANGAN INFLASI BULANAN (MTM)

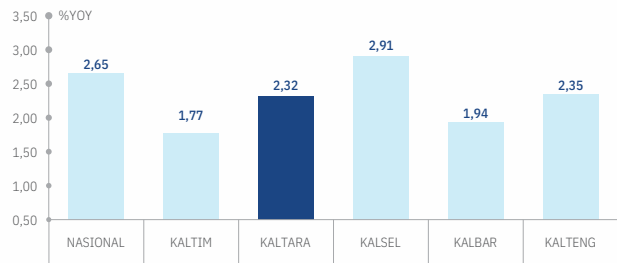
Secara rerata bulanan, inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK (Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan) triwulan III 2025 mencapai sebesar 0,21% (mtm), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 0,19% (mtm) (Tabel III.1). Kenaikan rata-rata bulanan inflasi tersebut utamanya disebabkan adanya

Grafik III. 1 Inflasi Gabungan Kota IHK di Kaltara & Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik III. 2 Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di Kalimantan Triwulan III 2025



Sumber: BPS, diolah

kenaikan tarif komoditas *administered prices* di awal triwulan III 2025. Kenaikan rata-rata inflasi juga didorong oleh menurunnya hasil panen imbas curah hujan yang tinggi di triwulan III 2025.

Perkembangan Inflasi Periode Juli 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara pada Juli 2025 tercatat inflasi sebesar 0,59% (mtm) terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Secara bulanan, inflasi bulan Juli disebabkan oleh peningkatan harga pada komoditas Tarif Air Minum PAM (andil 0,28%), Tarif Rumah Sakit (andil 0,16%), dan Tomat (andil 0,16%). Peningkatan harga Tarif Air Minum PAM merupakan implementasi Perbup No. 100.3.3.2/245 Tahun 2025 tentang Penetapan Tarif Air Perumda Air Minum yang naik Rp. 1000 per m². Sementara itu, peningkatan Tarif Rumah Sakit tercantum pada Perda Kaltara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif berbagai layanan kesehatan di RS milik daerah dan diimplementasi pada Juli 2025. Sedangkan peningkatan

Tabel III. 1 Perbandingan Inflasi Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan III 2025 (mtm)

Kelompok Barang	Tw II 2025				Tw III 2025			
	Apr	Mei	Jun	Rata-rata	Apr	Mei	Jun	Rata-rata
Umum / Total	0,45	0,06	0,07	0,19	0,59	0,06	-0,01	0,21

Sumber: BPS, diolah

harga Tomat disebabkan berkurangnya pasokan lokal karena curah hujan yang tinggi membuat output panen Tomat menurun dan menipisnya pasokan dari luar daerah. Di sisi lain, inflasi Juli 2025 tertahan oleh deflasi pada komoditas Angkutan Laut (andil -0,23% mtm), Angkutan Udara (andil -0,08%), dan Emas Perhiasan (andil -0,01%). Penurunan harga Angkutan Laut didukung insentif diskon tarif 50% kapal penumpang Pelni untuk semua rute dan pelayanan. Sementara itu, penurunan harga Angkutan Udara didorong mobilitas masyarakat yang lebih rendah pada bulan Juni pasca momen HBKN Idul Adha dan libur sekolah di bulan Juni. Sedangkan turunnya harga Emas Perhiasan sejalan dengan harga emas global yang cenderung menurun akibat dolar AS yang menguat pasca Fed masih menahan suku bunga serta penurunan permintaan emas global yang menurun, terutama di Tiongkok dan India.

Perkembangan Inflasi Periode Agustus 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara pada Agustus 2025 tercatat inflasi sebesar 0,06% (mtm) terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada Kelompok Transportasi. Pendorong inflasi (mtm) Provinsi Kaltara periode Agustus 2025 disebabkan oleh peningkatan harga pada komoditas Angkutan Laut (andil 0,23%), Daging Ayam Ras (andil 0,06%), dan Bawang Merah (andil 0,04%). Peningkatan harga Angkutan Laut sejalan dengan berakhirnya diskon tarif 50% seluruh layanan kapal Pelni pada bulan Agustus 2025. Sementara itu, peningkatan harga Daging Ayam Ras disebabkan karena biaya pakan naik dan juga kenaikan harga *live bird* dan *Day Old Chick (DOC)* di level nasional. Sedangkan peningkatan harga Bawang Merah disebabkan karena dipicu pasokan berkurang di jeda antar-musim panen dan gangguan cuaca di sentra produksi, sehingga distribusi ke Kaltara lebih ketat dan harga eceran terdorong naik. Di sisi lain, inflasi Agustus 2025 tertahan oleh deflasi pada komoditas Tomat

(andil -0,11%), Angkutan Udara (andil -0,08%), dan Cabai Rawit (andil -0,06%). Penurunan harga Tomat dan Cabai Rawit disebabkan karena meningkatnya pasokan lokal karena sudah memasuki fase panen yang didukung cuaca yang lebih kondusif. Sementara itu, penurunan harga angkutan udara disebabkan karena penurunan tarif angkutan udara seiring dengan kebijakan diskon di momen HBKN.

Perkembangan Inflasi Periode September 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara pada September 2025 tercatat deflasi sebesar 0,01% (mtm) terutama disebabkan oleh penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Pendorong Deflasi September 2025* bersumber dari menurunnya harga komoditas Ikan Layang (andil -0,07%), Bawang Merah (andil -0,07%), dan Angkutan Udara (andil -0,05%). Penurunan harga Ikan Layang sejalan dengan kondisi ombak dan cuaca yang kondusif sehingga hasil tangkapan nelayan meningkat dan pasokan ikan terjaga. Sementara itu, penurunan harga Bawang Merah didukung terjaganya pasokan seiring mulai masuknya musim panen Bawang Merah di daerah penghasil. Sedangkan penurunan harga Angkutan Udara disebabkan penyesuaian harga oleh maskapai untuk mengantisipasi masuknya maskapai baru di Kaltara pada bulan Oktober 2025. Di sisi lain, deflasi September 2025 tertahan oleh inflasi pada komoditas Emas Perhiasan (andil 0,09% mtm), Daging Ayam Ras (andil 0,04%), dan Air Kemasan (andil 0,04%). Peningkatan harga Emas Perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas global yang didorong ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga oleh Federal Reserve seiring data ketenagakerjaan AS yang lemah. Sementara itu, peningkatan harga Daging Ayam Ras didorong oleh kenaikan harga *live bird* dan *Day Old Chick (DOC)* di level nasional. Kenaikan harga Air Kemasan sejalan dengan kenaikan biaya distribusi secara umum sepanjang tahun 2025.

Tabel III. 2 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan III 2025 (mtm)

Juli 2025			Agustus 2025			September 2025		
Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Tarif Air Minum Pam	12,57	0,28	Angkutan Laut	83,86	0,23	Ikan Layang/ Ikan Benggol	-5,02	-0,07
Tarif Rumah Sakit	28,04	0,16	Daging Ayam Ras	3,27	0,06	Bawang Merah	-8,98	-0,07
Tomat	34,70	0,16	Bawang Merah	5,22	0,04	Angkutan Udara	-4,01	-0,05
Beras	1,86	0,08	Tukang Bukan Mandor	3,92	0,03	Tomat	-6,34	-0,03
Bawang Merah	10,25	0,07	Buku Tulis Bergaris	6,58	0,02	Cabai Rawit	-4,13	-0,03
Cabai Rawit	4,35	0,03	Beras	0,31	0,01	Ikan Kembung/ikan Gembung/ Ikan Banyar/ikan Gembolo/ Ikan Aso-aso	-6,43	-0,02
Krim Wajah	8,77	0,03	Bayam	4,86	0,01	Cabai Merah	-7,61	-0,01
Bayam	10,67	0,03	Sewa Rumah	0,47	0,01	Gula Pasir	-1,47	-0,01
Kontrak Rumah	1,69	0,02	Ikan Bandeng/ikan Bolu	0,89	0,01	Jagung Manis	-2,61	-0,01
Kangkung	3,40	0,01	Kacang Panjang	5,27	0,01	Buncis	-10,20	-0,01

Sumber: BPS, diolah

Tabel III. 3 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan III 2025 (mtm)

Juli 2025			Agustus 2025			September 2025		
Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Angkutan Laut	-45,61	-0,23	Tomat	-18,04	-0,11	Ikan Layang/ Ikan Benggol	-5,02	-0,07
Angkutan Udara	-6,01	-0,08	Angkutan Udara	-6,59	-0,08	Bawang Merah	-8,98	-0,07
Emas Perhiasan	-0,88	-0,01	Cabai Rawit	-7,06	-0,06	Angkutan Udara	-4,01	-0,05
Telur Ayam Ras	-1,28	-0,01	Ikan Layang/ Ikan Benggol	-2,56	-0,04	Tomat	-6,34	-0,03
Bawang Putih	-3,41	-0,01	Sawi Hijau	-15,16	-0,04	Cabai Rawit	-4,13	-0,03
Daging Ayam Ras	-0,52	-0,01	Kangkung	-9,32	-0,03	Ikan Kembung/ikan Gembung/ Ikan Banyar/ikan Gembolo/ Ikan Aso-aso	-6,43	-0,02
Pengharum Cucian/ Pelembut	-3,11	-0,01	Jagung Manis	-7,28	-0,02	Cabai Merah	-7,61	-0,01
Seng	-2,55	0,00	Bawang Putih	-4,16	-0,01	Gula Pasir	-1,47	-0,01
Batu Bata/batu Tela	-3,09	0,00	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	-3,57	-0,01	Jagung Manis	-2,61	-0,01
Cabai Merah	-2,95	0,00	Bensin	-0,14	-0,01	Buncis	-10,20	-0,01

Sumber: BPS, diolah

3.3. INFLASI TAHUNAN (YOY)

Inflasi tahunan gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kaltara meningkat pada triwulan III 2025. Inflasi Kalimantan Utara tercatat sebesar 2,32% (yoy), naik dari triwulan sebelumnya sebesar 1,38% (yoy) dan juga lebih tinggi dibanding inflasi triwulan III 2024 sebesar 1,74% (yoy) (Tabel III.4). Inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya seiring kenaikan harga emas perhiasan di tengah kuatnya permintaan aset *safe haven* global. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi pada triwulan laporan tertahan oleh penurunan harga pada Kelompok Transportasi seiring koreksi tarif angkutan udara pasca momen HBKN serta normalisasi permintaan.

Komoditas emas perhiasan, ikan bandeng/ikan bolu, dan bawang merah menjadi kontributor utama pendorong inflasi tahunan pada triwulan III 2025. Komoditas emas perhiasan tercatat menyumbang andil terbesar dalam inflasi tahunan Provinsi Kaltara, yaitu 0,50% (Tabel III.5). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global di tengah ketidakpastian perekonomian dan risiko geopolitik yang masih berlanjut. Komoditas ikan bandeng menjadi kontributor terbesar kedua dengan andil inflasi tahunan 0,29% seiring berkurangnya pasokan ikan bandeng di tengah permintaan yang tinggi. Komoditas bawang merah menjadi kontributor inflasi tahunan terbesar ketiga dengan andil 0,21%. Kenaikan harga bawang merah terutama didorong oleh

Tabel III. 4 Inflasi Umum/Total Tahunan Kaltara 2024-2025 (yoy)

Kelompok Barang	Inflasi %YOY							
	2024				2025			Arah
	I	II	III	IV	I	II	III	
Umum / Total	2,62	2,39	1,74	1,29	1,24	1,38	2,32	▲

Sumber: BPS, diolah

Tabel III. 5 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Gabungan Triwulan III 2025 (yoy)

Andil Inflasi			Andil Deflasi		
Komoditas	YOY	%Andil	Komoditas	YOY	%Andil
Emas Perhiasan	44,56	0,50	Angkutan Udara	-20,82	-0,29
Tarif Air Minum Pam	13,48	0,30	Cabai Rawit	-11,09	-0,09
Ikan Bandeng/ikan Bolu	35,58	0,29	Tahu Mentah	-13,88	-0,05
Bawang Merah	42,05	0,21	Labu Parang/manis/merah/kuning	-24,08	-0,05
Tarif Rumah Sakit	31,84	0,18	Tempe	-9,77	-0,04
Tomat	49,83	0,16	Batu Bata/batu Tela	-15,16	-0,03
Beras	2,72	0,12	Bensin	-0,48	-0,02
Nasi dengan Lauk	3,10	0,10	Semen	-4,92	-0,02
Kopi Bubuk	17,73	0,09	Pengharum Cucian/ Pelembut	-5,50	-0,02
Minyak Goreng	5,54	0,08	Sabun Cair/cuci Piring	-3,58	-0,01

Sumber: BPS, diolah

Komoditas angkutan udara, cabai rawit, dan tahu mentah menjadi kontributor utama penahan inflasi tahunan pada triwulan III 2025. Peningkatan inflasi tahunan yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan tarif angkutan udara (andil -0,29%) seiring normalisasi tarif dan permintaan pasca periode hari besar. Penurunan harga cabai rawit (andil -0,09%) dan tahu mentah (andil -0,05%) turut meredakan tekanan harga, disertai deflasi pada sejumlah komoditas lain seperti labu parang/manis/merah/kuning (-0,05%) dan tempe (-0,04%). Adapun 10 (sepuluh) komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar dapat dilihat pada Tabel III.5.

3.4. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN

Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi tahunan di Triwulan III 2025 terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya namun tertahan pada Kelompok Transportasi. Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat 3,50% (yoy, andil 1,13%), terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas ikan bandeng, bawang merah, dan tomat. Sementara itu, Inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat sebesar 8,47% (yoy, andil 0,61%), disumbang oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan. Namun, inflasi tertahan oleh Kelompok Transportasi yang tercatat deflasi sebesar -2,04% (yoy, andil -0,25%), disumbang oleh penurunan harga pada komoditas angkutan udara.

Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami peningkatan didorong oleh peningkatan harga pada komoditas ikan bandeng, bawang merah, dan tomat. Kenaikan harga ikan bandeng sejalan dengan pasokan ikan bandeng yang

Tabel III. 6 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan III 2025 (yoy)

Kelompok	Inflasi Kelompok	
	YOY	Andil
Umum	2,32	2,32
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,50	1,13
Pakaian dan Alas Kaki	-0,10	-0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rt	2,73	0,45
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rt	-0,50	-0,03
Kesehatan	8,31	0,20
Transportasi	-2,04	-0,25
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,11	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,11	0,02
Pendidikan	0,88	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	2,08	0,18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8,47	0,61

Sumber: BPS, diolah

berkurang pasca puncak panen pada triwulan I 2025 di tengah meningkatnya konsumsi ikan bandeng, serta peningkatan harga tomat dan bawang merah sejalan dengan berkurangnya pasokan karena berakhirnya telah berakhirnya musim panen yang mengurangi pasokan dari luar daerah. Di sisi lain, peningkatan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas cabai rawit, tempe, dan tahu mentah. Penurunan harga cabai rawit didukung oleh meningkatnya pasokan lokal cabai yang mengurangi disparitas harga di Kaltara serta curah hujan yang kondusif sehingga meningkatkan output panen, sedangkan penurunan harga komoditas tempe dan tahu mentah didorong oleh menurunnya harga kedelai di level nasional, sehingga menurunkan komponen input produksi tempe dan tahu. Adapun 10 (sepuluh) komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tabel III. 7 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Triwulan III 2025 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil	Komoditas	Inflasi	Andil
Ikan Bandeng/ikan Bolu	35,58	0,29	Cabai Rawit	-15,27	-0,12
Bawang Merah	42,05	0,21	Tempe	-10,26	-0,04
Tomat	49,83	0,16	Tahu Mentah	-10,48	-0,04
Beras	2,72	0,12	Sawi Hijau	-12,98	-0,03
Kopi Bubuk	17,73	0,09	Bawang Putih	-8,47	-0,03
Minyak Goreng	5,54	0,08	Labu Parang/manis/merah/kuning	-16,07	-0,03
Sigaret Kretek Mesin (skm)	2,38	0,05	Ikan Layang/ Ikan Benggol	-1,21	-0,02
Air Kemasan	3,39	0,04	Ikan Cakalang/ Ikan Sisik	-7,34	-0,01
Daging Ayam Ras	1,77	0,04	Cabai Merah	-7,18	-0,01
Sigaret Putih Mesin (spm)	3,07	0,03	Ikan Kakap Putih	-7,03	-0,01

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami peningkatan didorong oleh peningkatan pada komoditas emas perhiasan, krim wajah, dan pasta gigi, (Tabel III. 7). Kenaikan komoditas emas perhiasan di Kalimantan Utara sejalan dengan meningkatnya permintaan emas sebagai aset *save haven*. Hal tersebut dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik global serta respons pasar terhadap realisasi siklus pemangkasan suku bunga oleh *The Fed* yang melemahkan indeks Dolar AS. Sementara itu, kenaikan harga pada krim wajah dan pasta gigi sejalan dengan kenaikan harga pada level nasional.

Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi

Kelompok Transportasi mengalami deflasi yang disebabkan penurunan pada komoditas angkutan udara, bensin, dan tarif kendaraan roda 4 online (Tabel III. 9). Penurunan harga angkutan udara sejalan penurunan mobilitas masyarakat seiring minimnya *festive event* pada triwulan III 2025 serta akan

masuknya 2 rute penerbangan maskapai baru dengan harga yang lebih murah sehingga maskapai lain mulai menyesuaikan, kemudian penurunan harga bensin didorong penurunan harga minyak global sejalan kondisi *oversupply* akibat peningkatan produksi negara produsen serta berkurangnya permintaan akibat perlambatan aktivitas ekonomi global, sedangkan penurunan harga tarif kendaraan roda 4 online sejalan dengan mulai banyaknya persaingan pasar taksi online di Tarakan. Namun deflasi yang lebih dalam tertahan inflasi pada komoditas sepeda motor seiring kenaikan harga sepeda motor setiap tahun terutama pada model terbaru dan inflasi angkutan laut sejalan kenaikan tarif kapal PELNI.

3.5. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID kabupaten/kota terus melakukan koordinasi secara intensif untuk menjaga stabilitas inflasi pada triwulan III 2025. Koordinasi, sinergi, dan upaya yang intens dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kaltara dan TPID di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten selama bulan Juli hingga September 2025 (Tabel III. 9) dengan fokus memastikan keterjangkauan harga,

Tabel III. 8 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan III 2025 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil	Komoditas	Inflasi	Andil
Emas Perhiasan	58,91	0,69	Parfum	-0,82	0,00
Krim Wajah	12,54	0,04	Deodorant	-0,79	0,00
Pasta Gigi	3,94	0,02	Minyak Rambut	-1,73	0,00
Sabun Mandi Cair	4,12	0,02	Pembalut Wanita	-0,17	0,00
Tarif Gunting Rambut Pria	3,47	0,01	Tisu	-0,10	0,00
Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	0,81	0,01	Bedak Bayi	-0,71	0,00
Sabun Mandi	2,59	0,01			
Shampo	0,72	0,00			
Sabun Wajah	3,18	0,00			
Tarif Gunting Rambut Anak	4,48	0,00			

Sumber: BPS, diolah

Tabel III. 9 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Transportasi Triwulan III 2025 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil	Komoditas	Inflasi	Andil
Sepeda Motor	2,20	0,03	Angkutan Udara	-23,98	-0,33
Angkutan Laut	3,40	0,02	Bensin	-0,08	0,00
Pelumas/oli Mesin	1,63	0,01	Tarif Kendaraan Roda 4 Online	-5,81	0,00
Tarif Parkir	4,55	0,01			
Cuci Kendaraan	3,28	0,00			
Pemeliharaan/service	0,37	0,00			
Perbaikan Ringan Kendaraan	0,54	0,00			
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0,23	0,00			
Tarif Kendaraan Roda 2 Online	4,52	0,00			
ACCU	5,66	0,00			

Sumber: BPS, diolah

Tabel III. 10 Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah selama Triwulan III 2025

Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan / Deskripsi Kegiatan	Penyelenggara
7, 14, 22, dan 29 Juli 2025	Rakor Rutin Inflasi	Evaluasi Pelaksanaan TPID setiap minggunya	Kemendagri
7 Juli 2025	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut KAD Tarakan	Rencana pilot project KAD dengan skema subsidi ongkos angkutan laut oleh Pelni	Kemenko Perekonomian
10-11 Juli 2025	Rapat Koordinasi dan Penandatanganan MoU KAD Kota Tarakan dengan Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Enrekang	Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga stabilitas pasokan komoditas dari luar daerah	TPID Kota Tarakan
17, 23 Juli 2025	Sidak oftaker beras dan pasar induk di Kota Tarakan dan Kab. Bulungan	Menindaklanjuti isu penumpukan pasokan dan beras oplosan	TPID Provinsi Kaltara
17 Juli 2025	Gerakan Pasar Murah komoditas pokok di Nunukan Selatan	Pengendalian harga komoditas pangan Bapokting	TPID Kab. Nunukan
22 Juli 2025	Implementasi digital farming pada kelompok tani cabai Kota Tarakan melalui penggunaan Smart Green House	Mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan efisiensi proses pertanian	Bank Indonesia
23 Juli 2025	Rapat Koordinasi Teknis TPID Kota Tarakan	Membahas rencana pengendalian inflasi dan isu beras oplosan serta upaya penanganannya	TPID Kota Tarakan
24 Juli 2025	Pemberian Hibah bantuan bibit sapi dan pakan ternak di Kab. Tana Tidung	Menjaga kesediaan pasokan ternak di daerah terpencil	TPID Kab. Tana Tidung
24 Juli 2025	Siaran Radio RRI Tarakan dengan tema "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kendalikan Inflasi di Tengah Tekanan Global" yang diisi KPwBI Kaltara, BPS, dan Akademisi	Menjaga ekspektasi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi serta ketahanan pangan dan inflasi di Kaltara di tengah berbagai tekanan global	RRI, Bank Indonesia, BPS
2 Agustus 2025	Pasar murah kolaborasi TPID & TVRI di Tanjung Selor	Pengendalian harga komoditas pangan Bapokting	TPID Provinsi Kaltara
5, 11, 19, dan 25 Agustus 2025	Rakor Rutin Inflasi	Evaluasi Pelaksanaan TPID setiap minggunya	Kemendagri
14, 15, 24, 26 Agustus 2025:	Pasar murah TPID Kota Tarakan rutin mingguan	Menjaga keterjangkauan harga Bapokting serta mendorong penyaluran beras SPHP	TPID Kota Tarakan
20 Agustus 2025	Giat panen padi bersama yang dihadiri Pemprov, BI, dan Forkopimda di Desa Wonomulyo, Kab. Bulungan dengan hasil panen 8 ton/ha	Menjaga ekspektasi masyarakat terhadap pasokan beras lokal, serta meningkatkan produktivitas padi dengan benih lokal	TPID Provinsi Kaltara
20 Agustus 2025	Peresmian bangsal produksi olahan komoditas cabai menjadi sambal kemasan (Pesona Sambal) di Desa Salimbatu, Kab. Bulungan	Sebagai upaya hilirisasi cabai dan mencegah oversupply saat puncak panen	TPID Kab. Bulungan
26 Agustus 2025	Rapat Teknis TPID Kota Tarakan	Membahas perkembangan risiko inflasi dari kenaikan harga Bapokting di bulan Agustus	TPID Kota Tarakan
29 Agustus 2025	High Level Meeting (HLM) TPID Se-Kaltara	Evaluasi program pengendalian inflasi sepanjang tahun 2024 serta inovasi program pengendalian inflasi tahun 2025	Bank Indonesia
30 Agustus 2025	Pasar murah TPID Kab. Nunukan	mendorong penyaluran beras SPHP dan menjaga keterjangkauan harga Bapokting di tengah harga yang meningkat	TPID Kab. Nunukan
Mingguan, September 2025	Gerakan Pasar Murah (GPM) keliling harian oleh Bulog, TNI, dan Polri secara mobile	Menjaga keterjangkauan harga Bapokting serta akselerasi penyaluran SPHP saat harga beras sedang meningkat	TPID Kota Tarakan
2, 8, 16, 23 September 2025	Rakor Rutin Inflasi	Evaluasi Pelaksanaan TPID setiap minggunya	Kemendagri

7 September 2025	Pasar murah komoditas Bapokting pada acara RRI Fest kolaborasi RRI dan Pemda di Tarakan dan Nunukan	kolaborasi pemerintah dan swasta dalam upaya pengendalian inflasi	RRI, TPID Kota Tarakan & Kab.
9 September 2025	Pasar murah pada rangkaian perayaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) di Tanjung Selor	Pengendalian harga komoditas pangan Bapokting	TPID Provinsi Kaltara
10 September 2025	Rapat Teknis TPID Kota Tarakan rencana tindak lanjut program pengendalian inflasi Tarakan yaitu KAD dan pembuatan Mini Distribution Center (MDC)	Memotong rantai pasok sehingga harga komoditas lebih terjangkau	TPID Kota Tarakan
25 September 2025	Rapat Koordinasi TPID se-Kalimantan	Memperkuat sinergi BI, Kemenko Perekonomian, dan Bapanas bersama TPID daerah dalam berbagai upaya pengendalian inflasi	TPID Se-Kalimantan
27 September 2025	Gerakan panen serentak jagung di Tarakan oleh jajaran kepolisian serta Forkopimda Kaltara	Upaya mendorong swasembada untuk komoditas jagung Kaltara	TPID Provinsi Kaltara
29 September 2025	Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA), dibuka langsung oleh Menteri Pertanian	Sarana berbagi pengalaman dan peningkatan kapasitas bagi petani, penyuluh, dan pemerintah untuk mendorong pertanian yang lebih produktif dan inovatif	TPID Provinsi Kaltara
30 September 2025	Tanam Perdana Padi Cetak Sawah di lahan seluas 202 Hektar di Kelurahan Juata Laut, Kota Tarakan bersama Forkopimda Tarakan	Upaya swasembada pangan Kaltara melalui Optimalisasi Lahan Rawa	TPID Kota Tarakan

Sumber: TPID Provinsi Kaltara dan Kab/Kota di Wilayah Kaltara (diolah)

ketersediaan pasokan bahan pangan strategis, dan kelancaran distribusi melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan setiap bulan.

Pada triwulan III 2025, TPID Se-Kaltara secara rutin melakukan operasi pasar di sejumlah lokasi strategis di kabupaten/kota untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan menjamin distribusi pasokan pangan sampai ke daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, TPID se-Provinsi Kalimantan Utara secara rutin mengadakan *High Level Meeting (HLM)* untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan selama triwulan III 2025. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara bersinergi dengan TPID untuk mengembangkan pertanian lokal dengan meningkatkan mekanisasi dan penggunaan teknologi pertanian. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat menjaga ekspektasi inflasi masyarakat melalui ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga yang didukung oleh kelancaran distribusi.

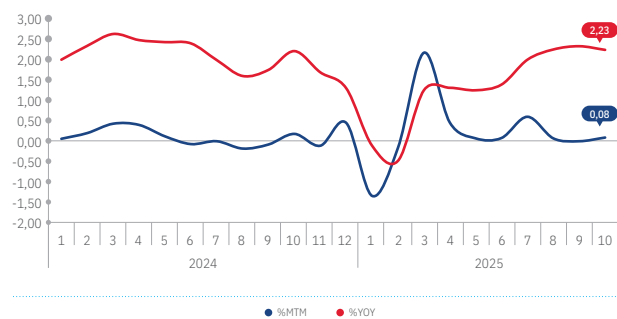
3.6. TRACKING INFLASI TRIWULAN IV 2025

Inflasi tahunan gabungan 3 (tiga) kabupaten/kota IHK Kalimantan Utara Triwulan IV 2025 (realisasi hingga Oktober 2025) tercatat berada di dalam sasaran target inflasi nasional dan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada bulan Oktober 2025, IHK gabungan 3 (tiga) kabupaten/kota menunjukkan inflasi sebesar 0,08% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi 0,01% (mtm) (Grafik III. 3). Dengan pencapaian tersebut maka secara tahunan Kalimantan Utara di Bulan Oktober 2025 mengalami inflasi 2,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86% (yoy).

Inflasi bulanan Provinsi Kaltara periode Oktober 2025 terutama disumbang oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan (andil 0,22% mtm), ikan bandeng (andil 0,08%), dan angkutan laut (andil 0,02%). Peningkatan harga emas perhiasan sejalan kenaikan harga emas global yang didorong permintaan aset *safe haven* yang terus meningkat sejalan ekspektasi pelemahan perekonomian global. Sementara itu, peningkatan harga ikan bandeng seiring dengan minimnya pasokan akibat berakhirnya masa panen ikan bandeng/ Sedangkan kenaikan harga angkutan laut sejalan dengan penyesuaian harga tiket kapal Pelni seiring kenaikan tarif layanan jasa pelabuhan Pelindo sebesar Rp12.500.

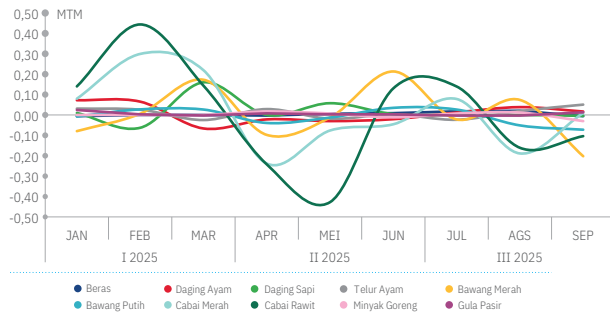
Di sisi lain, inflasi bulanan Provinsi Kaltara periode Oktober 2025 yang lebih tinggi tertahan oleh menurunnya harga komoditas bawang merah (andil -0,08%), cabai rawit (andil -0,06%), dan angkutan udara (andil -0,05%). Penurunan harga bawang merah dan cabai rawit didukung terjaganya pasokan seiring mulai

Grafik III. 3 Perkembangan Inflasi Bulanan Kalimantan Utara



Sumber: BPS, diolah

Grafik III. 4 Perkembangan Harga Bulanan Pangan Strategis Kalimantan Utara



Sumber: PIHPS, diolah

masuknya musim panen bawang merah di daerah penghasil. Sedangkan penurunan harga angkutan udara disebabkan penyesuaian harga oleh maskapai seiring dengan masuknya maskapai baru di Kaltara dengan tarif yang lebih murah.

3.7. PRAKIRAAN INFLASI TRIWULAN III 2025

Inflasi Prov. Kaltara pada triwulan IV 2025 diprakirakan berada di dalam kisaran target inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Prakiraan tersebut terutama didorong oleh peningkatan inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sejalan dengan tekanan harga emas global yang masih tertahan tinggi, sehingga masih berpotensi meningkatkan harga emas perhiasan lebih lanjut. Peningkatan juga diprakirakan terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Hal tersebut seiring dengan momen HBKN Nataru yang secara historis menjadi puncak permintaan komoditas pangan serta pasokan yang menipis karena siklus pola tanam komoditas hortikultura di Kaltara pada akhir tahun yang masih pada fase tanam. Namun demikian peningkatan inflasi lebih yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan tekanan pada Kelompok Transportasi seiring dengan masuknya maskapai baru di Kaltara dengan tarif yang lebih murah pada Oktober 2025 serta insentif diskon angkutan udara dan angkutan laut di momen HBKN Nataru. Menghadapi berbagai risiko inflasi tersebut, KPwBI Provinsi Kaltara bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara konsisten berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga tekanan inflasi khususnya pada komoditas pangan strategis serta mendukung efektivitas program dan kegiatan GNPIP.



Pembiayaan Daerah Dan Pengembangan Akses Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh intermediasi perbankan. Penyaluran kredit tumbuh di atas level regional Kalimantan dan Nasional. Penyaluran kredit dalam bentuk kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing tumbuh 9,95% (yoy) dan 32,81% (yoy). Meningkatnya investasi sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi nasional dan Kaltara serta akselerasi beberapa proyek strategis. Realisasi investasi pada periode triwulan III 2025 sebesar Rp7,69 Triliun atau sebesar 20,39% dari target investasi 2025 yang ditetapkan sebesar Rp37,7 Triliun. Meningkatnya kredit modal kerja terjadi seiring optimisme masyarakat terhadap perekonomian, terutama pada sektor bisnis.



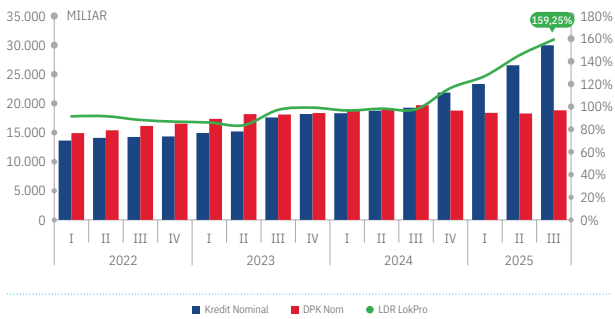
4.1. INTERMEDIASI DAN PERTUMBUHAN ASET PERBANKAN

Intermediasi perbankan Kalimantan Utara tumbuh naik. Rasio Loan to Deposit (LDR) berdasarkan lokasi proyek mencapai 159,25%, lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 145,31%. Kondisi ini menggambarkan aktivitas penyaluran kredit perbankan melampaui dana simpanan hal ini dilakukan guna mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara (Grafik IV.1).

Total aset perbankan pada triwulan III 2025 sebesar Rp19,74 Triliun terkontraksi 1,31% (yoy). Melambatnya pertumbuhan aset perbankan sejalan dengan melambatnya kinerja pemerintah dan investasi korporasi. Pertumbuhan aset perbankan di wilayah Kalimantan dan Nasional masing-masing tumbuh sebesar 6,24% (yoy) dan 10,18% (yoy) (Grafik IV.2).

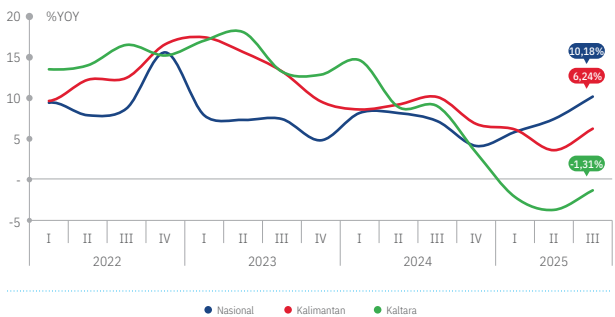
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terkontraksi sebesar 4,49% (yoy). Capaian tersebut melambat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh sebesar -4,35% (yoy) (Grafik IV.3). DPK melambat akibat terkontraksinya DPK Korporasi dan DPK Perorangan masing-masing sebesar 29,25% (yoy) dan 6,97% (yoy), namun DPK Pemerintah tumbuh sebesar 15,56% (yoy). Tumbuhnya DPK Pemerintah sejalan dengan realisasi anggaran yang masih rendah, sehingga dana pemerintah di perbankan belum terealisasi.

Grafik IV. 1 Perkembangan Intermediasi Perbankan



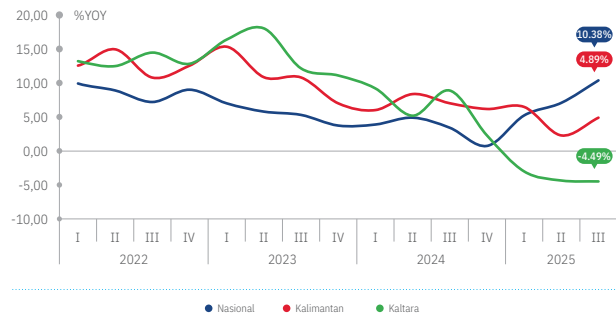
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 2 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 3 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional

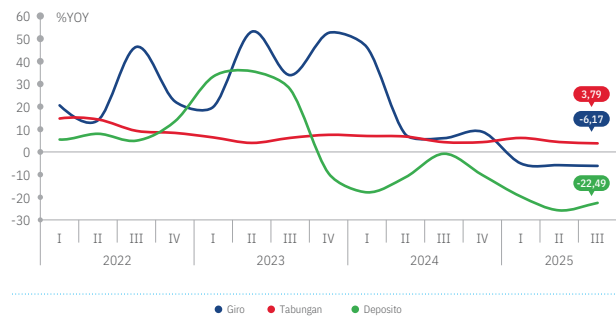


Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Secara nominal, total DPK mencapai Rp18,82 Triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp18,27 Triliun. DPK Deposito masih terkontraksi, tetapi tidak lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya menjadi sebesar 22,49% (yoy). Sementara itu, hanya DPK Tabungan yang tetap tumbuh sebesar 3,79% (yoy). Sementara itu, DPK Giro terkontraksi sebesar 6,17% (yoy) (Grafik IV.4). Hal ini sesuai dengan peralihan instrumen investasi masyarakat.

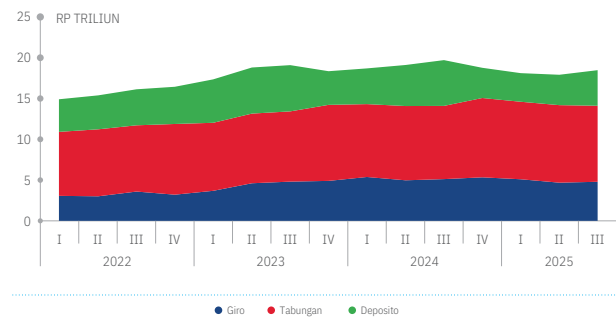
Berdasarkan jenisnya, tabungan masih menjadi pilihan utama simpanan nasabah dengan pangsa mencapai 50,49%, diikuti oleh simpanan giro sebesar 25,96% dan deposito dengan pangsa sebesar 23,55% (Grafik IV.5).

Grafik IV. 4 Perkembangan Pertumbuhan Komponen DPK Perbankan Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 5 Perkembangan Komponen DPK Perbankan Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel IV. I Perkembangan DPK secara spasial

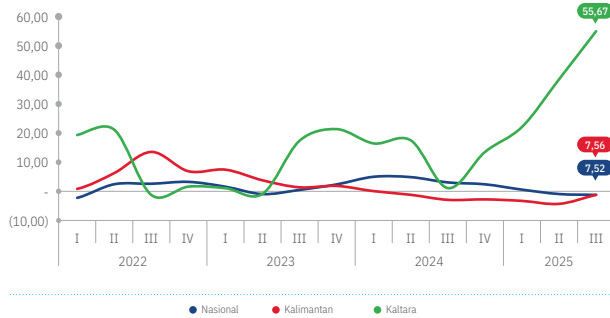
Kabupaten/Kota	Nominal DPK (Miliar Rp)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (% ,yoy)	
			II 2025	III 2025
Prov. Kaltara	18.822	100,00%	-4,35	-4,49
Bulungan	3.982	21,16%	-2,70	1,44
Nunukan	3.358	17,84%	2,11	4,05
Malinau	2.490	13,23%	31,83	9,78
Tana Tidung	938	4,98%	30,11	2,46
Tarakan	8.054	42,79%	-15,97	-14,05

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Secara spasial, pangsa DPK terbesar berasal dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan, masing-masing sebesar 42,79%, 21,16%, dan 17,84%. Pertumbuhan DPK kabupaten/kota secara keseluruhan mengalami penurunan, namun Kabupaten Nunukan mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding Kab/Kota lainnya sebesar (4,05%, yoy), sedangkan terendah di Kabupaten Tana Tidung (2,46%, yoy) (Tabel IV. 1).

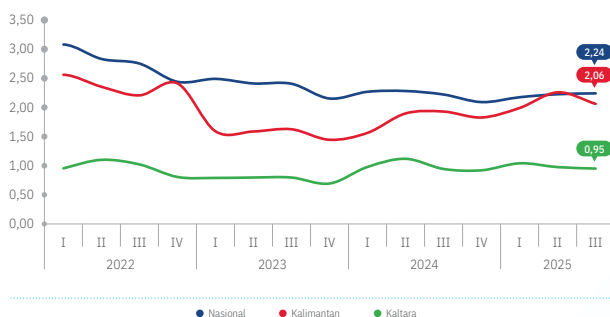
Kredit perbankan tumbuh terakselerasi sebesar 55,67% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi dan kredit modal kerja. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan kredit terjadi hampir di seluruh sektor terutama LU Listrik, Gas dan Air sebesar 829,44% (yoy), diikuti LU Pertambangan sebesar 484,69% (yoy) dan LU

Grafik IV. 6 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 7 Perkembangan NPL Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel IV. II Perkembangan Kredit Secara Spasial

Kabupaten/Kota	Nominal DPK (Miliar Rp)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (% ,yoy)	
			II 2025	III 2025
Prov. Kaltara	29.975	100,00%	41,53	55,67
Bulungan	14.395	48,02%	91,31	129,16
Nunukan	4.507	15,04%	-5,23	-3,04
Malinau	1.563	5,21%	2,90	0,42
Tana Tidung	440	1,47%	12,96	7,47
Tarakan	9.071	30,26%	38,37	42,62

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Industri Pengolahan sebesar 153,85% (yoy). Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) KIH di Kab. Bulungan mempercepat transformasi ekonomi hijau di Kalimantan Utara. Proyek ini menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk penyaluran kredit perbankan mulai dari investasi, modal kerja dan konsumsi. Pertumbuhan kredit secara nominal mencapai Rp29,97 Triliun lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp26,55 Triliun.

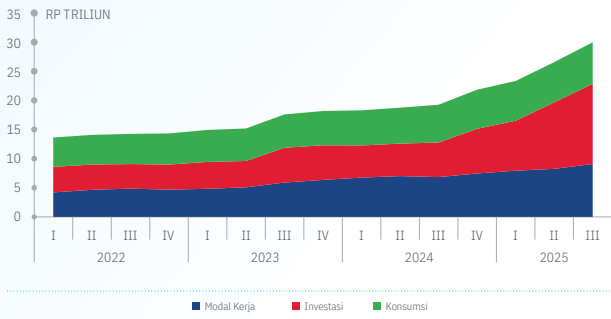
Di tengah meningkatnya pertumbuhan kredit, risiko kredit tetap terjaga tercermin dari Rasio *Non-Performing Loan (NPL)* sebesar 0,95%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 0,98%. NPL Kaltara pada periode triwulan III 2025 lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Kalimantan dan nasional masing-masing sebesar 2,06% dan 2,24% (Grafik IV.7). Rasio NPL yang rendah mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Secara spasial pangsa penyaluran kredit terbesar berasal dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan masing-masing sebesar 48,02%, 30,26%, dan 15,04%. Kredit di Kabupaten Bulungan mengalami kenaikan sebesar 129,16% (yoy), sedangkan Kabupaten Tana Tidung mengalami perlambatan pertumbuhan kredit sebesar 7,47% (yoy). Di sisi lain, kredit di Kabupaten Nunukan masih mengalami kontraksi sebesar 3,04% (yoy) (Tabel IV. 2). Tumbuhnya penyaluran kredit di Kabupaten Bulungan sejalan dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) KIH di Tanah Kuning.

4.2. PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan penyaluran kredit berasal dari kredit peningkatan investasi menjadi sebesar 131,75% (yoy) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 104,58% (yoy) (Grafik IV. 9). Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas LU Listrik, Gas dan Air (LGA), LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan. Peningkatan LU LGA ini sejalan dengan PSN KIH yang ada di Kaltara sehingga memicu investasi konstruksi pembangkit listrik. Kemudian, adanya pembangunan industri pengolahan SDA di KIH memberi dampak pada peningkatan pembiayaan di

Grafik IV. 8 Perkembangan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara



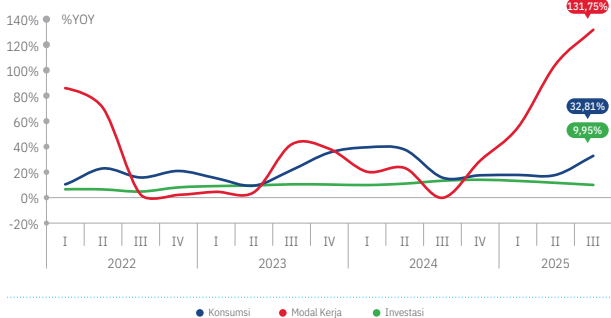
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

sektor industri pengolahan utamanya manufaktur. Berdasarkan komposisinya, kredit investasi memiliki pangsa terbesar mencapai 45,97%, disusul oleh kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 30,27% dan 23,76%. (Grafik IV.8)

Secara nominal, penyaluran kredit didominasi oleh kredit di atas Rp5 miliar dan Rp100Jt-Rp500Jt. Pangsa kredit terbesar adalah kredit di atas Rp5 miliar sebesar 60,16%, naik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 55,94%. Pangsa penyaluran kredit dengan nilai Rp100Jt-Rp500Jt mengalami penurunan menjadi sebesar 22,33% tetap tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 24,70%. Jika dilihat berdasarkan jumlah rekening, penyaluran kredit mayoritas diberikan kepada debitur dengan nominal kredit Rp100 juta ke bawah dengan pangsa sebesar 84,92% (Tabel IV. 3).

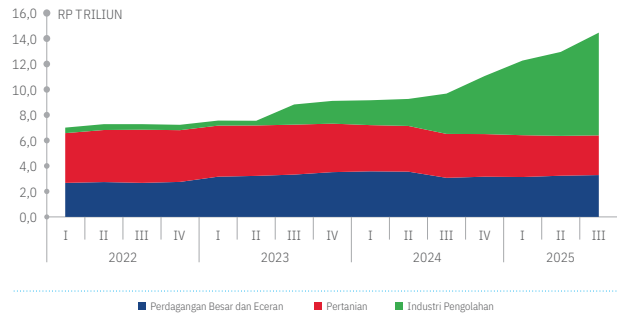
Secara sektoral, pangsa penyaluran kredit didominasi oleh LU Industri Pengolahan yang mencapai 26,89% dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 24,80%. Pangsa kredit terbesar selanjutnya yaitu LU Listrik, Gas, dan Air sebesar 14,47% lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 11,42%. LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 10,93%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 12,18%. (Grafik IV.10). Dominasi penyaluran kredit di sektor Industri Pengolahan didukung oleh adanya pembangunan industri manufaktur PSN KIH di Tanah Kuning.

Grafik IV. 9 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 10 Perkembangan Kredit Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan kredit pada periode berjalan turut didorong oleh peningkatan pertumbuhan kredit pada LU Listrik, Gas dan Air dan LU Industri Pengolahan yang tumbuh masing-masing sebesar 829,44% (yoy) dan 153,85% (yoy). Peningkatan kredit ke sektor dimaksud didorong oleh terus berlanjutnya pembangunan proyek strategis di Provinsi Kalimantan Utara yakni proses Pembangunan KIH di Tanah Kuning. Proses pembangunan ini berdampak pada pembiayaan karena pada tahap ini merupakan fase awal proyek atau fase pembiayaan. Pada fase ini, investor memulai dari proses pengadaan konstruksi, mesin, logistik, dan akses energi. Pertumbuhan penyaluran kredit pada LU Listrik, Gas dan Air dan LU Industri Pengolahan tersebut diimbangi dengan risiko kredit yang rendah dan terkendali sebagaimana tercermin dari rasio NPL yang rendah masing-masing sebesar 0,001% dan 0,06%.

Tabel IV. III Klasifikasi Penyaluran Kredit Kaltara Berdasarkan Nilai

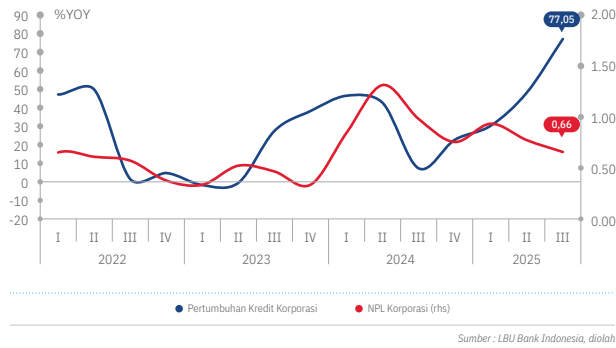
Kredit	Nominal Kredit (Milyar)	% Nominal	Jumlah Rekening	% Rekening
<100 JT	2.368,22	7,90%	211.429	84,92%
>100JT - 500JT	6.694,25	22,33%	34.406	13,82%
>500JT - 1 M	1.064,35	3,55%	1.898	0,76%
1M-5M	1.814,28	6,05%	1.036	0,42%
>5M	18.033,62	60,16%	211	0,08%
Total	29.974,72	100,00%	248.980	100,00%

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

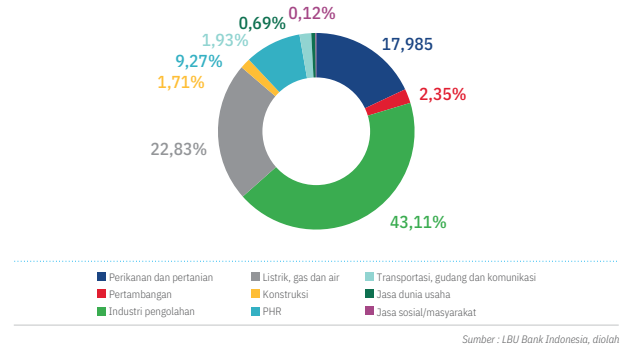
4.3. PEMBIAYAAN SEKTOR KORPORASI

Pembiayaan korporasi triwulan III 2025 naik menjadi sebesar 77,05% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 48,11%. (Grafik IV.11). Akselerasi kredit korporasi terjadi seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan serta LU Listrik, Gas, dan Air. Akselerasi kredit pada LU industri pengolahan khususnya terjadi pada subsektor kayu olahan sejalan dengan pengembangan pabrik kertas di Kaltara. Sementara itu, akselerasi penyaluran kredit pada LU listrik, gas, dan air utamanya terjadi pada subsektor listrik yakni proses Pembangunan KIH di Tanah Kuning. Berdasarkan strukturnya, mayoritas kredit korporasi ditujukan kepada LU Industri

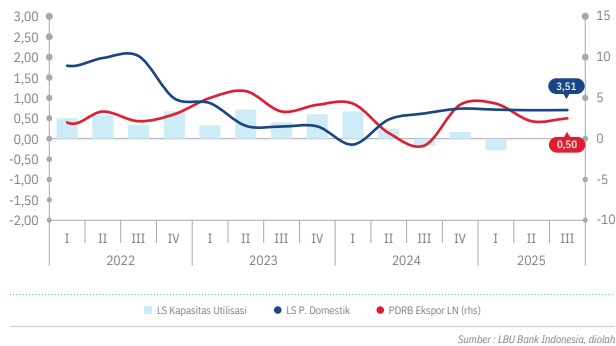
Grafik IV. 11 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltara



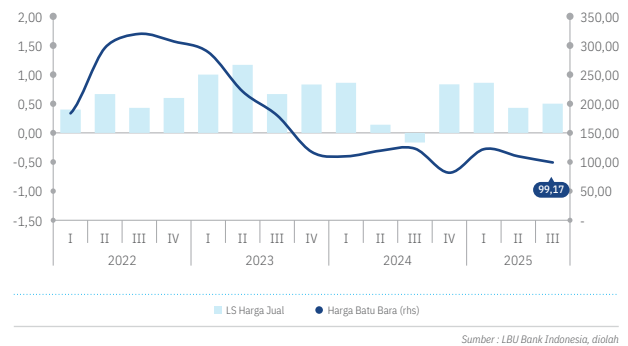
Grafik IV. 12 Pangsa Kredit Korporasi



Grafik IV. 13 LS Kap. Utilisasi, LS P. Domestik dan PDRB Ekspor LN (RHS)



Grafik IV. 14 LS Harga Jual dan Harga Batu bara



Pengelolaan (43,11%); diikuti dengan sektor Listrik, Gas dan Air (LGA) (22,83%); dan sektor Pertanian dan Perikanan (17,98%) (Grafik IV.12).

Risiko kredit korporasi Kaltara terkendali dan berada pada level yang rendah. Pada triwulan III 2025, NPL korporasi hanya sebesar 0,66% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,77%. *Non Performing Loan* korporasi pada sejumlah sektor utama yaitu Konstruksi mulai melambat menjadi sebesar 14,69%, lebih tinggi daripada periode sebelumnya sebesar 12,48%. Melambatnya kredit konstruksi sejalan dengan finalisasi proyek konstruksi bernilai besar di Kaltara, antara lain Proyek Pembangkit Listrik dan Industri Pengolahan.

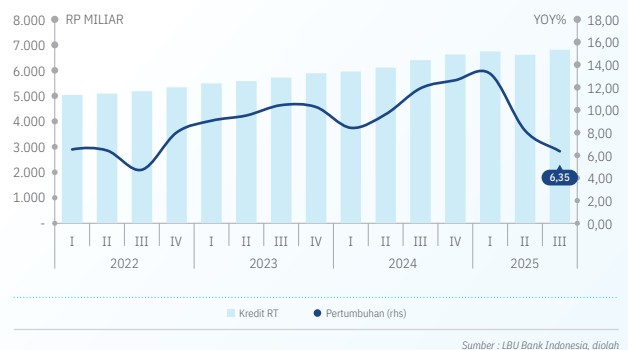
Sejalan dengan kredit kepada korporasi yang menunjukkan peningkatan, kinerja korporasi terpantau membaik. Berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia, secara agregat *Likert Scale (LS)* kapasitas utilisasi dan permintaan domestik relatif stagnan di tengah harga batu bara yang cenderung stabil (Grafik IV.13 dan IV.14).

4.4. PEMBIAYAAN SEKTOR RUMAH TANGGA

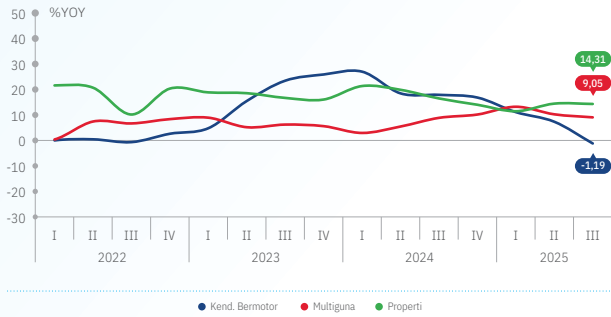
Kredit konsumsi kepada Rumah Tangga mengalami perlambatan sebesar 6,35% (yoy), hal tersebut tercermin oleh menurunnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan berkurangnya permintaan dan mobilitas masyarakat.

Melemahnya pertumbuhan kredit konsumsi tersebut utamanya didorong oleh menurunnya kredit properti dari sebesar 14,44% (yoy) menjadi sebesar 14,31% (yoy). Ditambah lagi, kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor (KKB) mengalami perlambatan masing-masing sebesar 9,05% (yoy) dan -1,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 10,25% (yoy) dan 7,33% (yoy) (Grafik IV.16). Perlambatan kredit multiguna dan KKB diperkirakan sejalan dengan menurunnya konsumsi masyarakat yang berakibat pada pilihan masyarakat yang memilih konsumsi jangka pendek dan berhati-hati dalam memilih aset jangka panjang. Pada triwulan laporan, berdasarkan komposisi, kredit Rumah Tangga masih

Grafik IV. 15 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara

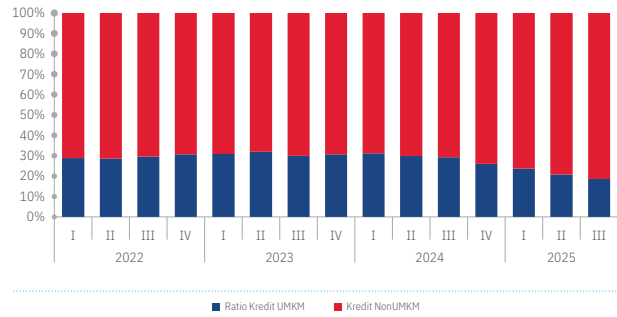


Grafik IV. 16 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara Berdasarkan Jenisnya



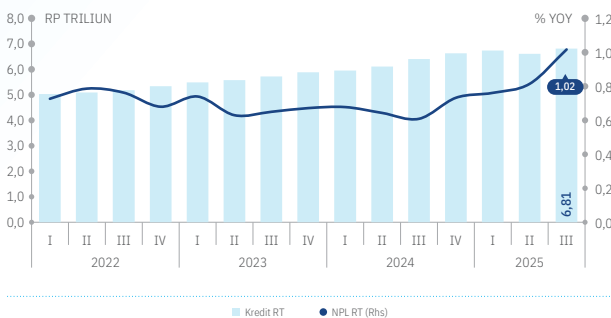
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 18 Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltara



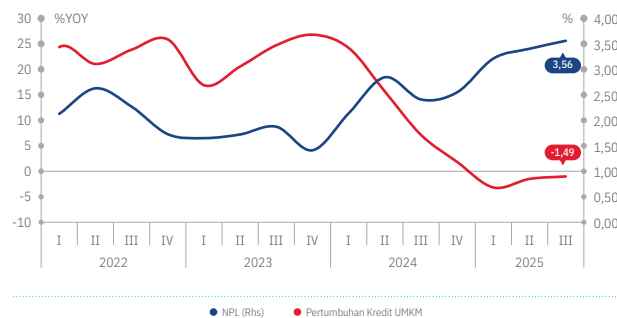
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 17 Perkembangan Kredit Rumah Tangga dan NPL RT Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 19 Perkembangan Kredit UMKM Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

didominasi oleh kredit multiguna dengan pangsa mencapai 74,22% diikuti oleh Properti sebesar 16,60%, dan KKB sebesar 3,59%.

Meskipun kredit terus tumbuh akseleratif, namun rasio NPL kredit Rumah tangga di Kaltara terjaga di level yang rendah. Rasio NPL kredit Rumah Tangga masih berada pada level yang rendah dan tercatat sebesar 1,02%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,81% namun masih jauh bawah ambang batas risiko (*threshold*) kredit sebesar 5%. (Grafik IV.17). Cukup stabilnya NPL rumah tangga pada level rendah didukung oleh kemampuan bayar RT Kaltara yang masih cukup baik, hal ini terindikasi dari NTP yang masih terjaga pada level tinggi, yakni sebesar 116,19 pada September 2025.

4.5. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM

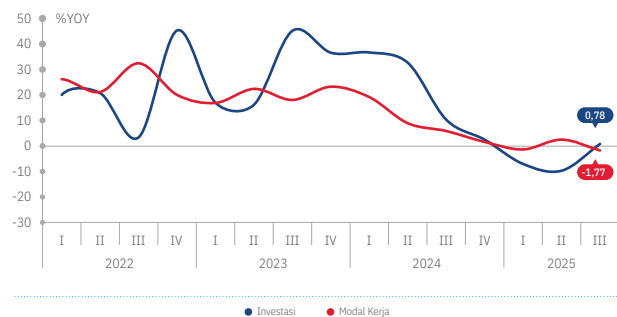
Rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total pembiayaan triwulan III 2025 mengalami perlambatan menjadi sebesar 18,62%, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 20,80% (Grafik IV.18).

Penyaluran kredit UMKM pada triwulan laporan mengalami kontraksi utamanya dari jenis kredit investasi. Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terkontraksi sebesar 1,01% (yoy) (Grafik IV.19). Kredit modal kerja terkontraksi sebesar

1,77% (yoy). Kemudian, Kredit UMKM mengalami peningkatan, terutama didorong oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 0,78% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih terkontraksi sebesar 9,73% (yoy) (Grafik IV. 20).

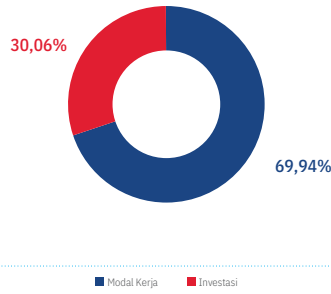
Berdasarkan pangsa jenis penggunaannya, pangsa Kredit UMKM masih didominasi modal kerja yaitu sebesar 69,94% sedangkan investasi sebesar 30,06% (Grafik IV.21). Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM masih didominasi oleh keperluan operasional. UMKM yang baru beroperasi 1-2 tahun umumnya memfokuskan pembiayaan pada kebutuhan operasional harian, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, ongkos distribusi, dan sewa tempat usaha. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan untuk investasi

Grafik IV. 20 Perkembangan Kredit UMKM Kaltara Berdasarkan Jenisnya



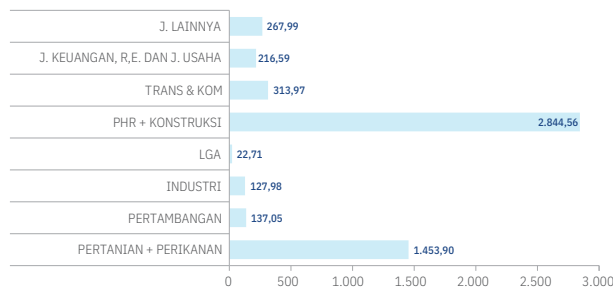
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 21 Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 22 Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara

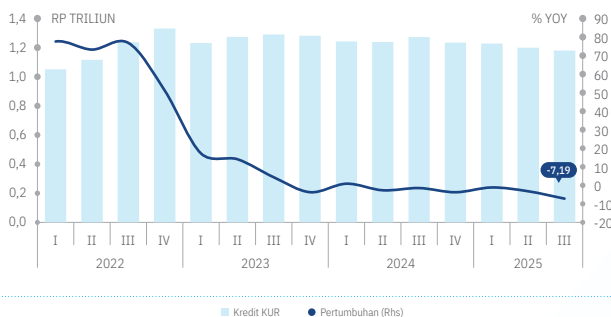


Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

umumnya masih dipenuhi melalui modal sendiri maupun pinjaman dari lembaga keuangan non-bank dan pihak non-lembaga keuangan. Jika berdasarkan Lapangan Usaha (LU), kredit UMKM paling besar disalurkan ke LU Perdagangan Hotel Restoran (PHR) mencapai 50,97% dari total kredit UMKM, diikuti oleh Pertanian dan Perikanan yang mencapai 26,05% dari total kredit UMKM. (Grafik IV.22)

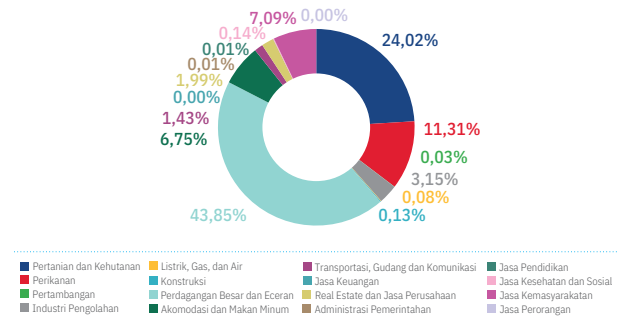
Peningkatan penyaluran Kredit kepada UMKM sejalan dengan LU Pertanian yang tumbuh dari sebesar 3,50% (yoy) pada triwulan II 2025 menjadi sebesar 4,70% (yoy) pada triwulan III 2025. Meskipun kredit UMKM total mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa LU kredit UMKM yang mencatatkan penurunan dibandingkan periode triwulan sebelumnya.

Grafik IV. 23 KUR Kaltara



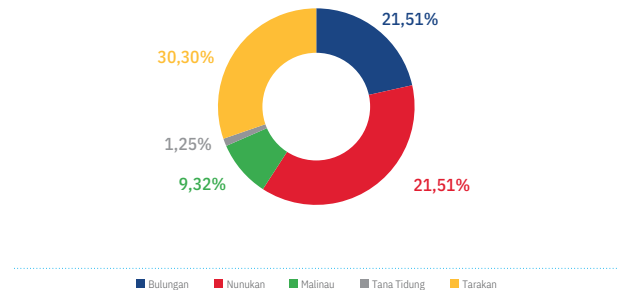
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 24 Komposisi KUR Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 25 Komposisi KUR Berdasarkan Kab/Kota di Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Melambatnya pertumbuhan kredit yang signifikan terjadi pada UMKM sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 22,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 155,80% (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM ke LU Industri pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 16,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 0,43% (yoy).

Risiko kredit UMKM meningkat berasal dari NPL kredit investasi. Pada triwulan III 2025, rasio NPL kredit UMKM relatif rendah sebesar 3,56%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,40%. Berdasarkan jenis penggunaan, NPL Kredit Modal Kerja sebesar 3,96% sedangkan NPL Kredit Investasi sebesar 9,21%. Sementara itu berdasarkan lapangan usaha, kenaikan juga terjadi pada LU Pertanian dan LU LGA yang masing-masing sebesar 17,25% dan 21,35%.

Bank Indonesia berupaya memperkuat penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Ketentuan ini mengatur pemberian Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan pada sektor-sektor prioritas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian Rasio Pembiayaan

Tabel IV. 4 Akses Keuangan UMKM Binaan dan Mitra KPw BI Provinsi Kalimantan Utara

Jenis Usaha	Keterangan	Jumlah Usaha Binaan BI		Pinjaman (Rupiah)		Keterangan
		II 2025	III 2025	II 2025	III 2025	
Non Pertanian	Kota Tarakan	8	8	Rp783.500.000	Rp808.515.000	Perbankan
	Kabupaten Bulungan	2	2	Rp195.500.000	Rp171.000.000	Perbankan
	Kabupaten Malinau	3	3	Rp408.000.000	Rp396.000.000	Perbankan
Pertanian	Kota Tarakan	1	1	Rp-	Rp-	Perbankan
	Kabupaten Bulungan	2	2	Rp-	Rp-	
	Kabupaten Malinau	1	1	Rp-	Rp28.000.000	Perbankan
Total		17	17	Rp1.387.000.000	Rp1.403.515.000	

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Inklusif Makroprudensial (RPIM) serta pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro (Umi). Melalui implementasi kebijakan tersebut, Bank Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan peran perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif, khususnya pembiayaan UMi di berbagai daerah.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan berkontraksi sebesar 7,19% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 3,22% (yoy). Nominal penyaluran KUR mencapai sebesar Rp1,180 Triliun, lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada triwulan II 2025 sebesar Rp1,199 Triliun. (Grafik IV.23).

Berdasarkan komposisi, sektor terbesar penerima KUR adalah perdagangan besar dan eceran dengan pangsa mencapai 43,85% diikuti oleh sektor pertanian dan kehutanan sebesar 24,02%, dan perikanan sebesar 11,31% (Grafik IV.24). Secara spasial, pangsa penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 37,63%, diikuti oleh Kota Tarakan yang mencapai 30,30%, dan Kabupaten Bulungan mencapai 21,51%. (Grafik IV.25).

Dalam upaya mendorong UMKM berbasis ekonomi lokal agar menjadi kekuatan baru bagi perekonomian daerah, Bank Indonesia menerapkan strategi pengembangan UMKM secara *end-to-end* melalui percepatan pemanfaatan teknologi digital serta perluasan akses UMKM terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan. Strategi tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan pada tiga pilar utama Strategi Nasional Pengembangan UMKM, yakni korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan.

Terdapat 17 usaha yang terdaftar menjadi UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara yang terbagi menjadi 13 usaha non pertanian dan 4 usaha pertanian. Jumlah pembiayaan yang didapatkan oleh UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,19% (yoy) menjadi sebesar Rp1,40 miliar dari sebelumnya Rp1,39 miliar. Secara spasial, pembiayaan UMKM binaan Bank Indonesia terbesar di Kota Tarakan sebesar Rp808,5 juta, diikuti Kabupaten Malinau sebesar Rp424,0 juta, dan Kabupaten Bulungan sebesar Rp171,0 juta. (Tabel IV.4).

BOKS 2

Pemasaran UMKM Melalui *Onboarding* UMKM DigitalPerluasan Pemasaran UMKM Melalui *Onboarding* UMKM Digital

Tarakan, 8 September 2025

KPwBI Provinsi Kalimantan Utara bersama mitra strategis dalam hal ini Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan *Onboarding* UMKM Digital 2025. *Onboarding* UMKM Digital dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal melalui platform digital. Acara ini diikuti oleh lebih dari 100 pengusaha UMKM dari berbagai sektor unggulan, seperti kuliner, kerajinan, dan produk olahan khas Kaltara. Kemudian diseleksi menjadi Top 50 untuk mengikuti kurasi oleh *expertise* hingga dipilih kembali menjadi 30 UMKM untuk mendapatkan pendampingan secara intensif.

Kegiatan pembukaan *Onboarding* UMKM Digital dilaksanakan pada 8 September 2025 di Kantor Perwakilan

BI Provinsi Kaltara. Pembukaan dihadiri oleh Kepala BI Provinsi Kaltara, Bapak Hasiando G. Manik, Staf Ahli Gubernur bidang Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Ibu Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP dan Kepala Disperindagkop UKM Provinsi Kaltara, Ibu Dr. Hj. Hasriyani, M.Si. Program ini dilaksanakan untuk menjawab tantangan pemasaran UMKM di era digital dan mendukung visi inklusi keuangan serta transformasi ekonomi daerah.

Pada kegiatan ini, peserta mendapatkan pendampingan langsung untuk membuat akun di platform digital dan mengoptimalkan fitur promosi. Staf Ahli Kaltara menyampaikan, “UMKM Kaltara akan lebih mandiri jika dibekali pelatihan intensif dan pengetahuan tentang pemanfaatan marketplace dan *social commerce*, strategi branding dan pemasaran digital”.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltara menegaskan, “digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan agar UMKM mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM Kaltara dapat memperluas jaringan pemasaran hingga tingkat nasional, meningkatkan literasi digital, dan mendukung target inklusi keuangan”. Melalui program ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan UMKM melalui digitalisasi, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas usaha.





QRIS QR Code Standar
Pembayaran Nasional

COFFEKOPID
NMD: 1D035A27501A04

A01

SAITU ORANG LAINYA BEMBAK
Dan aplikasi pembayaran
di www.coffekopid.id

Ditandatangani oleh: 15800014
Versi: 0.0001.00.17

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah



Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai maupun nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mengalami perlambatan dari sisi volume dibandingkan triwulan sebelumnya. Aliran uang kartal mencatatkan net inflow sesuai dengan pola siklikalnya. Distribusi Uang Layak Edar (ULE) terus dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai implementasi Clean Money Policy (CMP) yang diiringi internalisasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat. Dari sisi digitalisasi, jumlah pengguna dan merchant QRIS terus meningkat sejalan dengan edukasi dan implementasi QRIS ke berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan data Indeks ETPD Semester I Tahun 2025, seluruh wilayah di Kalimantan Utara menunjukkan kinerja yang solid dalam transformasi digital pemerintahan daerah, dengan capaian seluruhnya berada pada tahap Digital.

5.1 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Volume transaksi SKNBI di Kalimantan Utara pada Triwulan III 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar -9,92% (yoy), turun dari 23.546 transaksi pada Triwulan III 2024 menjadi 21.210. Namun demikian, volume transaksi secara triwulanan mengalami 23,53% dari 17.170 transaksi pada Triwulan II 2025 menjadi 21.210 pada Triwulan III 2025 (Grafik V.2).

Sementara itu, nominal transaksi SKNBI pada Triwulan III 2025 mengalami kontraksi sebesar -15,99% (yoy), melanjutkan perlambatan yang terjadi pada Triwulan II 2025 sebesar -14,17% (yoy). Meskipun tekanan tahunan masih berlanjut, secara triwulanan nominal transaksi SKNBI menunjukkan kenaikan, di mana nilai transaksi pada Triwulan III 2025 mencapai Rp1,07 Triliun, meningkat dibandingkan Triwulan II 2025 yang tercatat sebesar Rp901 miliar (Grafik V.1). Perlambatan ini sejalan dengan berkembangnya preferensi pembayaran oleh masyarakat dan pelaku usaha yang semakin banyak beralih ke instrumen pembayaran lain seperti dompet digital, *mobile banking*, dan BI-FAST, yang menawarkan biaya lebih rendah dan proses penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan mekanisme kliring konvensional.

Pada Triwulan III 2025, transaksi BI-RTGS di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan perlambatan baik dari sisi

nominal maupun volume. Nominal transaksi tercatat sebesar Rp2,80 miliar, terkontraksi -24,93% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, volume transaksi juga mengalami penurunan signifikan, tercatat sebanyak 1.789 transaksi atau turun -24,16% (yoy). Perlambatan ini mencerminkan semakin kuatnya pergeseran preferensi pelaku ekonomi menuju instrumen pembayaran yang lebih cepat, mudah, dan berbiaya rendah, termasuk BI-FAST, sejalan dengan arah transformasi sistem pembayaran dalam BSPI 2019–2024 dan BSPI 2025–2030.

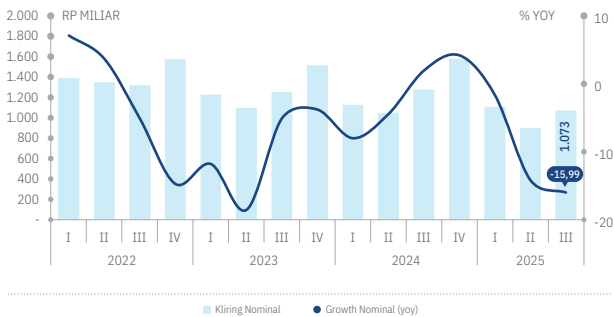
5.2 PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aliran Uang Masuk/Keluar (Outflow/Inflow)

Transaksi perkasas Bank Indonesia pada Triwulan III 2025 mencatat net outflow sebesar Rp418,12 miliar. Perkembangan ini berlawanan dengan kondisi triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow*. *Net outflow* tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan uang kartal di masyarakat.

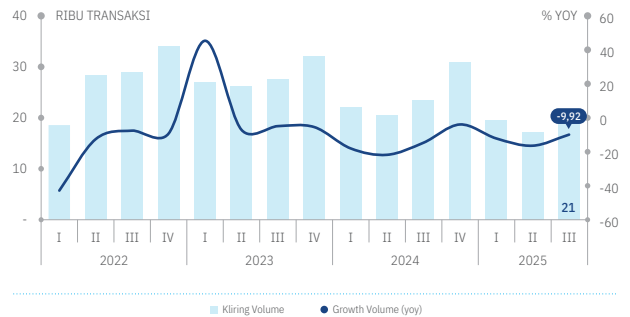
Uang Pecahan Besar (UPB) yaitu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, masih menjadi denominasi yang paling dominan dalam aliran uang kartal di KPwBI Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan III 2025, baik dari sisi *outflow* maupun *inflow*.

Grafik V. 1 Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kaltara



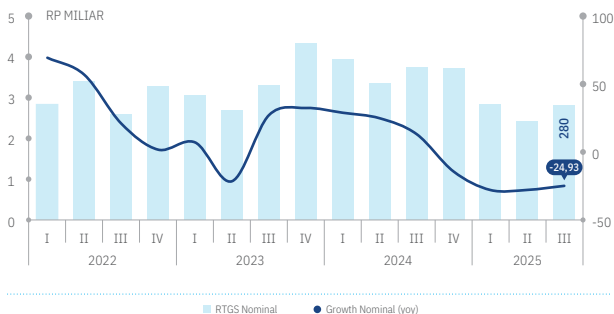
Sumber : Bank Indonesia

Grafik V. 2 Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kaltara



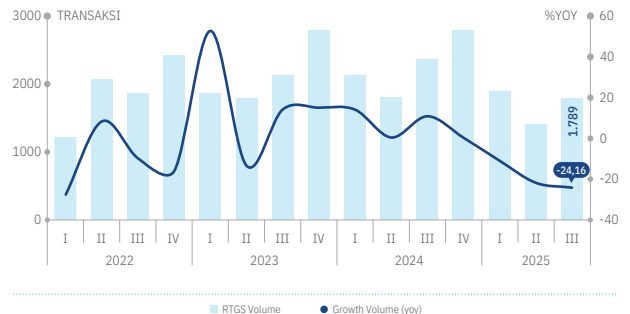
Sumber : Bank Indonesia

Grafik V. 3 Perkembangan Nominal BI-RTGS Kaltara



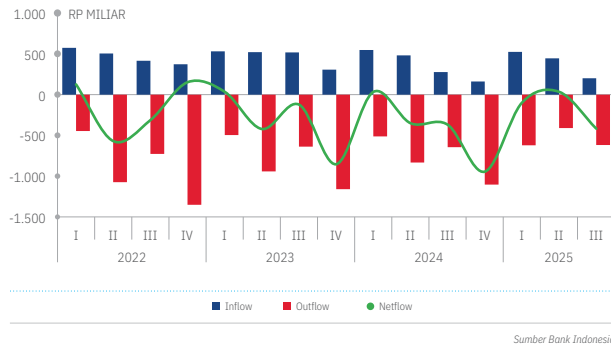
Sumber : Bank Indonesia

Grafik V. 4 Perkembangan Volume BI-RTGS Kaltara

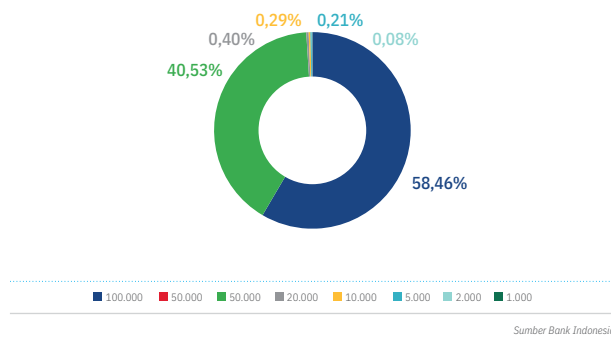


Sumber : Bank Indonesia

Grafik V. 5 Perkembangan Aliran Uang Keluar/Masuk



Grafik V. 6 Denominasi Outflow Uang Kartal Kaltara Triwulan III 2025



Dari sisi *outflow* uang kertas, pecahan Rp100.000 kembali menjadi pecahan dengan distribusi terbesar, mencapai Rp362,048 miliar atau 58,46% dari total *outflow* uang kertas. Pecahan Rp50.000 juga mencatat kontribusi signifikan dengan nilai Rp251,01 miliar atau 40,53%, sehingga kedua pecahan besar ini secara kumulatif mendominasi hampir seluruh arus distribusi uang kartal dari Bank Indonesia ke perbankan.

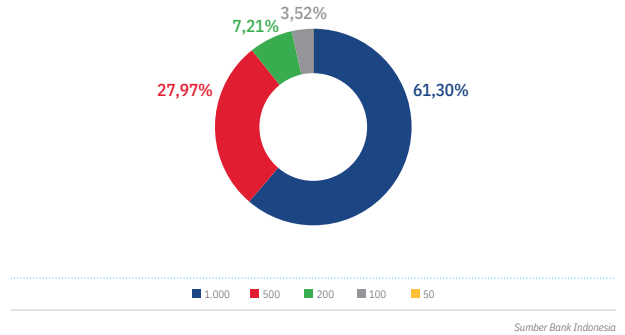
Dari sisi *inflow*, pecahan besar juga masih mendominasi. Pecahan Rp50.000 tercatat dengan nilai Rp102,12 miliar atau 50,69%, diikuti pecahan Rp100.000 yang mencapai Rp90,59 miliar atau 44,97%. Kedua pecahan ini kembali menjadi kontributor utama arus *inflow* uang kertas sepanjang Triwulan III 2025 (Grafik V.8).

Khusus untuk Uang Logam (UL), pecahan Rp1.000 mendominasi arus outflow dengan nilai Rp160 juta atau 61,30%. Outflow pecahan Rp500 tercatat sebesar Rp73,01 juta atau 27,97% dari keseluruhan *outflow* UL, sementara pecahan lainnya berkontribusi relatif kecil (Grafik V.7).

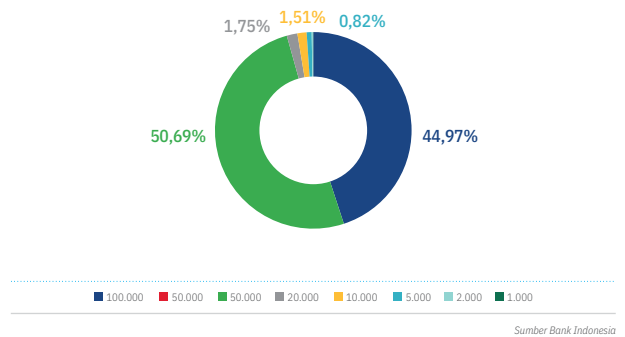
Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)

Dalam rangka mengendalikan peredaran uang kartal serta memastikan uang yang beredar di masyarakat berada dalam kondisi baik dan cukup, KPwBI Provinsi Kaltara terus melakukan

Grafik V. 7 Denominasi Outflow Uang Logam Kaltara Triwulan III 2025



Grafik V. 8 Denominasi Inflow Uang Kartal Kaltara Triwulan III 2025



penyediaan Uang Layak Edar (ULE) melalui perbankan di seluruh Provinsi Kalimantan utara. Selain itu, KPwBI Kaltara juga melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari masyarakat. Beberapa kegiatan pendukung Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar di antaranya melalui kegiatan Kas Keliling dan Kas Titipan yang tersebar hampir di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Kas Keliling

Salah satu layanan kas luar kantor yang dilakukan oleh KPwBI Kaltara adalah Kas Keliling yaitu kegiatan penukaran uang oleh unit kerja operasional kas kepada masyarakat, bank, atau pihak lain dengan menggunakan sarana angkutan. Kas keliling dibagi menjadi 2 (dua) layanan yaitu kas keliling dalam kota dan kas keliling luar kota. Kas keliling dalam kota merupakan kegiatan layanan kas luar kantor untuk melayani penukaran kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi oleh bank umum.

Kas Keliling Dalam Kota (KKDK)

Kegiatan Kas Keliling Dalam Kota (KKDK) di Kota Tarakan sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 10 kali, sesuai dengan sebaran titik lokasi di empat wilayah kecamatan utama. Wilayah kegiatan KKDK mencakup Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Timur, Tarakan Tengah, dan Tarakan Utara.

Kas Keliling Luar Kota (KKLK)

Layanan kas keliling turut juga dilakukan di luar kota dengan tujuan menjangkau masyarakat Provinsi Kaltara yang berada di luar wilayah Kota Tarakan seperti wilayah Kecamatan Sebatik dan Seimenggaris.

Kas Titipan

KPwBI Provinsi Kaltara memiliki 3 (tiga) Kas Titipan yang berlokasi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Pengelolaan kas titipan (Kastip) tersebut dilakukan oleh kantor cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara (BPD Kaltimtura). Untuk Kastip di Tanjung Selor, BPD Kaltimtura cabang Tanjung Selor bekerjasama dengan 6 (enam) bank peserta lainnya (Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Danamon) mengedarkan Uang Layak Edar (ULE) hingga daerah terpencil. Sementara itu, untuk Kastip di Kab. Malinau, BPD Kaltimtura cabang Malinau mengelola kas titipan Bank Indonesia bersama dengan 3 (tiga) bank peserta yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Untuk Kastip di Kab. Nunukan, BPD Kaltimtura cabang Nunukan bekerjasama dengan 4 (empat) bank peserta mengelola kas titipan Bank Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

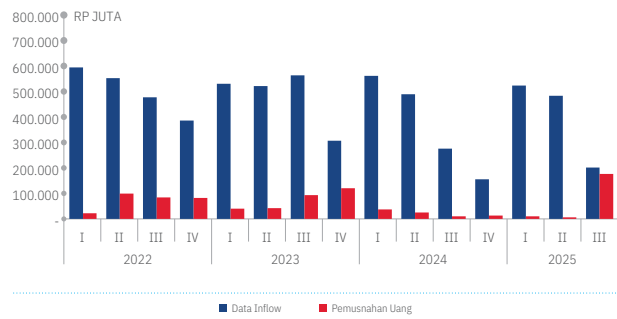
Selama Triwulan III 2025, KPwBI Provinsi Kaltara telah melakukan proses dropping ke Kas Titipan Bank Indonesia pada tiga wilayah, yaitu Tanjung Selor, Malinau, dan Nunukan, dengan total nominal sebesar Rp223,19 miliar, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp173,99 miliar.

Penarikan Uang Tidak Layak Edar dan Pemusnahan Uang Rupiah

Selain memenuhi kebutuhan penukaran Uang Layak Edar (ULE), uang yang ditukarkan oleh masyarakat di KPwBI Provinsi Kalimantan Utara juga mencakup Uang Tidak Layak Edar (UTLE), meliputi uang rusak, lusuh, cacat, serta uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Dalam rangka menjaga kualitas uang beredar (clean money policy), KPwBI Provinsi Kaltara secara rutin melakukan pemusnahan UTLE yang diterima dari perbankan maupun masyarakat umum melalui layanan penukaran dan kas keliling.

Pada Triwulan III 2025, nilai UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp176,14 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp6,31 miliar. Rasio pemusnahan UTLE terhadap inflow pada Triwulan III 2025 mencapai 87,42%, jauh lebih tinggi dibandingkan Triwulan II 2025 yang sebesar 1,31% (qtq).

Grafik V. 9 Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)



Sumber Bank Indonesia

Rasio pemusnahan UTLE terhadap inflow memiliki dua makna penting yaitu, pertama, Bank Indonesia berhasil menjaga tingkat kelayakan uang beredar di masyarakat melalui upaya penarikan UTLE. Pemusnahan UTLE ini memberi makna bahwa Bank Indonesia terus berusaha untuk memproses dan mengedarkan kembali Uang Rupiah sebagai alat pembayaran tunai yang layak edar. Dalam proses penarikan dan pemusnahan UTLE, Bank Indonesia senantiasa memerhatikan kebutuhan dan ketersediaan uang kartal layak edar di Provinsi Kaltara sehingga masyarakat Kaltara dapat merasakan kenyamanan dan kepercayaan dalam menggunakan uang tunai dalam transaksi sehari-hari.

Temuan Uang Palsu (UPAL)

Selama periode Triwulan III 2025, terdapat temuan Uang Palsu (UPAL) pada pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Upaya tersebut juga ditopang melalui peningkatan edukasi CBP Rupiah kepada masyarakat serta penguatan kerja sama dengan perbankan, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal), perangkat masyarakat di daerah, dan stakeholders terkait lainnya.

Cinta, Bangga, Paham Rupiah

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap rupiah, KPwBI Provinsi Kaltara senantiasa melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan aparaturnegara yang terdiri dari lembaga pendidikan, komunitas, perangkat kecamatan/ kelurahan/desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri keaslian Uang Rupiah dengan slogan Cinta, Bangga, Paham Rupiah. KPw BI Provinsi Kaltara telah melaksanakan berbagai sosialisasi dan edukasi mengenai CBP Rupiah kepada berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari sektor pendidikan, sektor masyarakat, hingga sektor komunitas strategis. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan pengetahuan mengenai CBP Rupiah, mulai dari pengenalan ciri keaslian Rupiah hingga mekanisme penukaran uang rusak dapat semakin dipahami oleh masyarakat.

5.3 PERKEMBANGAN QRIS

Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai salah satu kanal pembayaran non tunai di wilayah Kalimantan Utara terus menunjukkan peningkatan seiring dengan perluasan ekosistem dan edukasi transaksi digital. Hingga Triwulan III 2025, jumlah penduduk Kaltara yang telah menggunakan QRIS mencapai 127.361 pengguna, meningkat dari 124.927 pengguna pada Triwulan II 2025 atau bertambah sebanyak 2.434 pengguna atau 1,95% (qtq). Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal untuk mendukung berbagai aktivitas transaksi sehari-hari.

Dalam rangka memperluas penggunaan QRIS secara merata, KPw BI Kaltara melakukan upaya perluasan edukasi penggunaan QRIS ke berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai program maupun kolaborasi kegiatan dengan *stakeholders* lainnya.

Peningkatan jumlah pengguna QRIS di wilayah Kaltara diikuti oleh meningkatnya jumlah *merchant* QRIS yang tercermin pada kenaikan *National Merchant Repository (NMR)* pada Triwulan III 2025. Hingga September 2025, jumlah *merchant* QRIS di Kaltara tercatat 103.774 *merchant*, dengan total penambahan 8.405 *merchant* sejak awal tahun, mengindikasikan terus meluasnya akseptasi QRIS di berbagai sektor usaha.

Distribusi *merchant* QRIS di Kaltara masih terpusat di Kota Tarakan dengan jumlah *merchant* terbanyak sebesar 40.767 *merchant* atau 39,28% dari total NMR. Kabupaten Nunukan dan Bulungan menyusul dengan pangsa masing-masing 25,43% dan 24,13%, mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan perdagangan di kedua wilayah tersebut.

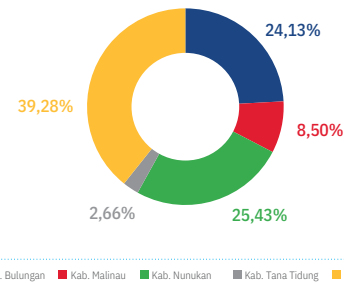
Sementara itu, Kabupaten Malinau dan Tana Tidung mencatat pangsa yang lebih kecil, masing-masing sebesar 8,50% dan 2,66%. Meskipun kontribusinya relatif lebih rendah, kedua kabupaten tersebut tetap menunjukkan pertumbuhan *merchant* sepanjang 2025, sejalan dengan upaya KPwBI Kaltara memperluas akseptasi pembayaran digital ke wilayah perbatasan dan pedesaan.

Tabel V.1 Perkembangan NMR Provinsi Kaltara

Wilayah	NMR Selama 2022 (Jan - Des 2022)	NMR Selama 2023 (Jan-Des 2023)	NMR Selama 2024 (Jan-Des 2024)	NMR Kumulatif 2025 (Jan-Sep 2025)	NMR Kumulatif 2019 - 2025*	Share Prov (Per 2025*)
Kota Tarakan	12.052	8.668	7.666	(2.880)	4.0767	39,28%
Kab. Nunukan	6.443	6.289	3.634	3.987	2.6390	25,43%
Kab. Bulungan	3.799	6.465	4.362	5.240	2.5038	24,13%
Kab. Malinau	2.097	2.585	1.079	1.615	8.823	8,50%
Kab. Tana Tidung	712	500	512	443	2.756	2,66%
Total Prov. Kaltara	25.103	24.507	17.253	8.405	103.774	100,00%

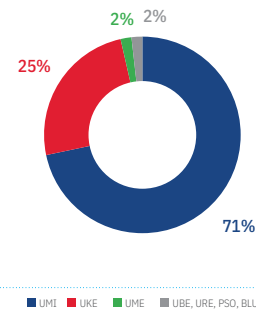
Sumber : Bank Indonesia

Grafik V. 10 Kontribusi Merchant QRIS berdasarkan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber Bank Indonesia

Grafik V. 11 Kontribusi Merchant QRIS berdasarkan Kategori di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber Bank Indonesia

Selain itu, *merchant* QRIS kategori Usaha Mikro (UMI) masih mendominasi dengan pangsa sebesar 71% (Grafik V.12). Adapun *merchant* kategori Usaha Kecil (UKE) berkontribusi sebesar 25%, diikuti kategori Usaha Menengah (UME) dan kategori lainnya yang masing-masing mencatat pangsa sekitar 2%.

5.4 PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Perluasan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mendorong penggunaan transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Tabel V. 2 Perkembangan Indeks ETPD Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Daerah	Indeks ETPD					
	SM-I 2024		SM-II 2025		SM-I 2025	
	Skor	Tahap	Skor	Tahap	Skor	Tahap
Provinsi Kalimantan Utara	92,4%	Digital	98,0%	Digital	97,8%	Digital
Kota Tarakan	97,5%	Digital	96,8%	Digital	95,8%	Digital
Kabupaten Bulungan	95,7%	Digital	96,8%	Digital	95,0%	Digital
Kabupaten Malinau	93,9%	Digital	92,8%	Digital	93,3%	Digital
Kabupaten Nunukan	92,5%	Digital	96,3%	Digital	83,6%	Digital
Kabupaten Tana Tidung	91,4%	Digital	93,0%	Digital	94,8%	Digital

Sumber : Bank Indonesia

(Satgas P2DD), Presiden mewajibkan Pemda untuk membentuk TP2DD. Tim ini merupakan forum koordinasi untuk mengakselerasi perluasan ETPD, baik di sisi pendapatan maupun belanja daerah.

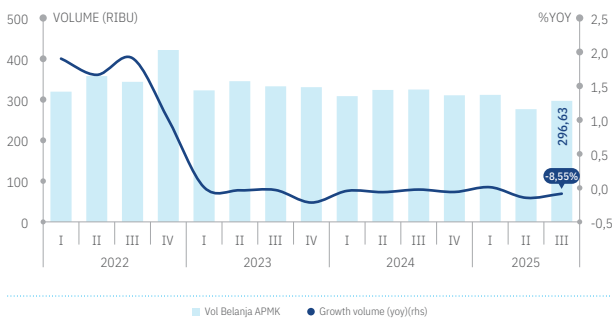
Berdasarkan data Indeks ETPD Semester I Tahun 2025, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara kembali menunjukkan kinerja yang solid dalam percepatan transformasi digital (Tabel V.3). Seluruh kabupaten/kota mencatat skor pada rentang 83,6% hingga 97,8%, dan seluruhnya telah berada pada tahap Digital. Capaian ini mencerminkan komitmen konsisten dari Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara dalam memperluas dan meningkatkan implementasi ETPD di daerah, sekaligus kesinambungan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

5.5 PERKEMBANGAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Kalimantan Utara mengalami perlambatan pada Triwulan III 2025. Pada Triwulan III 2025, volume transaksi APMK tercatat sebesar 296.628 transaksi, atau terkontraksi 8,55% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik V.13).

Perlambatan penurunan volume APMK terjadi di tengah meningkatnya preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital seperti mobile banking, e-wallet, dan QRIS yang semakin dominan dalam ekosistem pembayaran ritel.

Grafik V. 12 Perkembangan APMK



Sumber : Bank Indonesia

BOKS 3

Kaltara Digital QRIS (KATALIS) Bendindang Tahun 2025



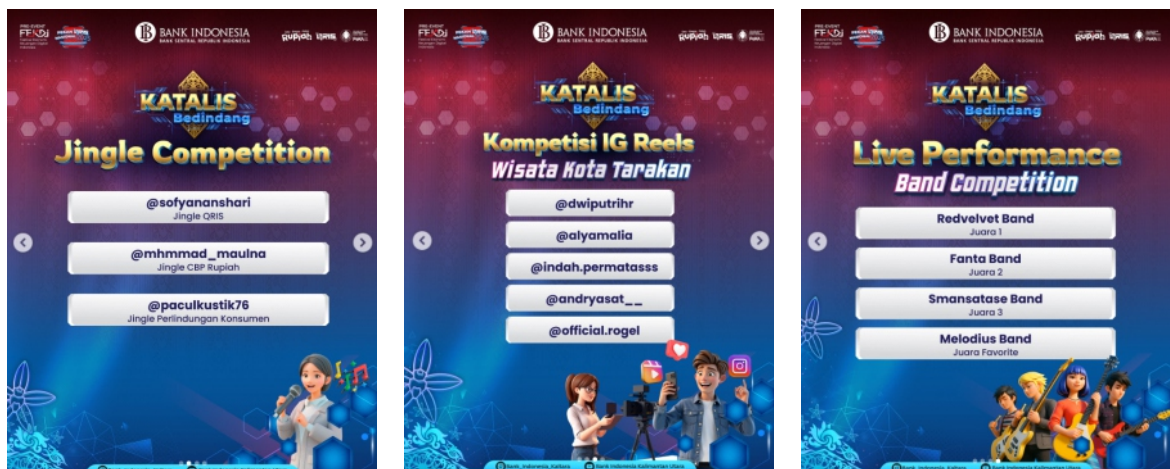
Gambar Boks V.1.1 Penyerahan Hadiah Pemenang Lomba Live Performance Band KATALIS Bedindang Tahun 2025

KPwBI Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pariwisata Kota Tarakan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan telah melaksanakan rangkaian kegiatan KATALIS Bedindang di Museum Sejarah Kota Tarakan sebagai bagian dari *pre-event* Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) Tahun 2025. KATALIS Bedindang Tahun 2025 bertujuan memperluas literasi digital masyarakat Provinsi Kalimantan Utara melalui perlombaan kreatifitas yang dibungkus dengan kampanye Bank Indonesia untuk memperkuat literasi masyarakat terkait pembayaran menggunakan kanal QRIS, edukasi Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, serta pemahaman kampanye Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah.

Deputi Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Wesky Putra Pratama, pada sambutannya menyampaikan bahwa, “KATALIS Bedindang Tahun 2025 lebih dari sekadar acara seni dan edukasi, acara ini diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi perekonomian Tarakan. Peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dapat memperkuat efisiensi perdagangan, mendorong pertumbuhan UMKM lokal, menarik kunjungan wisatawan, serta memacu daya saing daerah sebagai pusat ekonomi kreatif.”

KATALIS Bedindang Tahun 2025 menghadirkan beberapa kompetisi yang menjadi wadah seni kreatif anak muda Provinsi Kalimantan Utara, antara lain:

- 1) Lomba *Live Performance Band* untuk pelajar kelas 1-3 SMA/SMK/Sederajat se-Kalimantan Utara untuk menjangking potensi band dari pelajar se-Kaltara yang disandingkan dengan edukasi QRIS, Pelindungan Konsumen, dan CBP Rupiah diantara penampilan peserta.
- 2) Lomba *Jingle* bertema QRIS, Pelindungan Konsumen, dan CBP Rupiah yang akan digunakan sebagai medium kampanye kreatif secara online maupun offline dari KPwBI Provinsi Kalimantan Utara.
- 3) Lomba *IG Reels* dengan tema Wisata Kota Tarakan yang sudah menerima QRIS untuk mendorong partisipasi digital masyarakat dalam berwisata lokal serta melakukan transaksi digital melalui QRIS.



Gambar Boks V.1.2 Daftar Pemenang KATALIS Bedindang Tahun 2025

Selain kompetisi, KATALIS Bedindang tahun 2025 juga menghadirkan *coaching clinic* bersama musisi profesional, yakni Ray Prasetya, dengan pembayaran biaya pendaftaran melalui QRIS dan didonasikan untuk mendukung pengembangan museum sebagai sarana edukasi, rekreasi publik, serta peleksatarin sejarah kota Tarakan. Adapun jumlah pengunjung acara, tercatat sebanyak 590 orang dengan melakukan QRIS Experience (registrasi scan QRIS Rp80) sebelum memasuki area KATALIS Bedindang.

Melalui penyelenggaraan KATALIS Bedindang Tahun 2025, Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Utara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Kreativitas generasi muda yang hadir dalam kegiatan ini bukan hanya mencerminkan potensi besar daerah, tetapi juga menjadi energi baru dalam mendorong adopsi pembayaran digital, literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.







Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan



Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada Triwulan III 2025 tetap menunjukkan arah perbaikan yang stabil. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kembali melanjutkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dengan capaian 3,85% pada Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan 3,90% pada Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan di pasar tenaga kerja, didukung oleh peningkatan jumlah penduduk bekerja dan membaiknya serapan tenaga kerja di berbagai lapangan usaha. Kualitas hidup masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 73,41, melanjutkan tren peningkatan lima tahun terakhir. Angka ini mencerminkan perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sementara itu, Gini Ratio Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,261 pada Maret 2025, sedikit meningkat dari 0,259 pada September 2024. Meski demikian, Kalimantan Utara tetap menempati peringkat ke-2 nasional sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara tetap menunjukkan performa yang solid, ditopang oleh penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta ketimpangan yang relatif rendah.

6.1. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, persepsi responden di Kalimantan Utara terhadap kondisi pasar kerja menunjukkan pelemahan pada Triwulan III 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks ketersediaan lapangan kerja enam bulan yang lalu tercatat sebesar 95,10, turun sebesar 14,32% (yoy) dibandingkan 111,00 pada Triwulan III 2024 (Grafik VI.1).

Sementara itu, ekspektasi masyarakat terhadap kondisi pasar kerja ke depan turut mengalami penurunan, meskipun masih berada di level optimis. Indeks perkiraan ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan mendatang tercatat sebesar 124,77, lebih rendah dibandingkan 134,83 pada periode yang sama tahun sebelumnya atau turun 7,46% (yoy). Meski demikian, nilai indeks yang masih berada di atas 100 mencerminkan bahwa masyarakat secara umum optimis terhadap membaiknya prospek pasar kerja 6 (enam) bulan yang akan datang (Grafik VI.1).

Berdasarkan data BPS per Agustus 2025, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 2.099 orang, dari 393.704 orang pada Agustus 2024 menjadi 395.803 orang pada Agustus 2025. Peningkatan tersebut diikuti oleh bertambahnya jumlah penduduk bekerja sebanyak 2.211 orang, dari 378.361 menjadi 380.572 orang.

Sejalan dengan itu, jumlah pengangguran menurun sebesar 112 orang, dari 15.343 orang pada Agustus 2024 menjadi 15.231 orang pada Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat turun 0,05% (yoy), dari 3,90% menjadi 3,85%, didorong oleh membaiknya serapan tenaga kerja di beberapa lapangan usaha utama.

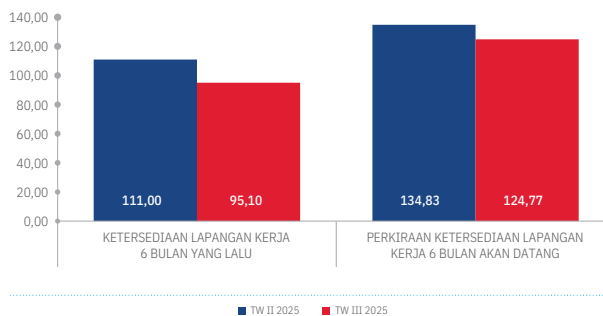
Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sedikit melemah sebesar 0,80% (yoy), dari 70,35% menjadi 69,55%. Penurunan TPAK tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang bertambah 7.404 orang atau 4,46% (yoy) (Tabel VI.1).

Tabel VI. 1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Kaltara

Kondisi Ketenagakerjaan	2024	2025	Pertumbuhan	
	AGS	AGS	Orang	%
Jumlah Penduduk 15+ (orang)	559.623	569.126	9.503	0,02
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	393.704	395.803	2.099	0,01
Jumlah Bekerja (orang)	378.361	380.572	2.211	0,01
Jumlah Penganggur (orang)	15.343	15.231	-112	-0,01
Bukan Angkatan Kerja (orang)	165.919	173.323	7.404	0,04
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK, %)	70,35	69,55	-0,80	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,90	3,85	-0,05	

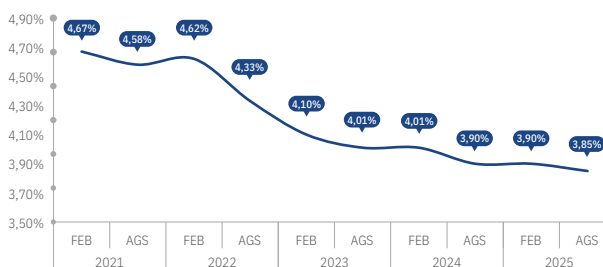
Sumber: BPS, diolah

Grafik VI. 1 Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik VI. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kaltara



Sumber: BPS, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren perbaikan dalam lima tahun terakhir. Pada Agustus 2025, TPT tercatat sebesar 3,85%, lebih rendah dibandingkan 3,90% pada Agustus 2024. Penurunan tersebut mencerminkan meningkatnya kapasitas penyerapan tenaga kerja dan menguatnya kondisi pasar tenaga kerja di daerah (Grafik VI.2).

Menurut lapangan usaha utama, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Utara. Pada Agustus 2025, sektor ini menyerap 124.003 orang atau 32,58% dari total tenaga kerja, meningkat 2,75% (yoy) dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 120.683 orang (31,90%) (Tabel VI. 2).

Tabel VI. 2 Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kaltara

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2024		Growth (yoy)	Agustus 2025		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	120.683	31,90%	-2,0%	124.003	32,58%	2,75%
Pertambangan dan Penggalian	12.125	3,20%	15,6%	15.421	4,05%	27,18%
Industri Pengolahan	27.192	7,19%	10,9%	28.075	7,38%	3,25%
Pengadaan Air, Listrik dan Gas	3.909	1,03%	-2,3%	3.653	0,96%	-6,55%
Konstruksi	17.963	4,75%	-7,9%	19.586	5,15%	9,04%
Perdagangan Besar dan Eceran	64.547	17,06%	8,5%	58.988	15,50%	-8,61%
Transportasi dan Pergudangan	14.262	3,77%	-12,4%	13.804	3,63%	-3,21%
Akomodasi dan Makan Minum	25.959	6,86%	3,0%	24.864	6,53%	-4,22%
Informasi dan Komunikasi	1.123	0,30%	-29,7%	1.956	0,51%	74,18%
Jasa Keuangan, Real Estat, dan Asuransi	3.300	0,87%	-27,5%	3.395	0,89%	2,88%
Jasa Perusahaan	6.159	1,63%	-17,1%	5.769	1,52%	-6,33%
Administrasi Pemerintahan	33.406	8,83%	0,4%	37.612	9,88%	12,59%
Jasa Pendidikan	21.477	5,68%	-0,1%	23.350	6,14%	8,72%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.968	2,90%	7,7%	9.542	2,51%	-13,00%
Jasa Lainnya	15.288	4,04%	38,4%	10.554	2,77%	-30,97%
Total	378.361	100,0%	-0,97%	380.572	100,0%	4,51%

Sumber: BPS, diolah

Peningkatan tersebut menunjukkan peran sektor primer yang tetap dominan dalam struktur ketenagakerjaan daerah.

Selain itu, pertumbuhan signifikan juga tercatat pada beberapa sektor lainnya. Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh kuat sebesar 27,18% (yoy), sejalan dengan peningkatan aktivitas hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya mineral. Sektor Informasi dan Komunikasi mencatat kenaikan tertinggi sebesar 74,18% (yoy). Sektor Administrasi Pemerintahan juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,59% (yoy), dengan serapan tenaga kerja mencapai 37.612 orang, didorong oleh peningkatan kebutuhan aparatur pada beberapa instansi daerah. Pertumbuhan positif turut terjadi pada sektor Konstruksi yang meningkat 9,04% (yoy), serta pada sektor Jasa Pendidikan yang naik 8,72% (yoy) (Tabel VI. 2).

Di sisi lain, beberapa sektor mengalami kontraksi. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran turun 8,61% (yoy). Penurunan juga terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,21% (yoy), serta sektor Akomodasi dan Makan Minum yang menurun 4,22% (yoy). Kontraksi cukup dalam tercatat pada sektor Pengadaan Air, Listrik, dan Gas sebesar 6,55% (yoy) serta Jasa Perusahaan yang turun 6,33% (yoy). Adapun sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami penurunan terbesar sebesar 13,00% (yoy), sementara sektor Jasa Lainnya turun 30,97% (yoy), mencerminkan adanya penyesuaian tenaga kerja pada sektor-sektor jasa non-esensial (Tabel VI. 2).

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara pada Agustus 2025 masih didominasi oleh kelompok Buruh/Karyawan/Pegawai, yang mencapai 180.949 orang atau 47,55% dari total tenaga kerja. Jumlah tersebut meningkat sebesar 3,3% (yoy) dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat sebanyak 175.095 orang, mencerminkan stabilnya penyerapan tenaga kerja pada sektor formal (Tabel VI.3).

Peningkatan signifikan juga terjadi pada kelompok Pekerja Bebas di Pertanian, yang tumbuh sebesar 130,7% (yoy) menjadi 17.561 orang. Selain itu, kelompok Berusaha Dibantu Buruh Tetap turut mencatat kenaikan sebesar 21,7% (yoy) menjadi 15.262 orang.

Kelompok Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap juga mengalami pertumbuhan moderat sebesar 0,6% (yoy) menjadi 48.462 orang, sementara sektor Pekerja Bebas di Nonpertanian tercatat menurun sebesar 14,5% (yoy) menjadi 6.958 orang. Penurunan cukup dalam terjadi pada kelompok Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar, yang turun 18,9% (yoy) menjadi 38.981 orang, serta pada kelompok Berusaha Sendiri, yang menurun 8,0% (yoy) menjadi 72.399 orang, mengindikasikan pergeseran sebagian pelaku usaha mandiri ke sektor dengan pendapatan lebih stabil atau ke pekerjaan tetap (Tabel VI.3).

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara pada Agustus 2025 masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah, dengan jumlah 121.958 orang atau

Tabel VI. 3 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2024		Growth (yoy)	Agustus 2025		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
Berusaha sendiri	78.697	20,80%	10,8%	72.399	19,02%	-8,0%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	48.181	12,73%	-6,6%	48.462	12,73%	0,6%
Berusaha dibantu buruh tetap	12.545	3,32%	-19,8%	15.262	4,01%	21,7%
Buruh/karyawan/pegawai	175.095	46,28%	4,1%	180.949	47,55%	3,3%
Pekerja bebas di pertanian	7.613	2,01%	-46,1%	17.561	4,61%	130,7%
Pekerja bebas di nonpertanian	8.138	2,15%	-23,2%	6.958	1,83%	-14,5%
Pekerja keluarga/tak dibayar	48.092	12,71%	2,1%	38.981	10,24%	-18,9%
Total	378.361	100%	-11,26%	380.572	100,00%	16,40%

Sumber: BPS, diolah

Tabel VI. 4 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan	Agustus 2024		Growth (yoy)	Agustus 2025		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
SD ke Bawah	123.573	32,66%	0,49%	121.958	32,05%	-1,31%
Sekolah Menengah Pertama	55.642	14,71%	-1,55%	52.512	13,80%	-5,63%
Sekolah Menengah Atas	88.685	23,44%	-6,27%	92.801	24,38%	4,64%
Sekolah Menengah Kejuruan	43.151	11,40%	21,30%	42.595	11,19%	-1,29%
Perguruan Tinggi	67.310	17,79%	7,55%	70.706	18,58%	5,05%
Total	378.361	100,00%		380.572	100,00%	

Sumber: BPS, diolah

32,05% dari total tenaga kerja. Jumlah tersebut tercatat menurun tipis sebesar 1,31% (yoy) dibandingkan Agustus 2024, namun pangsa nya tetap menjadi yang terbesar dalam struktur ketenagakerjaan daerah (Tabel VI.4).

Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tumbuh sebesar 4,64% (yoy) menjadi 92.801 orang. Selain itu, lulusan Perguruan Tinggi juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,05% (yoy), mencapai 70.706 orang atau 18,58% dari total tenaga kerja. Sementara itu, kelompok lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat menurun sebesar 5,63% (yoy) menjadi 52.512 orang, dengan pangsa sebesar 13,80%. Penurunan juga terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang turun 1,29% (yoy) menjadi 42.595 orang, dengan pangsa 11,19% (Tabel VI.4).

6.2. KESEJAHTERAAN

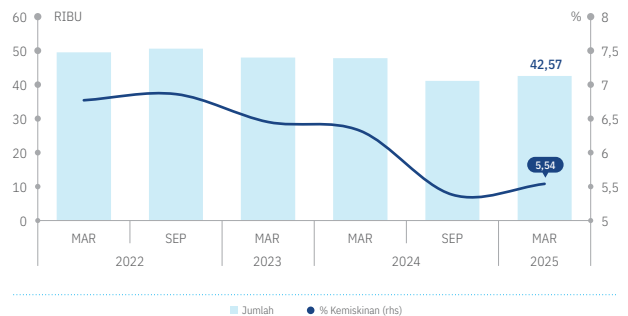
6.2.1. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar **42,57 ribu jiwa** atau **5,54%** dari total penduduk. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan kondisi September 2024 yang sebesar 41,11 ribu jiwa atau 5,38%, sehingga terjadi kenaikan sebanyak 1,46 ribu jiwa secara absolut dan 0,16 persen poin secara persentase. Peningkatan ini menandai berbaliknya tren positif penurunan kemiskinan yang sebelumnya tercatat pada

periode Maret hingga September 2024, di mana angka kemiskinan turun dari 6,32% menjadi 5,38% atau dari 47,83 ribu menjadi 41,11 ribu jiwa (Grafik VI.3).

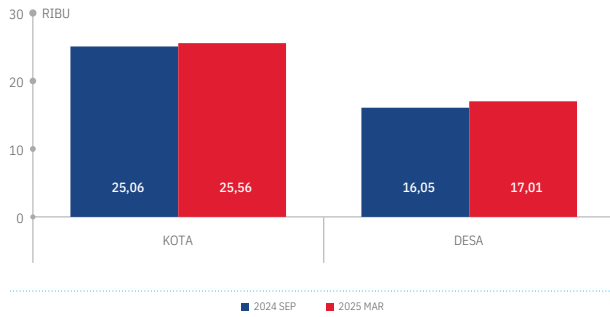
Peningkatan angka kemiskinan pada Maret 2025 tidak terlepas dari naiknya Garis Kemiskinan yang menjadi batas pengeluaran minimum untuk dikategorikan tidak miskin. Selama periode September 2024 hingga Maret 2025, Garis Kemiskinan meningkat 0,98%, dari Rp876.375 menjadi Rp884.970 per kapita per bulan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah nilai tersebut diklasifikasikan sebagai penduduk miskin, sehingga setiap perubahan pada garis ini akan berdampak langsung terhadap jumlah penduduk miskin, khususnya rumah tangga rentan yang berada di ambang batas garis kemiskinan.

Grafik VI. 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kaltara periode 2022 – 2025



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI. 4 Perkembangan Penduduk Miskin Kaltara di Perkotaan dan Desa periode 2024 dan 2025



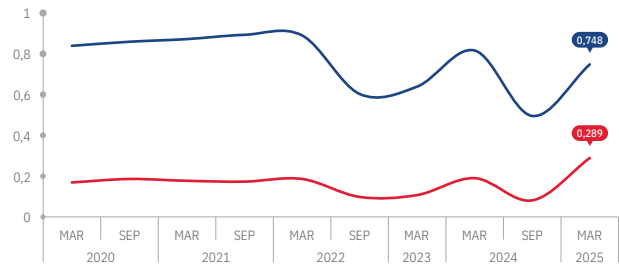
Sumber: BPS, diolah

Secara spasial, peningkatan kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin meningkat dari 25,06 ribu orang (5,07%) menjadi 25,56 ribu orang (5,27%), atau bertambah sekitar 0,5 ribu jiwa. Di daerah perdesaan, jumlahnya naik dari 16,05 ribu orang (5,96%) menjadi 17,01 ribu orang (5,98%), bertambah 0,97 ribu jiwa. Meskipun secara persentase peningkatan di perdesaan relatif kecil (0,02 persen poin), secara absolut tetap menunjukkan bertambahnya tekanan terhadap kelompok masyarakat miskin, yang sebelumnya justru mengalami penurunan signifikan pada September 2024 (Grafik VI.4).

Struktur garis kemiskinan di Kalimantan Utara masih didominasi oleh komponen konsumsi makanan, dengan kontribusi yang cukup besar terhadap total pengeluaran minimum. Pada Maret 2025, pola komoditas penyumbang garis kemiskinan makanan menunjukkan perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, lima komoditas utama penyumbang garis kemiskinan makanan adalah beras, rokok kretek/filter, telur ayam ras, bandeng, dan daging ayam ras. Di perdesaan, susunannya sedikit berbeda yaitu beras, rokok kretek/filter, bandeng, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Komoditas beras tetap menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 24,88% di perkotaan dan 27,38% di perdesaan, menegaskan pentingnya stabilisasi harga pangan pokok, khususnya beras, sebagai bagian dari strategi pengendalian kemiskinan.

Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,748, mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi September 2024 yang sebesar 0,495. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Sejalan dengan itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan, dari 0,081 pada September 2024 menjadi 0,289 pada Maret 2025. Kenaikan P2 ini mencerminkan bahwa ketimpangan di antara kelompok penduduk miskin turut memburuk, di mana beban kemiskinan tidak hanya meningkat secara umum, tetapi juga lebih timpang antarindividu dalam kelompok miskin tersebut.

Grafik VI. 5 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Periode 2020-2024



Sumber: BPS, diolah

6.2.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Utara pada September 2025 tercatat sebesar 116,19, meningkat 2,50% (yoy) dibandingkan dengan September 2024 sebesar 113,36. Peningkatan NTP ini didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 4,46% (yoy), dari 129,06 menjadi 134,81. Di sisi lain, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 1,91% (yoy), dari 113,85 menjadi 116,03, menunjukkan adanya tekanan biaya konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. Secara lebih rinci, Indeks Konsumsi Rumah Tangga meningkat sebesar 2,36% (yoy), sedangkan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) tercatat tumbuh sebesar 0,47% (yoy) (Tabel VI.5).

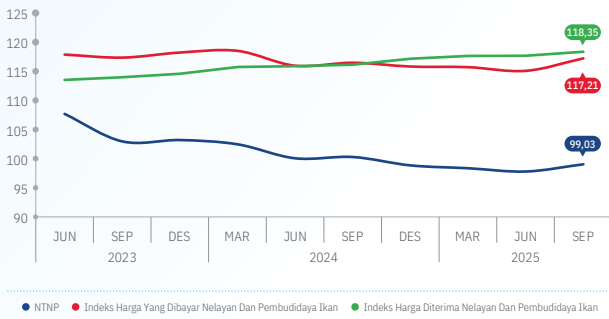
Secara sektoral, peningkatan NTP terutama didorong oleh kinerja subsektor tanaman perkebunan rakyat, yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,78% (yoy). Peningkatan ini mencerminkan perbaikan harga sejumlah komoditas perkebunan di daerah. Selain itu, subsektor tanaman pangan juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,51% (yoy). **Di sisi lain, beberapa subsektor mengalami penurunan harga.** Subsektor hortikultura tercatat melemah 0,73% (yoy), sementara subsektor **peternakan dan perikanan** masing-masing menurun 1,74% dan 1,25% (yoy) (Tabel VI.5).

Tabel VI. 5 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kaltara

Indeks	2024	2025	YOY
	SEP	SEP	
Tanaman Pangan	102,7	103,22	0,51%
Holtikultura	102,34	101,59	-0,73%
Tanaman Perkebunan Rakyat	180,19	203,21	12,78%
Peternakan	102,84	101,05	-1,74%
Perikanan	100,28	99,03	-1,25%
Gabungan			
NTP	113,36	116,19	2,50%
Indeks Harga yg Diterima Petani (%)	129,06	134,81	4,46%
Indeks Harga yg Dibayar Petani (%)	113,85	116,03	1,91%
a. Indeks Konsumsi RT	114,34	117,04	2,36%
b. Indeks BPPBM	110,75	111,27	0,47%

Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.6 NTNP, Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan



Sumber: BPS, diolah

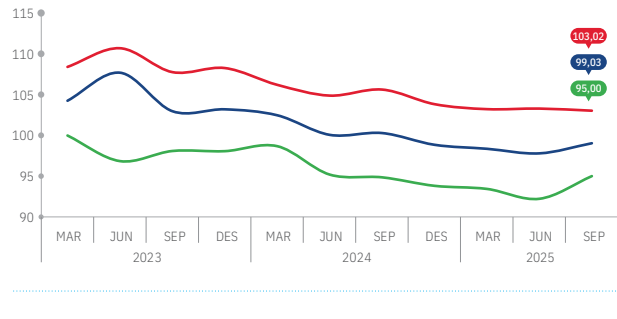
Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) di Provinsi Kalimantan Utara pada September 2025 tercatat sebesar 99,03, atau mengalami kontraksi sebesar 1,03% (yoy) dibandingkan dengan posisi September 2024 sebesar 100,28. Penurunan NTNP ini mengindikasikan melemahnya daya beli nelayan dan pembudidaya ikan, seiring dengan tekanan pada harga jual hasil tangkapan maupun komoditas budidaya yang tidak sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan biaya konsumsi dan biaya produksi yang mereka tanggung.

Secara rinci, Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) pada September 2025 tercatat sebesar 117,21, meningkat terbatas sebesar 1,09% (yoy) dibandingkan 116,46 pada September 2024. Di sisi lain, Indeks Harga yang Dibayar (Ib) meningkat lebih tinggi, yaitu sebesar 2,13% (yoy), dari 116,13 menjadi 118,35. Dengan demikian, kesenjangan antara pertumbuhan It dan Ib menjadi faktor utama penurunan NTNP pada September 2025, menandakan bahwa tekanan biaya produksi dan konsumsi masih lebih besar dibandingkan perbaikan harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan.

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 99,03, mengalami kontraksi sebesar 1,25% (yoy) dibandingkan dengan posisi September 2024 yang sebesar 100,28. Dari sisi nelayan tangkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada September 2025 tercatat sebesar 103,02 atau menurun 2,45% (yoy) dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 105,61. Penurunan NTN tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga input relatif lebih tinggi dibandingkan peningkatan harga ikan yang diterima nelayan.

Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) berada pada level 95,00 atau meningkat tipis 0,16% (yoy) dari 94,85 pada September 2024. Kenaikan yang minimal ini menunjukkan bahwa pembudidaya ikan masih menghadapi tekanan biaya produksi yang cukup tinggi, meskipun relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik VI.7 NTNP, NTN, dan NTPi



Sumber: BPS, diolah

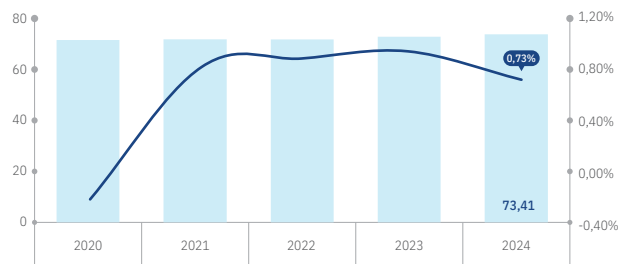
6.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan dalam rentang lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 71,00, kemudian meningkat menjadi 71,57 pada 2021, 72,21 pada 2022, dan 72,88 pada 2023. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana IPM mencapai 73,41, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat (Grafik VI. 8).

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 didukung oleh pertumbuhan di seluruh dimensi penyusunnya. Dimensi standar hidup layak menjadi faktor yang mengalami akselerasi pertumbuhan paling signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang melonjak sebesar 4,76 persen, dari Rp9.734 ribu pada tahun 2023 menjadi Rp10.197 ribu pada tahun 2024. Demikian juga pada dimensi Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang mengalami kenaikan 0,04 persen, dari 73,54 tahun pada 2023 menjadi 73,57 tahun pada 2024.

Di sisi lain, dimensi pengetahuan terus menunjukkan peningkatan, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat. Harapan Lama Sekolah (HLS) tetap mengalami kenaikan, bertambah dari 13,20 tahun pada 2023 menjadi

Grafik VI. 8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltara tahun 2020–2024



Sumber: BPS, diolah

Tabel VI.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2024

Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	72,59	72,65	73,51	73,54	73,57
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,93	12,94	13,06	13,20	13,21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,00	9,11	9,27	9,34	9,35
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp)	8.756	9.075	9.350	9.734	10.197

Sumber : Bank Indonesia

Tabel VI.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Kalimantan

Provinsi	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp) 2024	IPM		
	2024	2024	2024		Nilai	Pertumbuhan	Nasional
Kalimantan Barat	73,94	12,68	7,78	10.321	71,19	0,72	32
Kalimantan Tengah	73,73	12,77	8,82	12.303	74,28	0,55	20
Kalimantan Selatan	74,18	12,87	8,62	13.399	75,19	0,53	13
Kalimantan Timur	74,94	14,03	10,02	13.793	78,79	0,59	4
Kalimantan Utara	73,57	13,21	9,35	10.197	73,41	0,53	25
Indonesia	74,15	13,21	8,85	12.341	75,02	0,63	-

Sumber: BPS, diolah

13,21 tahun pada 2024, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 9,34 tahun pada 2023 menjadi 9,35 tahun pada 2024, menandakan adanya kemajuan dalam tingkat partisipasi pendidikan masyarakat.

Secara keseluruhan, tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 tetap terjaga dengan baik. Meskipun laju pertumbuhan beberapa indikator lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya, capaian positif di berbagai aspek pembangunan mencerminkan komitmen yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan perbandingan secara regional Kalimantan, IPM Kalimantan Utara menempati peringkat keempat di Kalimantan, setelah Kalimantan Timur (78,39), Kalimantan Selatan (75,19), dan Kalimantan Tengah (73,67), serta berada di peringkat ke-25 secara nasional. Peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Utara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa depan, sejalan dengan pelaksanaan berbagai proyek strategis di wilayah tersebut, terutama KIH di Tanah Kuning, Mangkupadai, yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja.

6.2.4 GINI Ratio

Berdasarkan data BPS per Maret 2025, Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,261, mengalami kenaikan dibandingkan dengan September 2024 yang

sebesar 0,259. Angka ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan ketimpangan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Secara spasial, perkembangan Gini Ratio menunjukkan pola yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di wilayah perkotaan, Gini Ratio tercatat meningkat dari 0,245 pada September 2024 menjadi 0,262 pada Maret 2025. Sementara itu, di wilayah pedesaan, Gini Ratio justru menurun dari 0,265 menjadi 0,253, yang mencerminkan adanya perbaikan pemerataan pendapatan di kawasan pedesaan (Tabel VI.8).

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan yang umum digunakan adalah persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah. Indikator ini mengukur distribusi pengeluaran kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap total pengeluaran penduduk, di mana semakin tinggi angkanya menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah. Menurut klasifikasi Bank Dunia, ketimpangan dikategorikan rendah apabila angka pengeluaran 40% terbawah berada di atas 17 persen.

Tabel VI.8 GINI Ratio Penduduk di Kaltara Menurut Daerah, bulan September 2025 dan Maret 2025

Ukuran Ketimpangan	Sep 2024			Maret 2025		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
Gini Ratio	0,245	0,265	0,259	0,262	0,253	0,261
Bank Dunia 40% Terbawah	25,70	24,27	24,26	24,47	24,98	24,64

Sumber: BPS, diolah

Tabel VI. 9 Perbandingan GINI Ratio Se-Kalimantan

Provinsi	2023	2024		2025	Posisi Nasional (Gini Ratio terendah)	September 2024 - Maret 2025 (yoy)
	MAR	MAR	SEP	MAR		
Kalimantan Barat	0,321	0,310	0,314	0,316	17	0,64%
Kalimantan Tengah	0,317	0,301	0,304	0,292	6	-3,95%
Kalimantan Selatan	0,313	0,302	0,298	0,287	8	-3,69%
Kalimantan Timur	0,322	0,321	0,31	0,312	15	0,65%
Kalimantan Utara	0,277	0,264	0,259	0,261	2	0,77%

Sumber: BPS, diolah

Pada Maret 2025, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah di Kalimantan Utara tercatat sebesar 24,65%, meningkat dari 24,26% pada September 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan memperkuat sinyal positif terhadap pengurangan ketimpangan.

Secara nasional, Kalimantan Utara menempati peringkat kedua dengan Gini Ratio terendah, menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Meskipun mengalami sedikit kenaikan, capaian ini masih lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi lain di Kalimantan, seperti Kalimantan Selatan (0,287), Kalimantan Tengah (0,292), Kalimantan Timur (0,312), dan Kalimantan Barat (0,316). Seluruh provinsi di Kalimantan mencatatkan Gini Ratio yang lebih tinggi dari Kalimantan Utara, menandakan relatif rendahnya tingkat ketimpangan di provinsi ini (Tabel VI. 9).





Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian Prov. Kaltara diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan realisasi 2024, yaitu dalam kisaran 4,5%-5,0% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi. LU Industri Pengolahan diperkirakan akan memiliki andil besar dalam PDRB 2025 sejalan dengan realisasi investasi dan operasi produksi pabrik pengolahan kertas di Kota Tarakan, peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit, dan target commissioning smelter aluminium pada Triwulan IV 2025. LU Perdagangan juga diperkirakan terus meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan akibat pasokan barang domestik dan impor yang meningkat untuk mendukung kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. Kaltara. LU Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh pada 2025 sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PLTA Sei Mentarang. Sementara itu, LU dengan pangsa terbesar di Prov. Kaltara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan akan tumbuh terbatas, didorong dengan melambatnya kebutuhan energi dari negara besar pengguna batu bara seperti Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara di tengah perang tarif dagang dan fokus pengembangan sumber energi terbarukan.



Inflasi Prov. Kaltara 2025 diperkirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu $2,5\pm 1\%$. Prov. Kaltara diperkirakan akan mengalami tekanan harga yang lebih tinggi pada 2025, sejalan dengan realisasi inflasi 2024 yang cukup rendah pada level 1,29% yoy, kenaikan harga komoditas global seperti emas, berkurangnya subsidi akibat efisiensi anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

7.1 PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global 2025 diperkirakan melambat, meski tidak sedalam perkiraan sebelumnya sejalan dengan meredanya perang tarif dagang. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tumbuh 3,0% (yoy) pada 2025, melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,3% (yoy). Adapun proyeksi pertumbuhan tersebut merupakan revisi ke atas dari proyeksi IMF pada *World Economic Outlook* pada April 2025. Revisi ke atas tersebut sejalan dengan aktivitas dagang yang *front-loading*, tarif impor yang lebih rendah, kondisi keuangan yang lebih baik, dan ekspansi fiskal di beberapa negara utama, seperti AS, Jerman, dan Tiongkok. Ekonomi negara maju diperkirakan tumbuh sebesar 1,5% (yoy) pada 2025, menurun dari realisasi pertumbuhan ekonomi global 2024 sebesar 1,8% (yoy). Sementara itu, negara berkembang diperkirakan tumbuh 4,1% (yoy), juga menurun dari pertumbuhan 2024 sebesar 4,3% (yoy).

Perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan tumbuh 1,9% (yoy) pada 2025, melambat dari 2,8% (yoy) pada 2024. Pertumbuhan ekonomi AS mengalami revisi ke atas sejalan dengan tarif impor yang lebih rendah dan pelonggaran sistem keuangan AS. Ekonomi Euro Area juga diperkirakan tumbuh melambat yaitu sebesar 1,0% (yoy), dari pertumbuhan 2024 sebesar 1,2% (yoy) terdampak ketidakpastian yang tinggi akibat proses renegotiasi tarif dagang yang masih berlanjut. Lebih lanjut, ekonomi Tiongkok diperkirakan tumbuh 4,8% (yoy) pada 2025, melambat dari sebesar 5,0% (yoy) di tahun 2024. Sejalan dengan perlambatan di negara maju, melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga disebabkan oleh tarif resiprok AS yang tinggi (Tabel VII.1).

Disinflasi global diperkirakan terus berlanjut dengan perkembangan inflasi yang beragam di setiap negara. Inflasi global diproyeksikan sebesar 4,2% (yoy) pada 2025, menurun dari inflasi 2024 sebesar 5,6% (yoy). Perkiraan tersebut sejalan dengan tren pelemahan permintaan dan penurunan harga energi secara global. Inflasi negara maju diperkirakan sebesar 2,5% (yoy) pada 2025, sedikit menurun dari inflasi 2024 sebesar 2,6% (yoy), dipengaruhi oleh ketidakpastian dinamika harga dan permintaan di AS, serta perkembangan inflasi yang lebih rendah di Euro Area. Inflasi negara berkembang diperkirakan sebesar 5,4% (yoy), menurun dari inflasi 2024 sebesar 7,7% (yoy).

Volume perdagangan global 2025 diperkirakan menurun sejalan dengan pemberlakuan tarif dagang AS dan ketegangan konflik Timur Tengah. IMF memproyeksikan bahwa volume perdagangan (barang dan jasa) global pada 2025 tumbuh pada level 2,6% (yoy), lebih rendah dibandingkan 2024 sebesar 3,5% (yoy) namun lebih baik dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy). Prakiraan yang membaik tersebut sejalan

Tabel VII. 1 Perbandingan Ekonomi Negara Lain

Indikator	%yoy			
	2023	2024	2025	2026
PDB Global	3,3	3,3	3,2	3,1
Negara Maju	1,7	1,8	1,6	1,6
AS	2,9	2,8	2,0	2,1
Euro Area	0,4	0,9	1,2	1,1
Jerman	-0,3	-0,5	0,2	0,9
Prancis	1,1	1,1	0,7	0,9
Italia	0,7	0,7	0,5	0,8
Spanyol	2,7	3,5	2,9	2,0
Jepang	1,5	0,1	1,1	0,6
Ingggris	0,3	1,1	1,3	1,3
Negara Berkembang	4,4	4,3	4,2	4,0
Tiongkok	5,2	5,0	4,8	4,2
India	8,2	6,5	6,6	6,2
Rusia	3,6	4,3	0,6	1,0
Brazil	3,2	3,4	2,4	1,9
Afrika Selatan	0,7	0,5	1,1	1,2
Inflasi Global	6,6	5,8	4,2	3,7
Negara Maju	4,6	2,6	2,5	2,2
Negara Berkembang	8,0	7,9	5,3	4,7
Volume Perdagangan Global (Barang & Jasa)	1,0	3,5	3,6	2,3

Sumber: IMF-World Economic Outlook Update, October 2025, diolah

dengan *front loading* arus perdagangan sebagai antisipasi darimeningkatnya ketidakpastian kebijakan dagang dan semakin ketatnya aturan dagang pada semester II 2025. Ke depan, eskalasi perang tarif dagang dan konflik geopolitik yang berkepanjangan diperkirakan akan memberikan dampak lebih lanjut pada aktivitas perdagangan yang mempengaruhi jalur dan/atau rantai pasok, terutama pada negara yang berorientasi ekspor.

Pelonggaran kebijakan moneter diperkirakan berlanjut di tengah peningkatan defisit fiskal 2025 beberapa negara maju.

Mayoritas bank sentral diperkirakan akan melanjutkan penurunan suku bunga kebijakan sejalan dengan disinflasi yang terus berlanjut. Pada 2025, *Federal Reserve*, *European Central Bank*, dan *Bank of England* diperkirakan akan melanjutkan penurunan suku bunga kebijakan meski dengan laju penurunan yang berbeda, sementara *Bank of Japan* diperkirakan akan meningkatkan suku bunga kebijakan. Di sisi lain, arah kebijakan fiskal tahun 2025 diperkirakan lebih ekspansif terutama di AS, Jerman, dan Tiongkok dalam rangka memperkuat kinerja permintaan domestik.

7.2 PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh positif pada 2025 dan perlu terus ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat didukung stimulus fiskal melalui implementasi proyek prioritas dan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2025 serta bauran kebijakan Bank Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong kenaikan ekspektasi penghasilan, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, sejalan tambahan bantuan sosial Pemerintah serta kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Investasi, khususnya nonbangunan, diperkirakan lebih tinggi tecermin dari indeks *Prompt Manufacturing Index (PMI)* yang tetap pada level ekspansif. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%, dan akan meningkat pada 2026. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 diperkirakan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran. Bank Indonesia meyakini prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran $2,5\pm 1\%$. Inflasi inti diperkirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi *volatile food* diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku

bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$, serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pelonggaran kebijakan makroprudensial diperkuat dengan meningkatkan efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan dalam mempercepat penurunan suku bunga dan kenaikan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

7.3 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI KALTARA

Perekonomian Prov. Kaltara diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan realisasi 2024, yaitu dalam kisaran 4,5%-5,0% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi. LU Industri Pengolahan diperkirakan akan memiliki andil besar dalam PDRB 2025 sejalan dengan realisasi investasi dan operasi produksi pabrik pengolahan kertas di Kota Tarakan, peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit, dan target *commissioning smelter* aluminium pada Triwulan IV 2025. LU Perdagangan juga diperkirakan terus meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. Kaltara. LU Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh pada 2025 sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Kalimantan *Industrial Park* Indonesia (KIPI) dan PLTA Sei Mentarang. Sementara itu, LU dengan pangsa terbesar di Prov. Kaltara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas akibat perlambatan permintaan energi dari negara besar pengguna batu bara (a.l Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara) di tengah perlambatan prospek ekonomi akibat perang tarif dagang, pengembangan sumber energi terbarukan serta upaya pemenuhan sumber energi secara domestik.

LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan realisasi 2024 sebesar 3,37% (yoy). Kondisi ini didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi di pabrik pengolahan kertas PRI Tarakan pada 2025. Selain itu, produk olahan lainnya seperti *plywood* diperkirakan mengalami perbaikan seiring meningkatnya produksi kayu di tengah kondisi cuaca yang lebih baik. Industri pengolahan kelapa sawit juga diperkirakan meningkat sejalan dengan produksi CPO yang lebih tinggi pada periode *peak crop* pada semester II 2025. Hilirisasi aluminium juga diperkirakan akan berkontribusi pada

LU Industri Pengolahan sejalan dengan target *commissioning smelter* aluminium pada triwulan IV 2024h5 dan mulai berproduksi pada awal 2026.

LU Perdagangan diperkirakan tetap tumbuh positif pada 2025, lebih tinggi jika dibandingkan realisasi 2024 sebesar 9,80% (yoy). LU Perdagangan diperkirakan tetap tumbuh positif didorong oleh peningkatan perdagangan barang domestik dan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh optimisme konsumen yang tercermin dari IKK yang berada di level yang tinggi dan kredit yang tetap tumbuh. Aktivitas perdagangan juga diperkirakan meningkat sejalan dengan percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional, serta meningkatnya aktivitas LU Pertanian dan produksi LU Industri Pengolahan selama periode 2025.

LU Konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif pada 2025, meski lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2024 yang tumbuh 11,95% (yoy). Kondisi ini didorong oleh pembangunan sejumlah proyek strategis seperti KIHI, terutama pada pembangunan smelter aluminium yang ditargetkan selesai pada 2025 dan mulai berproduksi pada awal 2026. Perlambatan kinerja LU Konstruksi tersebut juga berdampak penundaan proyek infrastruktur pemerintah akibat realokasi anggaran. Meski demikian, proyek konstruksi pemerintah diperkirakan kembali meningkat pada periode mendatang. RPJMD Provinsi Kaltara mencatat bahwa pemerintah daerah mencanangkan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan konektivitas jalan Malinau - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang. Selain itu, konstruksi fisik juga akan berkontribusi oleh pembangunan PLTA Sei Mentarang yang ditargetkan akan beroperasi pada 2030.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2025 dibandingkan 2024 yang tercatat tumbuh 1,75% (yoy). Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akan meningkat pada 2025, setelah pada 2024 tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup rendah. Pertumbuhan sektor pertanian akan didukung oleh optimisme peningkatan produksi TBS di tengah berlanjutnya kenaikan harga TBS, serta peningkatan produksi padi sejalan dengan perluasan operasi lahan GERINA pada 2025. Sektor perikanan juga diperkirakan meningkat tipis pada 2025, sejalan dengan optimisme kenaikan harga komoditas perikanan pada 2025 serta didorong oleh fokus pembudidaya perikanan untuk meningkatkan produksi meski terdapat tekanan ekspor akibat perang tarif. Selain itu, produksi komoditas rumput laut diperkirakan lebih tinggi sejalan dengan tren harga yang meningkat sejak 2024

Kinerja LU Pertambangan pada 2025 diperkirakan lebih rendah dari realisasi tahun 2024 sebesar 0,28% (yoy). LU Pertambangan diperkirakan tumbuh lebih rendah pada 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Prakiraan pertumbuhan tersebut disebabkan potensi penurunan target produksi batu bara sejalan dengan cuaca yang lebih buruk pada awal tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Selain itu, kinerja LU Pertambangan yang terbatas tersebut juga terdampak penurunan permintaan batu bara global akibat pelemahan permintaan terdampak perang tarif dagang dan fokus pengembangan sumber energi terbarukan di negara tujuan ekspor utama.

Dari sisi permintaan, perekonomian Prov. Kaltara 2025 diperkirakan tetap melanjutkan tren positif. Peningkatan pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif hampir seluruh komponen sisi permintaan. Konsumsi RT Prov. Kaltara diperkirakan akan tetap tumbuh positif sejalan dengan kenaikan UMP dan UMK 2025 dan ekspektasi masyarakat yang terjaga pada level optimis. Konsumsi Pemerintah diperkirakan akan tumbuh namun melambat dari 2025, didorong efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan pendapatan APBD 2025. Investasi diperkirakan akan berlanjut tumbuh namun terbatas pada 2025 sejalan dengan akselerasi pembangunan KIPI dan PLTA Sei Mentarang, serta penundaan proyek infrastruktur pemerintah. Kegiatan ekspor dan impor pada keseluruhan 2025 juga diperkirakan akan tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi.

Terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Prov. Kaltara ke depan. Perkembangan ekonomi Prov. Kaltara dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Beberapa faktor eksternal adalah terkait dengan (i) perkembangan perekonomian negara tujuan ekspor utama, diantaranya perlambatan ekonomi Tiongkok yang berdampak pada melambatnya permintaan ekspor sejumlah komoditas utama batu bara dan produk perikanan; (ii) kembali memanasnya konflik geopolitik seperti Tiongkok-Jepang, Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah dan India-Pakistan yang dapat berdampak pada terganggunya rantai pasok global; (iii) ketidakpastian perang tarif dagang AS dengan negara lain; serta (iv) normalisasi permintaan batu bara global sejalan dengan maraknya penggunaan *renewable energy*. Sementara itu, dari sisi internal, beberapa potensi risiko yang perlu diperhatikan adalah (i) faktor cuaca buruk yang dapat berdampak pada produktivitas hasil panen pertanian, ikan tangkap, dan hasil tambang serta terganggunya distribusi pasokan; (ii) tidak kondusifnya situasi

politik atau pemerintahan yang dapat berdampak pada penurunan investasi dan peningkatan *capital outflow*; dan (iii) tertundanya belanja dan/atau program strategis pemerintah yang berdampak pada rendahnya realisasi dan efek pengganda belanja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, perekonomian Prov. Kaltara pada 2025 diprakirakan melanjutkan pertumbuhan yang positif.

Prakiraan tersebut sejalan dengan target operasionalisasi (KIHI) dan industri energi terbarukan seperti PLTA Sei Mentarang dan PLTA Sei Pancang yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian Prov. Kaltara. Selain itu, permintaan produk dan peningkatan produksi hasil sektor perkebunan seperti TBS dan sektor industri pengolahan seperti CPO juga berpotensi meningkat pada 2025. Adapun optimisme pertumbuhan ekonomi Kaltara ke depan juga didukung oleh prakiraan PMI negara dagang utama India dan Tiongkok yang diperkirakan masih tetap dalam fase ekspansif (diatas 50) pada tahun 2025.

7.4 PROSPEK INFLASI KALIMANTAN UTARA

Inflasi Prov. Kaltara 2025 diprakirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu $2,5\pm 1\%$. Prov. Kaltara diprakirakan akan mengalami tekanan harga yang lebih tinggi pada 2025, sejalan dengan realisasi inflasi 2024 yang cukup rendah pada level 1,29% yoy, berlanjutnya kenaikan harga komoditas global seperti emas, berkurangnya subsidi ongkos angkut akibat efisiensi anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program MBG. Inflasi inti diprakirakan berada pada titik tengah sasaran target inflasi pada 2025, seiring kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian global yang meningkat dan peningkatan permintaan masyarakat yang didorong oleh kenaikan UMP dan UMK. Inflasi *administered price* juga diperkirakan relatif lebih tinggi dari tahun sebelumnya didorong oleh tensi geopolitik dengan ketidakpastian yang tinggi dan berkurangnya subsidi pemerintah di tengah efisiensi anggaran. Sementara itu, inflasi *volatile food* diprakirakan relatif sama dengan tahun sebelumnya, didorong oleh fokus pemerintah untuk menciptakan kondisi pasokan yang terjaga. Meski demikian, perlu diwaspadai peningkatan harga pangan utama seperti beras, aneka cabai, bawang merah, dan daging ayam yang secara

historis terjadi di akhir tahun. Selain itu, pemulihan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat juga berpotensi meningkatkan permintaan komoditas makanan dari sektor hotel, restoran, dan catering (*horeca*).

Sejumlah potensi risiko inflasi yang lebih tinggi perlu diwaspadai dalam upaya menjaga inflasi Prov. Kaltara 2025 sesuai target.

Risiko inflasi Prov. Kaltara pada 2025 terutama bersumber dari penyesuaian subsidi pemerintah yang berpotensi meningkatkan tekanan harga, seperti penyesuaian subsidi ongkos angkutan dapat berdampak pada kenaikan harga distribusi dan gangguan pasokan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga di tingkat produsen. Potensi kenaikan harga *administered price* bersumber dari penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan udara. Pada sisi eksternal, ketegangan geopolitik antara Russia-Ukraina dan konflik Timur Tengah serta perang tarif impor oleh Amerika Serikat berpotensi mengganggu produksi dan alur distribusi pangan, energi, serta pupuk sehingga memberikan tekanan terhadap harga komoditas bahan baku dan energi.

Berdasarkan sejumlah risiko inflasi tersebut, berbagai program dan langkah koordinasi pengendalian inflasi melalui TPID semakin diperkuat.

TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Prov. Kaltara telah menyusun sejumlah program kerja strategis dalam pengendalian inflasi berdasarkan kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah lain untuk mendukung terpenuhinya pasokan komoditas pangan strategis juga terus dilakukan terutama pada momen menjelang HBKN yang secara historis memiliki risiko inflasi lebih tinggi ataupun ketika terjadi tekanan harga pada komoditas tertentu. Berbagai program unggulan yang dilakukan, seperti (1) Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diharapkan dapat tetap berlangsung sehingga mampu menekan inflasi khususnya dari sisi biaya distribusi; (2) Penerapan kebijakan *window scheduling* dan peningkatan kapasitas pelabuhan agar memprioritaskan bongkar muat komoditas bapokting di Pelabuhan Malundung, Tarakan; dan (3) Berbagai dukungan untuk penguatan produksi dari sisi hulu dan hilir juga turut diimplementasikan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan Prov. Kaltara.

Daftar Istilah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berth Occupancy Ratio (BOR)

Perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

Dwelling Time

Total waktu yang dibutuhkan peti kemas selama di pelabuhan. Waktu yang dihitung mulai dari suatu petikemas (container) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.

Ekspor-Import

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).

Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI)

Proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong ekonomi hijau dan transisi energi.

Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)

Laporan yang berisi informasi yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh otoritas.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun (giro, tabungan dan deposito).

Month to month (mtm)

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Program pemerintah untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat.

Non Performing Loan (NPL)

Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau non-lancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Purchasing Managers Index (PMI)

Merupakan indeks gabungan dari berbagai indikator bertujuan untuk mengukur tingkat produksi, mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian.

Quarter to quarter (qtq)

Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)

Rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara yang meliputi aspek perusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya. TPID berfungsi untuk memonitor dan menganalisis pergerakan harga di pasar, serta melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi

Year on year (yoy)

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya

Tim Penyusun

Pengarah

Hasiando G. Manik

Penanggung Jawab

Seno Indarto

Koordinator Penyusun & Editor

Gabriel Fedrichson

Tim Penulis

M. Rizki Prasetyo

Fikri Rahmat Muttaqin

Raden Muhammad Hilman Madya Nugraha

Fadhali Irfan

Donny Damara

Haikal Muhammad

Arfian Saputra Siregar

Haikal Muhammad

Gabriel Fedrichson

Riza Abditya Wijaya



Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi
Kantor Perwakilan BankIndonesia Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Mulawarman No. 123 Tarakan
KalimantanUtara77117
Telp : 0551 - 3807777, Fax : 0551 - 3803131
www.bi.go.id

